

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2018**

Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dilingkungan Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategis Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Diharapkan apa yang telah dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disisi lain, LAKIP ini dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2018 agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Padang, Januari 2019
Kepala Dinas

Ir. Fathol Bari, M.Sc.Eng
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640515 199003 1 010

Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018. Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran, serta Visi dan Misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021. Visi tersebut yakni sebagai "Mewujudkan Infrastruktur yang handal, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan", yang merupakan bagian dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD sebesar Rp. 483.181.721.020,- dengan Realisasi sebesar Rp. 439.317.857.318,86,- (90,92%) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Program sebanyak 16 (enam belas) program, Kegiatan sebanyak 116 (seratus enam belas) kegiatan dan Paket Kegiatan sebanyak 202 (dua ratus dua) paket kegiatan.

Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.060.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.424.670.430,- (134,40 %).

Tabel Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Restribusi	Anggaran	Realisasi	%
1.	Laboratorium	210.000.000	624.571.420	297,41
2.	Alat-alat berat	850.000.000	800.099.000	94,12
	Jumlah	1.060.000.000	1.424.670.430	134,40

Dana APBD SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 sebesar :

Tabel Pagu Dana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

No.	Uraian	Rencana	Realisasi	Sisa	%
1.	Belanja Tidak Langsung	28.672.808.958,10	28.434.304.816,00	238.504.142,10	99,17
2.	Belanja Langsung	454.508.912.062,00	410.883.552.502,86	43.625.359.733,14	90,40
	Jumlah	483.181.721.020,10	439.317.857.318,86	43.863.863.701,24	90,92

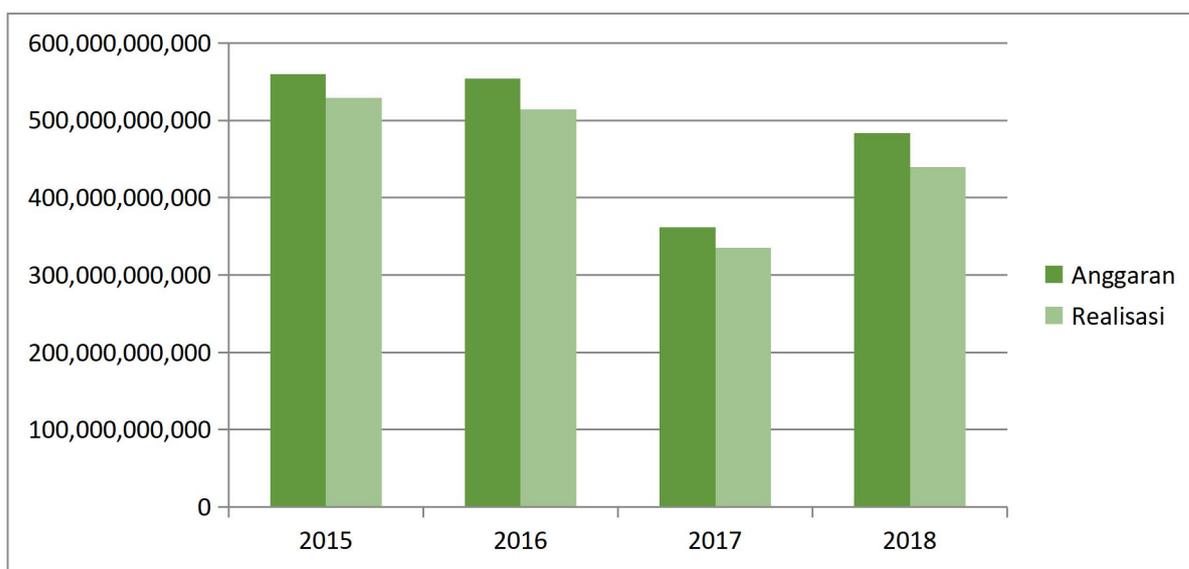
Dari tahun ketahun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD daerah yang dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel Rencana dan Realisasi 2015, 2016, 2017 dan 2018

Tahun Anggaran	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
			Fisik	Keuangan	
				Rp.	%
2015	Belanja Tidak Langsung	37.480.605.967	100	36.493.101.212	97,37
	Belanja Langsung	522.500.980.922	97,53	492.682.424.909	94,29
	Total	559.981.586.909	97,66	529.175.526.121	94,49
2016	Belanja Tidak Langsung	37.061.878.434	97.19	36.020.421.451	97.19
	Belanja Langsung	517.082.402.944	93.49	478.458.421.866	92.53
	Total	554.144.281.378	95.34	514.478.843.317	92.84
2017	Belanja Tidak Langsung	34.679.823.067	100	34.403.521.642	99,20
	Belanja Langsung	327.278.750.237	96.97	300.920.427.617	91,95

Tahun Anggaran	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
			Fisik	Keuangan	
				Rp.	%
	Total	361.958.573.304	98,51	335.323.949.259	92,64
2018	Belanja Tidak Langsung	28.672.808.958,10	100	28.434.304.816	99,17
	Belanja Langsung	454.508.912.062,00	97,64	410.883.552.502,86	90,40
	Jumlah	483.181.721.020,10	98,82	439.317.857.318,86	90,92

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan pendanaan yang didapat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015, 2016 ,2017 dan 2018 sebagai berikut:



Gambar Diagram Rencana dan Realisasi 2015 s/d 2018

Secara rinci hasil *evaluasi capaian kinerja fisik* terhadap 16 (enam belas) program dinas, diketahui bahwa terdapat 15 (lima belas) program hasil evaluasi capaian kinerja sangat baik dan 1 (satu) program yang berkinerja baik.

Dari hasil *evaluasi capaian kinerja keuangan* terhadap 16 (enam belas) program diatas, diketahui bahwa terdapat 13 (tiga belas) program yang berkinerja sangat baik , 1 (satu) program yang berkinerja baik , 1 (satu) program yang berkinerja cukup dan 1 (satu) program yang berkinerja kurang.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2018 terdapat 16 (enam belas) program terdiri dari 11 (sebelas) program strategis dan 5 program pendukung. *Out put* dan *out come* dari program-program strategis tersebut mempunyai korelasi / keterkaitan langsung dengan indikator kinerja pemerintah Provinsi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Sumber Daya Manusia Organisasi.....	6
1.4 Aspek Strategis Organisasi.....	8
1.5 Isu Strategis.....	10
1.6 Dasar Hukum.....	10
1.7 Sistematika Laporan.....	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	13
2.1 Rencana Strategis.....	18
2.2 Perjanjian Kinerja.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
3.2 Capaian Kinerja Bidang / UPT.....	26
3.3 Perbandingan Kinerja Organisasi.....	84
3.4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	85
3.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	94

3.6 Realisasi Anggaran.....	96
-----------------------------	----

BAB IV PENUTUP.....	121
----------------------------	------------

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Eselon II
2. Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV
3. Penghargaan – penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah selama tahun 2018
4. Print Out Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 dari aplikasi E-Sakip

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jumlah Pegawai Tahun 2018.....	5
Tabel 1. 2 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan tingkat pendidikan.....	5
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	6
Tabel 2. 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam RJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.....	16
Tabel 2. 2 Strategi dan Kebijakan Sasaran 1.....	20
Tabel 2. 3 Strategi dan Kebijakan Sasaran 2.....	20
Tabel 2. 4 Strategi dan Kebijakan Sasaran 3.....	21
Tabel 2. 5 Strategi dan Kebijakan Sasaran 4.....	21
Tabel 2. 6 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	22
Tabel 2. 7 Indikator Perjanjian Kinerja.....	22
Tabel 2. 8 Pagu Anggaran per Program Tahun 2018.....	22
Tabel 3. 1 Klasifikasi Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis Dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018.....	25
Tabel 3. 2 Capaian Target Kinerja Tahun 2018.....	25
Tabel 3. 3 Program yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja.....	28
Tabel 3. 4 Kondisi Jalan Provinsi di Sumatera Barat (Status Desember 2018).....	33
Tabel 3. 5 Kondisi Kemantapan Jalan Nasional.....	48
Tabel 3. 6 Sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan.....	53
Tabel 3. 7 Target dan Capaian Indikator Persentase Air Minum Tahun 2018.....	55
Tabel 3. 8 Program dan Kegiatan Pendukung Cakupan Air Minum Tahun 2018.....	56
Tabel 3. 9 Data Cakupan Air Minum Kabupaten/Kota Tahun 2018.....	56
Tabel 3. 10 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Standar Nasional.....	57
Tabel 3. 11 Indikator Cakupan Sanitasi.....	58
Tabel 3. 12 Data Cakupan Sanitasi Kabupaten/Kota Tahun 2018.....	59

Tabel 3. 13 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Standar Nasional.....	59
Tabel 3. 14 Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan Bidang Penataan Ruang.....	61
Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja.....	62
Tabel 3. 16 Kesesuaian Program RTRW Provinsi dengan Rencana Pembangunan	78
Tabel 3. 17 Capaian Indikator Kinerja Bidang Bina Marga	81
Tabel 3. 18 Capaian Indikator Kinerja Bidang Cipta Karya	83
Tabel 3. 19 Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang	84
Tabel 3. 20 Capaian Indikator Kinerja UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan	86
Tabel 3. 21 Capaian Indikator Kinerja UPTD PIP2B	86
Tabel 3. 22 Perbanding Kinerja Organisasi Tahun Lalu	87
Tabel 3. 23 Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Capaian Renstra	88
Tabel 3. 24 Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Nasional	89
Tabel 3. 25 Realisasi Fisik Program dan Kegiatan Tahun 2018	102
Tabel 3. 26 Realisasi Keuangan Tahun 2018	104
Tabel 3. 27 Kendala Tahun 2018	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018	6
Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Golongan Tahun 2018.....	8
Gambar 3. 1 Pembangunan Jalan Provinsi.....	27
Gambar 3. 2 Target dan Realisasi Per Tahun Jalan Mantap Menurut Renstra Tahun 2016-2021.....	31
Gambar 3. 3 Jembatan Lolong.....	31
Gambar 3. 4 Perbandingan Kemantapan Jalan Nasional dengan Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2015 – 2018	46
Gambar 3. 5 Gedung Kebudayaan sebagai Salah Satu Gedung Strategis.....	51
Gambar 3. 6 Digaram Target dan Capaian Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Tahun 2016 – 2021	62
Gambar 3. 7 Capaian Kinerja Indikator	90
Gambar 3. 8 Persentase Belanja Tahun Anggaran 2018	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah berupaya mewujudkan tujuan nasional dan daerah. Dalam tataran nasional, pemerintah memiliki visi yaitu terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sementara sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat, pemerintah memiliki visi yaitu Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PU dan Penataan Ruang dibentuk pada berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas PU dan Penataan Ruang sendiri memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel perlu menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016. Laporan ini memuat analisis kinerja dan

keuangan program kerja perangkat daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan selama tahun 2018 sebanyak 16 program dan 116 kegiatan.

Dalam penyusunan Lakip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Pembinaan dan fasilitasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lingkup provinsi dan kabupaten/kota
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keciaptakaryaan, Pelaksanaan Jalan serta Bidang Penataan Ruang; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dibentuk susunan organisasi dinas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2. Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Bina Marga
 - 3.1. Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan

- 3.2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 3.3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Bidang Cipta Karya
 - 4.1. Seksi Penyehatan Lingkungan
 - 4.2. Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Negara
 - 4.3. Seksi Air Minum dan Limbah
5. Bidang Penataan Ruang
 - 5.1. Seksi Perencanaan
 - 5.2. Seksi Pembinaan
 - 5.3. Seksi Pengawasan
6. UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan
 - 6.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 6.2. Seksi Pengujian Mutu Konstruksi
 - 6.3. Seksi Pengujian Mutu Lingkungan
7. UPTD PIP2B
 - 7.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 7.2. Seksi Data dan Informasi
 - 7.3. Seksi Pengembangan dan Permukiman
8. UPTD Workshop dan Peralatan
 - 8.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 8.2. Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan
 - 8.3. Seksi Workshop dan Perbekalan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai UPTD yang melaksanakan sebagian tugas teknis di bidang pengujian konstruksi dan lingkungan, PIP2PB dan workshop dan peralatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. dilengkapi juga dengan beberapa kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Secara lengkap bagan struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat terlihat berikut ini.

1.3. Sumber Daya Manusia Organisasi

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh 368 (Tiga ratus enam delapan) orang Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagaimana pada diagram dibawah ini.



Gambar 1. 1
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018, berdasarkan Jenis Kelamin.

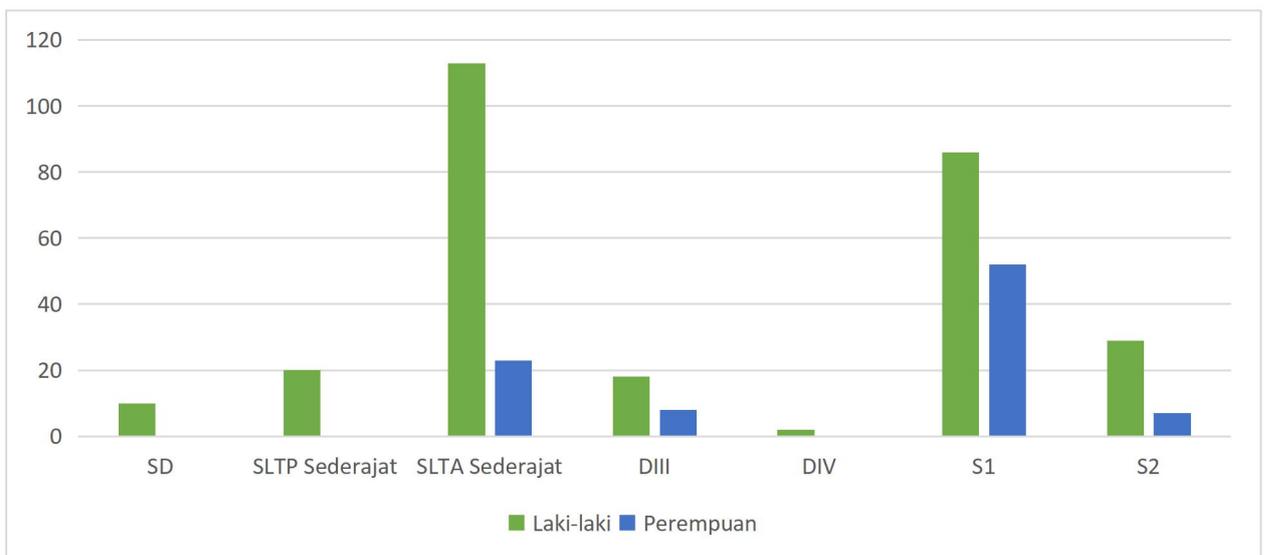
Tabel 1. 2
Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki-laki	274 orang	74,45%
Perempuan	94 orang	25,55%

Tabel 1. 3
Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
SD	10	0	10
SLTP Sederajat	20	0	20

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
SLTA Sederajat	113	23	136
DIII	18	8	26
DIV	2	0	2
S1	86	52	138
S2	29	7	36
Jumlah	278	90	368

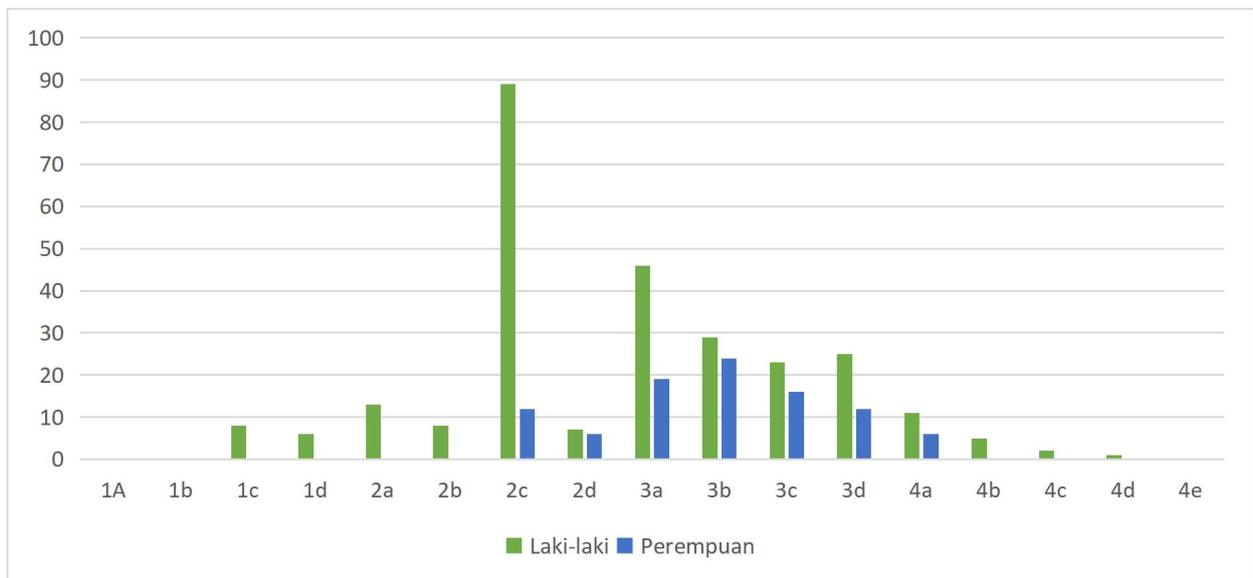


Gambar 1. 2
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018
berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1A	0	0	0
1b	0	0	0
1c	8	0	8
1d	6	0	6
2a	13	0	13
2b	8	0	8
2c	89	12	101

2d	7	6	13
3a	46	19	65
3b	29	24	53
3c	23	16	39
3d	25	12	37
4a	11	6	17
4b	5	0	5
4c	2	0	2
4d	1	0	1
4e	0	0	0



Gambar 1.3
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Golongan Tahun 2018

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat yang kemudian berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat terutama melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, air minum, air limbah, pembangunan gedung atau bangunan negara serta penataan ruang. Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan dapat

memberikan dampak yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dilakukan dengan pembangunan dan peningkatan pada jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir, meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan, serata secara umum meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan. Dengan adanya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Sesuai dengan target nasional dan sebagaimana juga tertera *universal access* terkait prasarana air minum dan sanitasi yaitu 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi yang layak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat juga memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan akan akses air minum dan sanitasi yang layak di Provinsi Sumatera Barat.

Peran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lainnya adalah dalam penyediaan pembangunan gedung negara dalam rangka rekonstruksi bangunan pasca gempa 2009. Selain itu, Dinas PUPR juga berperan dalam pembangunan Main Stadium Sumatera Barat, Gedung Kebudayaan dan Convention Hall.

Penataan Ruang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai daya dukung lingkungan dan berkelanjutan. Pada Tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat melakukan penyusunan rencana tata ruang pada kawasan strategis lingkungan hidup yaitu Danau Maninjau. Selain itu Dinas PUPUR juga melakukan revisi RTRW serta beberapa rencana tata ruang lainnya.

Adapun program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan perwujudan atas misi Gubernur yaitu Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas PUPR tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik semata, namun juga mengurangi kesenjangan antar kawasan, meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan.

1.5. Isu Strategis

Pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat menghadapi tantangan berat untuk terus berbenah menuju infrastruktur yang andal. Hal ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur yang tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk Sumatera Barat.

Adapun upaya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas masih mengalami beberapa permasalahan, yaitu antara lain : (1) masih tingginya panjang jalan yang belum terhubung antar wilayah dan terisolir, (2) kemantapan jalan provinsi sebesar 72,058 % dengan deviasi yang cukup jauh dari kemantapan jalan nasional (89,42 %) sehingga perlu upaya pembangunan dan pemeliharaan agar mencapai setidaknya 75% pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra).

Adapun upaya pemenuhan kebutuhan dasar berupa akses air minum dan sanitasi layak masih mengalami berbagai kendala, yaitu (1) Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat; (2) perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembangunan dan pemeliharaan aset; (3) kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan kriteria pembangunan infrastruktur; (4) terbatasnya ketersediaan dana pembangunan.

Dalam bidang Penataan Ruang, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu (1) Masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan dan belum terbangunnya kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan utama pemanfaatan ruang; (2) rendahnya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang; (3) terbatasnya pedoman acuan pemanfaatan ruang dan upaya memasyarakatkannya.

Pembangunan infrastruktur telah menggerakkan ekonomi riil serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar khususnya di sektor jasa konstruksi. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global. Secara regulasi, hal tersebut telah memiliki payung hukum yang jelas dengan adanya UU Jasa Konstruksi mengenai klasifikasi dan kualifikasi, pelatihan tenaga kerja konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja, registrasi pengalaman profesional, upah tenaga kerja konstruksi, dan pengaturan tenaga kerja konstruksi asing serta tanggung jawab profesi. Dengan demikian, Dinas PUPR perlu mengawasi implementasi Undang-undang tersebut dan terus membina sektor jasa konstruksi agar dapat semakin baik dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang andal.

Selain faktor eksternal tersebut, permasalahan juga harus dihadapi dari sisi internal organisasi. Sesuai dengan Pergub No. 53 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat yang melakukan penggabungan tupoksi keuangan dan program dibawah Subag Keuangan dan Program dirasa terlalu berat dalam mengawasi kedua tupoksi tersebut secara bersamaan. Hal ini diperkuat dengan adanya Permendagri Nomor 106 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota tipe B memiliki sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 subbagian.

1.6. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang;
2. Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 53/2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

1.7. Sistematika Laporan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran dan perjanjian kinerja tahun 2018. Lebih lanjut diuraikan pula mengenai pengukuran kinerja organisasi

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Pada subbab Capaian Kinerja Organisasi disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Sedangkan pada subbab Realisasi Anggaran diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan dimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 adalah :

Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera

Sejalan dengan pencapaian visi tersebut, didukung dengan 5 (lima) misi yakni :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya, berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional,
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi,
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional, global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah,
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Terdapat 10 prioritas pembangunan Sumatera Barat tahun 2016-2021;

1. Pembangunan mental dan pengalaman agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat,
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan investasi
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan

8. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal
9. Pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki peran dalam RPJMD 2016-2021 sebagai berikut :

- Misi 5** : **Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**
- Tujuan 1** : **Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah**
- Sasaran 1** : **Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah**
- Strategi 1** : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan provinsi
2. Meningkatkan kerjasama pembangunan dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah
- Arah Kebijakan** : 1. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan provinsi
2. Rehabilitasi jalan dan jembatan provinsi
3. Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan hubungan dan pengembangan wilayah
4. Penyediaan dukungan untuk pembangunan infrastruktur prioritas dan strategis nasional (dukungan pembangunan jalan tol Padang – Batas Riau dan lain-lain)
- Sasaran 5** : **Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung**
- Strategi** : 1. Membenahi prasarana dan sarana umum di kawasan pemukiman/perumahan dan lingkungan
2. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, lingkungan

- Arah Kebijakan : 1. Pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh.
2. Pengembangan sistem pengelolaan air minum regional, tempat pembuangan akhir regional, dan drainase
3. Peningkatan kualitas dan penataan bangunan dan lingkungan
- Tujuan 2 : **Meningkatkan Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.**
- Sasaran 1 : **Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang**
- Strategi 1. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW
2. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan RTRW sesuai kebutuhan pembangunan dan aturan yang berlaku
- Arah Kebijakan 1. Penyusunan regulasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata ruang.
2. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi
3. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang
4. Peningkatan keterkaitan antar pusat kegiatan sesuai dengan hirarki pengembangan sistim perkotaan

Berdasarkan Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki peran dalam mendukung Misi 5, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Tabel 2. 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam RJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah Meningkatkan	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan provinsi 2. Meningkatkan kerjasama pembangunan dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan provinsi 6. Rehabilitasi jalan dan jembatan provinsi 7. Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan hubungan dan pengembangan wilayah Penyediaan dukungan untuk pembangunan infrastruktur prioritas dan strategis nasional (dukungan pembangunan jalan tol Padang – Batas Riau dan lain-lain)
		Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 3. Membenahi prasarana dan sarana umum di kawasan pemukiman/perumahan dan lingkungan 4. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh. 5. Pengembangan sistem pengelolaan air minum regional, tempat pembuangan akhir regional, dan drainase 6. Peningkatan kualitas dan penataan bangunan dan lingkungan
	Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pemanfaatan ruang 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Penyusunan regulasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	dukung dan daya tampung lingkungan.		<p>sesuai dengan RTRW</p> <p>4. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan RTRW sesuai kebutuhan pembangunan dan aturan yang berlaku</p>	<p>ruang.</p> <p>6. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi</p> <p>7. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang</p> <p>8. Peningkatan keterkaitan antar pusat kegiatan sesuai dengan hirarki pengembangan sistim perkotaan</p>

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan di Bidang Tata Ruang, Prasarana Jalan dan Permukiman lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai, untuk menjalankan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Gubernur Sumatera Barat , yaitu:

Mewujudkan Infrastruktur yang handal, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Infrastruktur yang **handal** dapat diartikan sebagai tingkat kondisi ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang bermutu, menghubungkan antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat dan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan Gubernur yaitu meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Dengan meningkatnya koneksinya antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat melalui prasarana jalan yang handal, maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, infrastruktur yang dimaksud juga mencakup aspek Keciptakarya yang berkualitas yang dapat diterjemahkan melalui penataan bangunan yang kokoh dan sesuai dengan fungsinya, cakupan pelayanan air bersih yang baik, dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan permukiman yang nyaman dan asri. Adapun Penataan Ruang yang berkelanjutan dalam hal ini adalah tersedianya penataan ruang yang dapat dijadikan efisien, berkelanjutan dan konsisten sehingga dapat dijadikan acuan dan rujukan dalam kegiatan pembangunan guna terciptanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antar aspek-aspek pembangunan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan jaringan jalan yang mantap dan berwawasan lingkungan.
2. Mewujudkan penataan bangunan yang aman dan nyaman.
3. Mewujudkan pelayanan penyediaan air minum dan sanitasi

4. Menciptakan penataan ruang yang berkelanjutan

2.1.1. Tujuan

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan tata pemerintahan Dinas PUPR yang baik, bersih, transparan dan akuntabel
- b) Meningkatnya penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah
- c) Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan

2.1.2. Sasaran

- a) Meningkatnya tata kelola organisasi

Adapun tata kelola organisasi Dinas PUPR mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi.

- b) Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah

Salah satu indikator dalam tercapainya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah meningkatnya kemantapan jalan. Kemantapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

- c) Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat

Adapun sarana dan prasarana umum dan aparatur meliputi penyediaan Bangunan Gedung Pemerintah, Rumah Negara dan Bangunan Strategis Lainnya yang aman dan nyaman serta untuk meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi.

- d) Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung.

Tercapainya kinerja penataan ruang yang tinggi seperti yang diatur dalam UU No 9 Tahun 2015 dan UU No. 26 Tahun 2007.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut.

Sasaran 1 Meningkatnya tata kelola organisasi

Untuk meningkatkan tata kelola organisasi dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Strategi dan Kebijakan Sasaran 1

No	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi	Penyampaian dokumen perencanaan (Renstra, RKT, dan Perjanjian Kinerja) dan pelaporan organisasi dengan tepat waktu
		Peningkatan kualitas pelaporan kinerja organisasi
2	Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi	Penyediaan data kepegawaian yang akurat
		Peningkatan layanan administrasi kepegawaian
		Peningkatan pengelolaan sarana prasarana
3	Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan
		Peningkatan kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dengan aturan
4	Meningkatkan pengawasan internal organisasi	Peningkatan tindak lanjut temuan pemeriksaan
		Meningkatnya pejabat ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN

Sasaran 2 Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah

Untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Sasaran 2

No	Strategi	Kebijakan
1	Pengurangan jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir	Pembangunan jalan yang belum terhubung antar daerah terisolir
2	Meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan	Pembangunan jalan menuju daerah wisata dan pelabuhan udara/laut
3	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan	Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan
		Peningkatan jalan

Sasaran 3 Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparaturnya serta pelayanan dasar masyarakat dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Strategi dan Kebijakan Sasaran 3

No	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan penyediaan bangunan gedung pemerintah, rumah negara dan bangunan strategis lainnya yang aman dan nyaman	Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah, rumah negara dan bangunan strategis
		Pemeriksaan laik fungsi oleh tim ahli bangunan gedung (TABG)
		Peningkatan kualitas tenaga teknis
2	Meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi	Pembangunan infrastruktur air minum
		Pembangunan infrastruktur sanitasi

Sasaran 4 Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung

Untuk meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Strategi dan Kebijakan Sasaran 4

No	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan RTR yang berkekuatan hukum	Pengkajian dan penyempurnaan RTRW, RDTR dan PZ
		Penyediaan dikumen RTRW, RDTR dan PZ
		Penyediaan data spasial
2	Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR	Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan pembinaan pemanfaatan ruang
		Peningkatan kuantitas PPNS Tata Ruang

Tabel 2. 6. Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun -						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	BB	BB	A	A	A
		Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	94.5%	95%	96%	97%	97%	98%	98%	98%
2	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	91,13% / 69%	70%	71%	72%	73%	74%	75%	75%
	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	22 unit	5 unit	8 unit	8 unit	3 unit	5 unit	3 unit	54 unit
		Persentase cakupan air minum	68%	70%	72%	75 %	80%	83%	86%	86%
		Persentase cakupan sanitasi	66,84%	72%	73%	75%	78%	79%	80%	80%
3	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	79%	80%	81%	82%	83%	84%	86%	86%

2.2. Perjanjian Kinerja

Tabel 2. 6 Indikator Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan anggaran kas	97
2	Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Persentase Jalan Mantap	72
3	Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintah	3
		Persentase cakupan air minum	75
		Persentase cakupan sanitasi	75
4	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	82

Tabel 2. 7 Pagu Anggaran per Program Tahun 2018

No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.125.016.140	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.986.908.167	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	309.819.200	
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	185.148.000	
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.369.035.000	
6.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	204.488.943.817	
7.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	65.298.230.300	
8.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.982.623.465	
9.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	836.941.000	
10.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provisnis dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	157.341.202.743	
11.	Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	1.463.838.965	
12.	Perencanaan Penataan Ruang	4.929.252.510	
13.	Pengendalian dan Penataan Ruang	479.701.250	
14.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	302.700.755	
15.	Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi	638.335.750	
16.	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kab/Kota	2.771.215.000	
	JUMLAH	454.508.912.062	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat serta menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalannya. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan kategori penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 10
Klasifikasi Penilaian Keberhasilan / Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis Dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	75% - 84%	Baik
3	56% - 74%	Cukup
4	< 55%	kurang

Tabel 3. 2 Capaian Target Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya tata	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100 %

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
	kelola organisasi	Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	97 %	94,28 %	97,19%
2	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	72 %	72,058 %	100,08%
	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	3 unit	3 unit	100 %
		Persentase cakupan air minum	75 %	76,04 %	101,38%
		Persentase cakupan sanitasi	75 %	75,19 %	100,25%
3	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	82 %	84,00 %	102,43%

3.1.1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Adapun nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum ada penilaian dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dari target BB pada Tahun 2018.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%

3.1.2. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan

Adapun realisasi fisik dan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	97,00 %	94,28 %	97,19%

Untuk Realisasi fisik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat mencapai realisasi diatas target yaitu sebesar 97,64% dari target 97%. Sedangkan Realisasi keuangan sebesar 90,92% atau berada dibawah target 95%.

Untuk mencari gabungan realisasi antara fisik dan keuangan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{97,64\% + 90,92\%}{2} = 94,28 \%$$

2

$$\text{Capaian target : } (94,28 : 97,00) \times 100 = 97,19 \%$$

3.1.3. Persentase Jalan Mantap

Persentase jalan mantap merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. Dengan Panjang jalan provinsi sepanjang 1525,200 km, ditargetkan pada akhir tahun 2018 persentase kemantapan jalan provinsi dapat manjadi 72,058 %.



Gambar 3. 1 Pembangunan Jalan Provinsi

Dengan pencapaian atas target sebesar 100,08% tersebut maka **klasifikasi penilaian untuk Persentase Jalan Mantap adalah Sangat Baik.**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan mantap	72%	72,058%	100,08%

Berdasarkan hasil survey IRMS yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Persentase kemantapan jalan provinsi pada Tahun 2018 sebesar 72,058%. Hal ini menunjukkan bahwa telah tercapainya target persentase jalan mantap provinsi ini.

Tabel 3. 3
Program / Kegiatan yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja yang ditetapkan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	FISIK	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
VI	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI	204.488.943.817,00	91,69	181.077.032.125	88,55	23.411.911.692
1	PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	919.816.700,00	100,00	911.343.209	99,08	8.473.491
2	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KOTA PADANG DAN KAB. PESISIR SELATAN	7.760.310.900,00	100,00	7.748.750.850	99,85	11.560.050
3	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK DAN KOTA SOLOK	27.361.349.400,00	100,00	27.352.454.600	99,97	8.894.800
4	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. 50 KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH	10.297.251.700,00	100,00	10.268.177.700	99,72	29.074.000
5	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT	11.463.198.200,00	100,00	11.459.817.350	99,97	3.380.850
6	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA	13.219.999.000,00	100,00	13.218.918.950	99,99	1.080.050
7	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PASAMAN DAN KAB. TANAH DATAR DAN KOTA SAWAHLUNTO	11.742.896.700,00	92,87	10.557.404.479	89,90	1.185.492.221

8	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. AGAM DAN KOTA BUKITTINGGI	25.279.632.000, 00	100,0 0	25.275.414.9 84	99,98	4.217.016
9	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. SOLOK DAN KAB. SOLOK SELATAN	10.825.704.800, 00	100,0 0	10.821.169.8 00	99,96	4.535.000
10	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	4.984.423.800,0 0	100,0 0	4.979.475.00 0	99,90	4.948.800
11	PEMBANGUNAN JEMBATAN DI PROVINSI WILAYAH-I	9.529.042.800,0 0	100,0 0	9.511.768.50 0	99,82	17.274.300
12	PEMBANGUNAN JEMBATAN DI PROVINSI WILAYAH-II	14.127.563.500, 00	86,00	11.191.081.3 00	79,21	2.936.482.2 00
13	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN PROVINSI	821.948.650,00	100,0 0	777.555.185	94,60	44.393.465
14	PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN / JEMBATAN PROVINSI	11.200.000.000, 00	35,39	3.963.882.72 8	35,39	7.236.117.2 72
15	PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS	7.886.767.500,0 0	3,02	238.369.312	3,02	7.648.398.1 88
16	MONITORING DAN PENGAWASAN PERIZINAN UTILITAS UMUM	54.618.800,00	100,0 0	54.179.458	99,20	439.342
17	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI	599.994.800,00	100,0 0	593.555.518	98,93	6.439.282
18	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN PROVINSI	483.169.000,00	100,0 0	480.741.662	99,50	2.427.338
19	PENYUSUNAN DATABASE DAN SURVEY JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI	1.172.052.667,0 0	100,0 0	925.721.196	78,98	246.331.471
20	PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI	6.674.484.000,0 0	100,0 0	6.464.473.16 3	96,85	210.010.837
21	PEMBANGUNAN/PENINGKAT AN JALAN PROVINSI DAK	22.662.000.000, 00	100,0 0	18.878.765.8 61	83,31	3.783.234.1 39
22	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PADANG PARIAMAN DAN KOTA PARIAMAN	5.422.718.900,0 0	100,0 0	5.404.011.32 0	99,66	18.707.580
VII	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	65.298.230.300, 00	97,92	62.760.807.3 56	96,11	2.537.422.9 44
1	REHAB / PEMEL RUTIN JEMBATAN PROVINSI DAN BANGUNAN PELENGKAP JALAN	3.261.727.800,0 0	100,0 0	2.971.851.09 4	91,11	289.876.706
2	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KOTA BUKITTINGGI DAN AGAM TIMUR	3.102.564.000,0 0	100,0 0	3.101.701.20 0	99,97	862.800
3	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. 50 KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH	4.949.178.500,0 0	100,0 0	4.944.719.19 0	99,91	4.459.310

4	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. TANAH DATAR DAN KOTA PADANG PANJANG	3.464.000.000,0 0	100,0 0	3.458.576.41 0	99,84	5.423.590
5	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PADANG PARIAMAN DAN KOTA PADANG	2.373.808.000,0 0	100,0 0	2.346.548.10 0	98,85	27.259.900
6	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. SOLOK DAN KOTA SOLOK	2.986.084.000,0 0	100,0 0	2.984.141.45 0	99,93	1.942.550
7	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB SOLOK SELATAN	2.755.435.000,0 0	100,0 0	2.755.356.16 0	100,0 0	78.840
8	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA	3.074.829.000,0 0	100,0 0	3.074.066.61 2	99,98	762.388
9	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PESISIR SELATAN DAN KEP. MENTAWAI	3.026.260.000,0 0	100,0 0	2.966.017.35 0	98,01	60.242.650
10	PEMELIHARAAN PERALATAN JALAN DAN JEMBATAN	1.200.000.000,0 0	100,0 0	1.160.823.47 1	96,74	39.176.529
11	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. AGAM	2.249.905.000,0 0	100,0 0	2.249.685.54 0	99,99	219.460
12	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PASAMAN	3.177.291.000,0 0	100,0 0	3.165.501.08 9	99,63	11.789.911
13	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PASAMAN BARAT	2.813.732.000,0 0	100,0 0	2.809.913.94 0	99,86	3.818.060
14	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WILAYAH I	9.793.084.300,0 0	100,0 0	9.787.318.60 0	99,94	5.765.700
15	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WILAYAH II	10.857.289.700, 00	100,0 0	10.851.023.4 50	99,94	6.266.250
16	PENGADAAN PERALATAN DAN BAHAN JALAN DAN JEMBATAN	6.213.042.000,0 0	66,67	4.133.563.70 0	66,53	2.079.478.3 00
VIII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	1.982.623.465,0 0	100,0 0	1.967.517.72 8	99,24	15.105.737
1	PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN LABORATORIUM KE BINA MARGAAN	340.022.300,00	100,0 0	337.965.692	99,40	2.056.608
2	PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR DAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN	1.371.757.275,0 0	100,0 0	1.371.569.88 1	99,99	187.394
3	MONITORING PENGENDALIAN MUTU UPTD	270.843.890,00	100,0 0	257.982.155	95,25	12.861.735

Pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat melakukan Kegiatan penyusunan data base dan survey jalan dan jembatan provinsi pekerjaan paket survey IRMS / PRMS dengan sumber dana APBD Provinsi Sumatera

Barat dengan dana sebesar Rp. 320.000.000,- dengan Perjanjian Kontrak No. 620/145/KTR-BM/2018 Tanggal 12 Juli 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 295.240.000,- (92,29 %) yang dikerjakan oleh PT. Riska Engineering Konsultan.

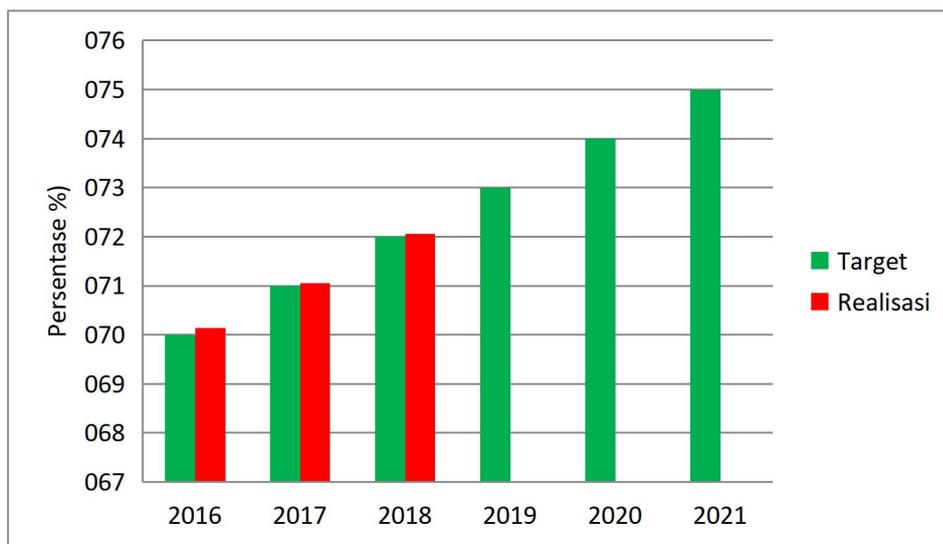
Maksud dan tujuan dari Survey Pembinaan Jalan Provinsi (IRMS) meliputi beberapa kegiatan :

1. Menghimpun data base jalan melalui kegiatan survey – survey dan dilanjutkan tahapan pekerjaan screening data base hasil survey sesuai dengan kaidah IRMS yang digunakan Dirjen Bina Marga kedalam suatu file yang berisi informasi status & fungsi, Peta Kondisi (SDI), Peta Kekasaran (IRI) serta pemograman tahunan, budjeting serta jenis penanganan jalan provinsi.
2. Melakukan pemutakhiran terhadap peta jaringan jalan provinsi Sumatera Barat digital berbasis GIS dengan skala 1 : 250.000 yang menampilkan sebaran jaringan jalan provinsi diseluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan atribut status jalan, kondisi jalan, data lalu lintas (LHR), jenis perkerasan dan panjang ruas, hasil survey pada kegiatn ini.

Informasi penjelasan data sebagai berikut :

- a. Dasar perhitungan kemantapan jalan
 - Dasar perhitungan realisasi kemantapan jalan provinsi
Perbandingan jumlah mantap jalan provinsi dibandingkan dengan total panjang jalan provinsi (km) dikalikan 100 %.
 - Dasar perhitungan realisasi kemantapan jalan nasional
Perbandingan jumlah mantap jalan provinsi dibandingkan dengan total panjang jalan provinsi (km) dikalikan 100 %.
- b. Sumber data
 - Bidang Bina Marga (Survey IRMS / BMS) Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat.
 - Satker P2JN Kementerian PUPR.

Mengacu pada target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indikator Jalan Mantap.



Gambar 3. 2

Target dan Realisasi Per Tahun Jalan Mantap Menurut Renstra Tahun 2016-2021



Gambar 3. 3 Jembatan Lolong

Adapun panjang jalan provinsi dalam kondisi Mantap mengalami peningkatan sepanjang tahun 2018 adalah : peningkatan jalan sepanjang 17,66 km, jalan menuju daerah terisolir sepanjang 15,62 km, jalan menuju daerah wisata sepanjang 6,83 km dan jalan menuju pelabuhan laut dan udara sepanjang 9,20 km.

DATA KEGIATAN PEMBANGUNAN / PENINGKATAN JALAN TAHUN 2018

No	URAIAN	VOLUME	KET
I	TERISOLIR	15,62 km	
a	Paket Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping – Talu DAK (P.096)	7,00 km	
b	Paket Peningkatan Jalan Abai Sangir – Sei.Dareh (P.056.3)	1,10 km	
c	Paket Peningkatan Jalan Provinsi Pangkalan Kapur Sembilan (P.076)	0,50 km	
d	Paket Pembangunan Jalan Kantor Camat/Berkat (P.104)	1,12 km	
e	Paket Pembangunan Jalan Tapus - Muara Sei.Lolo – Gelugur (P.101)	2,58 km	
f	Paket Peningkatan Jalan Surantih – Kayu Aro – Langgai (P.086)	3,33 km	

No	URAIAN	VOLUME	KET
II	WISATA	6,83KM	
a	Paket Peningkatan Jalan Sp.Ganting Payo – Batas Tanah Datar – Sumani (P.092)	3,29 km	
b	Paket Pembangunan Jalan Pasar Baru – Alahan Panjang (P.073) Paket II	1,53 km	
c	Paket Pelebaran Jalan Manggopoh – Padang Luar (P.025) (Dari Bayur menuju Maninjau)	0,72 km	
d	Paket Pembangunan Pasar Baru – Alahan Panjang (P.073) Paket I	1,30 km	

No	URAIAN	VOLUME	KET
III	PELABUHAN LAUT / UDARA	9,20 km	
a	Paket Pembangunan Jalan Teluk Bayur – Nipah – Purus DAK (P.098)	1,95 km	
b	Paket Pembangunan Jalan Bungo Tanjung – Teluk Tapang DAK (P.097)	6,80 km	
c	Paket Pembangunan Jalan Simp.Duku (Ketaping) Pariaman (P.075)	0,45 km	

No	URAIAN	VOLUME	KET
IV	PENINGKATAN JALAN	17,66 km	
a	Paket Peningkatan Jalan Pintu Angin – Labuah Saiyo (P.094)	3,11 Km	
b	Paket Peningkatan Jalan Matur – Palembang (P.080)	1,33 Km	
c	Paket Peningkatan Jalan Palembang – Palupuah (Simp.Patai) (P.081)	1,05 km	
d	Paket Peningkatan Jalan Palupuh – Pua Pagadih - Koto Tinggi (P.090) Paket I	1,03 km	
e	Paket Lanjutan Pembangunan Jalan Padang Koto Gadang - Palembang (P.088)	2,05 km	
f	Paket Peningkatan Jalan Guguk Cino – Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P.038)	0,93 km	
g	Paket Peningkatan Jalan Simp. Baso – Piladang (P.079)	1,05 km	
h	Paket Peningkatan Simp. Koto Baru – Junction (P.012)	2,23 km	
i	Paket Peningkatan Jalan 2 Jalur didepan kantor Bupati Ruas Jalan Tj. Ampalu – Sijunjung (P.008)	0,31 km	
j	Paket Peningkatan Jalan Palupuh – Pua Gadih – Koto Tinggi (P.090)	1,49 km	
k	Paket Peningkatan Jalan Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P.084)	1,60 km	
l	Paket Peningkatan Jalan Simp. Padang Aro – Lubuk Malako (P.056.1)	1,64 km	

Tabel 3. 4 Kondisi Jalan Provinsi di Sumatera Barat (Status Desember 2018)

KONDISI	TAHUN							
	2015		2016		2017		2018	
	(KM) / M'	(%)	(KM) / M'	(%)	(KM) / M'	(KM) / M'	(KM) / M'	(KM) / M'
Mantap	1121,41	91.13	1050.04	70.14	1083.650	71.05	1099,033	72,058
Tidak Mantap	109.21	8.67	475.16	29.86	441.550	28.95	426,167	27,942
Panjang Total	1230,62	100	1525.20	100	1525.200	100	1525,200	100,000

**KONDISI KEMANTAPAN RUAS JALAN PROVINSI TAHUN 2018
REKAPITULASI KONDISI KEMANTAPAN JALAN STATUS TAHUN 2018
KONDISI UMUM KEMANTAPAN JALAN BERDASARKAN NILAI IRI**

Kondisi Perkerasan Badan Jalan

NAMA PROPINSI	PERKERASAN BADAN JALAN				PANJANG (SK)
	ASPAL	TEFLOID /KERIKIL	TANAH	BETON	
SUMATERA BARAT	1139,838	9,300	358,592	17,470	1525,200

Dengan Detail Data Kondisi Perkerasan Badan Jalan sebagai berikut :

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PERKERASAN BADAN JALAN				PANJANG (SK)
			ASPAL	TEFLOID /KERIKIL	TANAH	BETON	
1	13.007	SIMANCUNG - TANJUNG AMPALU	11,080	0,000	0,000	0,000	11,080

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PERKERASAN BADAN JALAN				PANJANG (SK)
			ASPAL	TEFLOID/ KERIKIL	TANAH	BETON	
2	13.008	TANJUNG AMPALU - SIJUNJUNG	20,000	0,000	0,000	0,000	20,000
3	13.010	SIMP.SIKABAU - SIMP.KOTO BARU	29,000	0,000	0,000	0,000	29,000
4	13.011	SIMP.KOTO BARU - TANJUNG SIMALIDU	11,900	0,000	0,000	0,000	11,900
5	13.012	SIMP.KOTO BARU - JUNCTION	5,400	0,000	0,000	0,000	5,400
6	013.018	INDRAPURA - MUARA SAKAI	7,300	0,000	0,000	0,000	7,300
7	06.025	MANGGOPOH - PADANG LUAR	69,430	0,000	0,000	0,000	69,430
8	06.028	SICINCIN - KURAITAJI	16,440	0,000	0,000	0,000	16,440
9	013.031	PANTI - SIMPANG EMPAT	74,230	0,000	0,000	0,000	74,230
10	06.033	SIMP. EMPAT - SASAK	20,000	0,000	0,000	0,000	20,000
11	06.034.2	AIR BALAM - AIR BANGIS	12,600	0,000	0,000	0,000	12,600
12	06.035	KUBU KERAMBIL - BATUSANGKAR	18,500	0,000	0,000	0,000	18,500
13	06.036	BASO - BTS BATUSANGKAR (BALAI SELASA)	28,790	0,000	0,000	0,000	28,790
14	06.037	BTS BATUSANGKAR (BUKIT GOMBAK) - GUGUK CINO	10,400	0,000	0,000	0,000	10,400
15	06.038.2	GUGUK CINO - SAWAHLUNTO (LAPANGAN SEGITIGA)	29,500	0,000	0,000	1,100	30,600
16	06.039	GUGUK CINO - SITANGKAI	15,120	0,000	0,000	0,000	15,120
17	06.040	SITANGKAI - TANJUNG AMPALU	17,280	0,000	0,000	0,000	17,280
18	06.044	BTS KOTA PAYAKUMBUH - SITANGKAI	50,610	0,000	0,000	0,000	50,610
19	06.054	JUNCTION - ABAISIAT	12,600	0,000	0,000	0,000	12,600
20	06.055	SIJUNJUNG - TANAH BADANTUNG	4,400	0,000	0,000	0,000	4,400
21	06.056.1	SIMP.PADANG ARO -LUBUK MALAKO	18,000	0,000	0,000	2,000	20,000
22	06.056.2	LUBUK MALAKO - ABAI SANGIR	17,000	0,000	0,000	0,000	17,000
23	06.056.3	ABAI SANGIR - SEI DAREH	16,965	0,000	56,595	0,440	74,000
24	06.068	PADANGSAWAH - KUMPULAN	35,500	1,000	0,000	0,000	36,500
25	06.069.2	BATAS PAYAKUMBUH - SULIKI - KOTO TINGGI	46,850	0,000	0,000	0,000	46,850
26	06.070	BATUSANGKAR - OMBILIN	18,510	0,000	0,000	0,000	18,510
27	06.071	SOLOK- ALAHAN PANJANG	47,800	0,000	0,000	0,000	47,800
28	06.072	LUBUK BASUNG - SUNGAI LIMAU	30,900	0,000	0,000	0,000	30,900

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PERKERASAN BADAN JALAN				PANJANG (SK)
			ASPAL	TEFLOID/ KERIKIL	TANAH	BETON	
29	06.073	PASAR BARU - ALAHAN PANJANG	27,965	0,000	21,435	0,000	49,400
30	06.075	SIMP DUKU (KETAPING) - PARIAMAN	20,020	0,000	0,480	0,000	20,500
31	06.076	PANGKALAN KT.BARU- SIALANG - GELUGUR	53,344	0,000	20,606	0,000	73,950
32	06.078	SIMP.KOTO MAMBANG - BALINGKA	39,150	0,000	0,000	0,25	39,400
33	06.079	SIMP BASO - PILADANG	11,140	0,000	0,000	0,000	11,140
34	06.080	MATUR - PALEMBAYAN	20,600	0,000	0,000	0,100	20,700
35	06.081	PALEMBAYAN - PALUPUH (SIMP.PATAI)	13,300	0,000	0,000	0,000	13,300
36	06.082	ALAHAN PANJANG - KILIRAN JAO	18,508	0,000	53,612	0,780	72,900
37	06.083	TELUK KABUNG - MANDEH - TARUSAN	31,112	0,000	12,988	0,000	44,100
38	06.084	JL. LINGKAR SELATAN (PAYAKUMBUH)	14,170	0,000	0,000	0,000	14,170
39	06.085	SIMPANG PADANG KARAMBIA - TJ. BUNGO (TPA REGIONAL)	0,000	0,000	0,000	2,050	2,050
40	06.086	SURANTIAH - KAYU ARO - LANGGAI	9,700	0,000	17,360	0,640	27,700
41	06.087	DUKU - SICINCIN	0,300	0,000	28,350	0,000	28,650
42	06.088	PADANG KOTO GADANG - PALEMBAYAN	31,000	0,000	0,000	0,000	31,000
43	06.089	JL. BALINGKA - TEROWONGAN - NGARAI SIANOK	0,000	0,000	9,700	0,000	9,700
44	06.090	PALUPUAH - PUA GADIH - KOTO TINGGI	14,147	0,000	9,343	1,510	25,000
45	06.091	SIMPANG NAPAL - BUKIT BUAL - TANJUNG AMPALU	1,067	0,000	21,633	0,300	23,000
46	06.092	SP. GANTING PAYO - BATAS TANAH DATAR - SUMANI	28,400	0,000	0,000	0,000	28,400
47	06.093	SINGKARAK - ARIPAN - TJ. BALIT - PADANG GANTING	28,300	0,000	0,000	1,700	30,000
48	06.094	PINTU ANGIN - LUBUAK SAIYO	4,035	0,000	1,465	0,000	5,500
49	06.095	RAO - ROKAN (BATAS RIAU)	33,000	0,000	0,000	0,000	33,000
50	06.096	LUBUK SIKAPING - TALU	16,800	0,000	11,200	0,000	28,000
51	06.097	BUNGO TANJUNG - TELUK TAPANG	1,363	2,000	39,837	0,000	43,200
52	06.098	TELUK BAYUR - NIPAH - PURUS	9,408	0,000	2,592	0,000	12,000
53	06.099	PURUS - BANDARA INTERNASIONAL MINANG KABAU	0,000	0,000	16,000	0,000	16,000

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PERKERASAN BADAN JALAN				PANJANG (SK)
			ASPAL	TEFLOID/ KERIKIL	TANAH	BETON	
54	06.100	BATU BATEMBAK - PELABUHAN PANASAHAN	1,200	0,000	0,000	0,000	1,200
55	06.101	TAPUS - MUARO SEI. LOLO - GELUGUR	11,867	6,300	28,833	0,000	47,000
56	06.102	RAWANG - TALAWI	3,837	0,000	1,663	0,500	6,000
57	06.103	SIMPANG SP II - KANTOR CAMAT	0,000	0,000	1,000	4,100	5,100
58	06.104	KANTOR CAMAT - BERKAT	0,000	0,000	3,900	2,000	5,900
TOTAL			1139,84	9,300	358,59	17,47	1525,200

Kondisi Jalan Berdasarkan IRI

NAMA PROPINSI	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI							
	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
SUMATERA BARAT	228,393	14,975	870,640	57,084	179,323	11,757	246,844	16,184

Dengan detail data Kondisi Jalan Berdasarkan IRI sebagai berikut :

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI							
			BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
			(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
1	13.007	SIMANCUNG - TANJUNG AMPALU	2,100	10,695	7,481	78,502	1,499	10,803	0,000	0,000
2	13.008	TANJUNG AMPALU - SIJUNJUNG	4,220	21,100	13,552	67,760	2,028	10,140	0,200	1,000
3	13.010	SIMP.SIKABAU - SIMP.KOTO BARU	2,433	8,390	21,983	75,803	3,884	13,393	0,700	2,414
4	13.011	SIMP.KOTO BARU - TANJUNG SIMALIDU	0,600	5,042	8,846	74,336	1,550	13,025	0,904	7,597
5	13.012	SIMP.KOTO BARU - JUNCTION	0,300	38,556	3,300	41,593	1,800	19,407	0,000	0,444
6	013.018	INDRAPURA - MUARA SAKAI	2,600	2,740	3,154	70,342	0,883	18,699	0,663	8,219

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI							
			BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
			(KM)	%	(KM)		(KM)	%	(KM)	%
7	06.025	MANGGOPOH - PADANG LUAR	10,995	15,836	28,554	41,126	29,881	43,038	0,000	0,000
8	06.028	SICINCIN - KURAITAJI	2,400	14,599	12,012	73,066	2,028	12,336	0,000	0,000
9	013.031	PANTI - SIMPANG EMPAT	3,559	4,795	57,115	76,943	12,201	16,437	1,355	1,825
10	06.033	SIMP. EMPAT - SASAK	1,670	8,350	14,252	71,260	3,889	19,445	0,189	0,945
11	06.034.2	AIR BALAM - AIR BANGIS	0,500	3,968	12,020	95,397	0,080	0,635	0,000	0,000
12	06.035	KUBU KERAMBIL - BATUSANGKAR	1,639	8,859	11,302	61,092	5,559	30,049	0,000	0,000
13	06.036	BASO - BTS BATUSANGKAR (BALAI SELASA)	5,036	17,492	20,998	72,935	2,756	9,573	0,000	0,000
14	06.037	BTS BATUSANGKAR (BUKIT GOMBAK) - GUGUK CINO	4,400	42,308	5,000	48,077	1,000	9,615	0,000	0,000
15	06.038.2	GUGUK CINO - SAWAHLUNTO (LAPANGAN SEGITIGA)	0,000	0,000	22,188	72,510	3,193	10,435	5,219	17,056
16	06.039	GUGUK CINO - SITANGKAI	0,000	0,000	10,097	66,779	5,023	33,221	0,000	0,000
17	06.040	SITANGKAI - TANJUNG AMPALU	6,048	35,000	8,724	50,486	2,400	13,889	0,108	0,625
18	06.044	BTS KOTA PAYAKUMBUH - SITANGKAI	4,439	8,771	36,904	72,918	8,667	17,125	0,600	1,186
19	06.054	JUNCTION - ABAISIAT	2,710	21,508	9,690	76,905	0,200	1,587	0,000	0,000
20	06.055	SIJUNJUNG - TANAH BADANTUNG	0,000	0,000	3,720	84,545	0,680	15,455	0,000	0,000
21	06.056.1	SIMP.PADANG ARO -LUBUK MALAKO	8,700	43,500	8,242	41,210	2,173	10,865	0,885	4,425
22	06.056.2	LUBUK MALAKO - ABAI SANGIR	0,100	0,588	11,910	70,059	3,767	22,159	1,223	7,194
23	06.056.3	ABAI SANGIR - SEI DAREH	3,259	4,404	32,400	43,784	2,300	3,108	36,041	48,704
24	06.068	PADANGSAWAH - KUMPULAN	8,170	22,384	26,431	72,414	0,900	2,466	0,999	2,737
25	06.069.2	BATAS PAYAKUMBUH - SULIKI - KOTO TINGGI	12,171	25,979	27,640	58,997	5,150	10,993	1,889	4,032
26	06.070	BATUSANGKAR - OMBILIN	2,693	14,549	13,824	74,684	1,993	10,767	0,000	0,000
27	06.071	SOLOK- ALAHAN PANJANG	8,521	17,826	31,024	64,904	7,054	14,757	1,201	2,513
28	06.072	LUBUK BASUNG - SUNGAI LIMAU	3,378	10,932	18,870	61,068	8,652	28,000	0,000	0,000
29	06.073	PASAR BARU - ALAHAN PANJANG	1,300	2,632	22,695	45,941	10,986	22,239	14,419	29,188
30	06.075	SIMP DUKU (KETAPING) - PARIAMAN	10,320	50,341	8,298	40,478	1,600	7,805	0,282	1,376
31	06.076	PANGKALAN KT.BARU- SIALANG - GELUGUR	11,431	15,458	58,406	78,980	2,576	3,483	1,537	2,078
32	06.078	SIMP.KOTO MAMBANG - BALINGKA	31,781	80,662	7,619	19,338	0,000	0,000	0,000	0,000
33	06.079	SIMP BASO - PILADANG	0,200	1,795	3,223	28,932	6,628	59,497	1,089	9,776

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI							
			BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
			(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
34	06.080	MATUR - PALEMBAYAN	2,000	9,662	10,700	51,691	5,600	27,053	2,400	11,594
35	06.081	PALEMBAYAN - PALUPUH (SIMP.PATAI)	0,000	0,000	4,000	30,075	0,500	3,759	8,800	66,165
36	06.082	ALAHAN PANJANG - KILIRAN JAO	0,938	1,287	43,300	59,396	4,650	6,379	24,012	32,938
37	06.083	TELUK KABUNG - MANDEH - TARUSAN	16,609	37,662	24,503	55,562	0,000	0,000	2,988	6,776
38	06.084	JL. LINGKAR SELATAN (PAYAKUMBUH)	4,503	31,778	7,563	53,373	2,104	14,848	0,000	0,000
39	06.085	SIMPANG PADANG KARAMBIA - TJ. BUNGO (TPA REGIONAL)	0,000	0,000	2,050	36,585	0,000	43,902	0,000	19,512
40	06.086	SURANTIAH - KAYU ARO - LANGGAI	0,500	1,805	13,500	48,736	1,300	4,693	12,400	44,765
41	06.087	DUKU - SICINCIN	0,000	0,000	10,300	35,951	0,000	0,000	18,350	64,049
42	06.088	PADANG KOTO GADANG - PALEMBAYAN	3,900	12,581	12,600	40,645	5,400	17,419	9,100	29,355
43	06.089	JL. BALINGKA - TEROWONGAN - NGARAI SIANOK	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,700	100,000
44	06.090	PALUPUAH - PUA GADIH - KOTO TINGGI	2,617	10,468	7,600	30,400	4,100	16,400	10,683	42,732
45	06.091	SIMPANG NAPAL - BUKIT BUAL - TANJUNG AMPALU	0,800	3,478	0,304	1,322	0,000	0,000	21,896	95,200
46	06.092	SP. GANTING PAYO - BATAS TANAH DATAR - SUMANI	10,553	37,158	15,547	54,743	1,900	6,690	0,400	1,408
47	06.093	SINGKARAK - ARIPAN - TJ. BALIT - PADANG GANTING	2,000	6,667	21,950	73,167	3,000	10,000	3,050	10,167
48	06.094	PINTU ANGIN - LUBUAK SAIYO	5,100	92,727	0,400	7,273	0,000	0,000	0,000	0,000
49	06.095	RAO - ROKAN (BATAS RIAU)	8,700	26,364	20,800	63,030	2,900	8,788	0,600	1,818
50	06.096	LUBUK SIKAPING - TALU	2,500	8,929	23,900	85,357	0,400	1,429	1,200	4,286
51	06.097	BUNGO TANJUNG - TELUK TAPANG	0,500	1,157	30,863	71,442	0,000	0,000	11,837	27,400
52	06.098	TELUK BAYUR - NIPAH - PURUS	4,100	34,167	3,819	31,825	1,489	12,408	2,592	21,600
53	06.099	PURUS - BANDARA INTERNASIONAL MINANG KABAU	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000	100,000
54	06.100	BATU BATEMBAK - PELABUHAN PANASAHAN	0,000	0,000	1,200	32,917	0,000	33,750	0,000	33,333
55	06.101	TAPUS - MUARO SEI. LOLO - GELUGUR	3,400	7,234	23,867	50,781	2,600	5,532	17,133	36,453
56	06.102	RAWANG - TALAWI	0,000	0,000	4,300	71,667	0,400	6,667	1,300	21,667
57	06.103	SIMPANG SP II - KANTOR CAMAT	0,000	0,000	4,100	80,392	0,000	0,000	1,000	19,608

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI							
			BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
			(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
58	06.104	KANTOR CAMAT - BERKAT	2,000	33,898	2,000	33,898	0,000	0,000	1,900	32,203
TOTAL			228,393	14,975	870,640	57,084	179,323	11,757	246,844	16,184

Kemantapan Jalan

Mantap		Tidak Mantap	
Km	%	Km	%
1099,033	72,058	426,167	27,942

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	KEMANTAPAN JALAN			
			MANTAP		TIDAK MANTAP	
			(KM)	%	(KM)	%
1	13.007	SIMANCUNG - TANJUNG AMPALU	9,581	86,471	1,499	13,529
2	13.008	TANJUNG AMPALU - SIJUNJUNG	17,772	88,860	2,228	11,140
3	13.010	SIMP.SIKABAU - SIMP.KOTO BARU	24,416	84,193	4,584	15,807
4	13.011	SIMP.KOTO BARU - TANJUNG SIMALIDU	9,446	79,378	2,454	20,622
5	13.012	SIMP.KOTO BARU - JUNCTION	3,600	66,667	1,800	33,333
6	013.018	INDRAPURA - MUARA SAKAI	5,754	78,822	1,546	21,178
7	06.025	MANGGOPOH - PADANG LUAR	39,549	56,962	29,881	43,038
8	06.028	SICINCIN - KURAITAJI	14,412	87,664	2,028	12,336
9	013.031	PANTI - SIMPANG EMPAT	60,674	81,738	13,556	18,262
10	06.033	SIMP. EMPAT - SASAK	15,922	79,610	4,078	20,390
11	06.034.2	AIR BALAM - AIR BANGIS	12,520	99,365	0,080	0,635
12	06.035	KUBU KERAMBIL - BATUSANGKAR	12,941	69,951	5,559	30,049
13	06.036	BASO - BTS BATUSANGKAR (BALAI SELASA)	26,034	90,427	2,756	9,573
14	06.037	BTS BATUSANGKAR (BUKIT GOMBAK) - GUGUK CINO	9,400	90,385	1,000	9,615
15	06.038.2	GUGUK CINO - SAWAHLUNTO (LAPANGAN SEGITIGA)	22,188	72,510	8,412	27,490
16	06.039	GUGUK CINO - SITANGKAI	10,097	66,779	5,023	33,221
17	06.040	SITANGKAI - TANJUNG AMPALU	14,772	85,486	2,508	14,514
18	06.044	BTS KOTA PAYAKUMBUH - SITANGKAI	41,343	81,689	9,267	18,311
19	06.054	JUNCTION - ABAISIAT	12,400	98,413	0,200	1,587
20	06.055	SIJUNJUNG - TANAH BADANTUNG	3,720	84,545	0,680	15,455
21	06.056.1	SIMP.PADANG ARO -LUBUK MALAKO	16,942	84,710	3,058	15,290
22	06.056.2	LUBUK MALAKO - ABAI SANGIR	12,010	70,647	4,990	29,353
23	06.056.3	ABAI SANGIR - SEI DAREH	35,659	48,188	38,341	51,812
24	06.068	PADANGSAWAH - KUMPULAN	34,601	94,797	1,899	5,203

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	KEMANTAPAN JALAN			
			MANTAP		TIDAK MANTAP	
			(KM)	%	(KM)	%
25	06.069.2	BATAS PAYAKUMBUH - SULIKI - KOTO TINGGI	39,811	84,975	7,039	15,025
26	06.070	BATUSANGKAR - OMBILIN	16,517	89,233	1,993	10,767
27	06.071	SOLOK- ALAHAN PANJANG	39,545	82,730	8,255	17,270
28	06.072	LUBUK BASUNG - SUNGAI LIMAU	22,248	72,000	8,652	28,000
29	06.073	PASAR BARU - ALAHAN PANJANG	23,995	48,573	25,405	51,427
30	06.075	SIMP DUKU (KETAPING) - PARIAMAN	18,618	90,820	1,882	9,180
31	06.076	PANGKALAN KT.BARU- SIALANG - GELUGUR	69,837	94,438	4,113	5,562
32	06.078	SIMP.KOTO MAMBANG - BALINGKA	39,400	100,000	0,000	0,000
33	06.079	SIMP BASO - PILADANG	3,423	30,727	7,717	69,273
34	06.080	MATUR - PALEMBAYAN	12,700	61,353	8,000	38,647
35	06.081	PALEMBAYAN - PALUPUH (SIMP.PATAI)	4,000	30,075	9,300	69,925
36	06.082	ALAHAN PANJANG - KILIRAN JAO	44,238	60,683	28,662	39,317
37	06.083	TELUK KABUNG - MANDEH - TARUSAN	41,112	93,224	2,988	6,776
38	06.084	JL. LINGKAR SELATAN (PAYAKUMBUH)	12,066	85,152	2,104	14,848
39	06.085	SIMPANG PADANG KARAMBIA - TJ. BUNGO (TPA REGIONAL)	2,050	100,000	0,000	0,000
40	06.086	SURANTIAH - KAYU ARO - LANGGAI	14,000	50,542	13,700	49,458
41	06.087	DUKU - SICINCIN	10,300	35,951	18,350	64,049
42	06.088	PADANG KOTO GADANG - PALEMBAYAN	16,500	53,226	14,500	46,774
43	06.089	JL. BALINGKA - TEROWONGAN - NGARAI SIANOK	0,000	0,000	9,700	100,000
44	06.090	PALUPUAH - PUA GADIH - KOTO TINGGI	10,217	40,868	14,783	59,132
45	06.091	SIMPANG NAPAL - BUKIT BUAL - TANJUNG AMPALU	1,104	4,800	21,896	95,200
46	06.092	SP. GANTING PAYO - BATAS TANAH DATAR - SUMANI	26,100	91,901	2,300	8,099
47	06.093	SINGKARAK - ARIPAN - TJ. BALIT - PADANG GANTING	23,950	79,833	6,050	20,167
48	06.094	PINTU ANGIN - LUBUAK SAIYO	5,500	100,000	0,000	0,000
49	06.095	RAO - ROKAN (BATAS RIAU)	29,500	89,394	3,500	10,606
50	06.096	LUBUK SIKAPING - TALU	26,400	94,286	1,600	5,714
51	06.097	BUNGO TANJUNG - TELUK TAPANG	31,363	72,600	11,837	27,400
52	06.098	TELUK BAYUR - NIPAH - PURUS	7,919	65,992	4,081	34,008
53	06.099	PURUS - BANDARA INTERNASIONAL MINANG KABAU	0,000	0,000	16,000	100,000

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	KEMANTAPAN JALAN			
			MANTAP		TIDAK MANTAP	
			(KM)	%	(KM)	%
54	06.100	BATU BATEMBAK - PELABUHAN PANASAHAN	1,200	100,000	0,000	0,000
55	06.101	TAPUS - MUARO SEI. LOLO - GELUGUR	27,267	58,015	19,733	41,985
56	06.102	RAWANG - TALAWI	4,300	71,667	1,700	28,333
57	06.103	SIMPANG SP II - KANTOR CAMAT	4,100	80,392	1,000	19,608
58	06.104	KANTOR CAMAT - BERKAT	4,000	67,797	1,900	32,203
TOTAL			1099,033	72,058	426,167	27,942

Pada Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

Pada Misi 5 : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tujuan / Sasaran yaitu : Meningkatkan infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap $\leq 72\%$	36	36	100

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai 58 ruas jalan yang tersebar di 19 Kabupaten / Kota, untuk tahun 2018 ini target 36 ruas jalan yang kondisi jalan mantap teralisasi sebanyak 36 ruas jalan dengan kinerja 100 %.

Perbandingan antara 58 ruas jalan dengan kematapan jalan sebesar 72,058 %, sedangkan untuk 36 ruas tersebut kemandapan jalan sebesar 86,491 % dengan indikator jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap $\leq 72\%$.

Kondisi Perkerasan Badan Jalan

NAMA PROPINSI	PERKERASAN BADAN JALAN				PANJANG (SK)
	ASPAL	TEFLOID /KERIKIL	TANAH	BETON	
SUMATERA BARAT	824,584	3,000	87,576	11,200	926,360

Dengan Detail Data Kondisi Perkerasan Badan Jalan sebagai berikut :

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PERKERASAN BADAN JALAN				PANJANG (SK)
			ASPAL	TEFLOID / KERIKIL	TANAH	BETON	
1	13.007	SIMANCUNG - TANJUNG AMPALU	11,080	0,000	0,000	0,000	11,080
2	13.008	TANJUNG AMPALU - SIJUNJUNG	20,000	0,000	0,000	0,000	20,000
3	13.010	SIMP.SIKABAU - SIMP.KOTO BARU	29,000	0,000	0,000	0,000	29,000
4	13.011	SIMP.KOTO BARU - TANJUNG SIMALIDU	11,900	0,000	0,000	0,000	11,900
5	013.018	INDRAPURA - MUARA SAKAI	7,300	0,000	0,000	0,000	7,300
6	06.028	SICINCIN - KURAITAJI	16,440	0,000	0,000	0,000	16,440
7	013.031	PANTI - SIMPANG EMPAT	74,230	0,000	0,000	0,000	74,230
8	06.033	SIMP. EMPAT - SASAK	20,000	0,000	0,000	0,000	20,000
9	06.034.2	AIR BALAM - AIR BANGIS	12,600	0,000	0,000	0,000	12,600
10	06.036	BASO - BTS BATUSANGKAR (BALAI SELASA)	28,790	0,000	0,000	0,000	28,790
11	06.037	BTS BATUSANGKAR (BUKIT GOMBAK) - GUGUK CINO	10,400	0,000	0,000	0,000	10,400
12	06.038.2	GUGUK CINO - SAWAHLUNTO (LAPANGAN SEGITIGA)	29,500	0,000	0,000	1,100	30,600
13	06.040	SITANGKAI - TANJUNG AMPALU	17,280	0,000	0,000	0,000	17,280
14	06.044	BTS KOTA PAYAKUMBUH - SITANGKAI	50,610	0,000	0,000	0,000	50,610
15	06.054	JUNCTION - ABAISIAT	12,600	0,000	0,000	0,000	12,600
16	06.055	SIJUNJUNG - TANAH BADANTUNG	4,400	0,000	0,000	0,000	4,400
17	06.056.1	SIMP.PADANG ARO - LUBUK MALAKO	18,000	0,000	0,000	2,000	20,000
18	06.068	PADANGSAWAH - KUMPULAN	35,500	1,000	0,000	0,000	36,500
19	06.069.2	BATAS PAYAKUMBUH - SULIKI - KOTO TINGGI	46,850	0,000	0,000	0,000	46,850
20	06.070	BATUSANGKAR - OMBILIN	18,510	0,000	0,000	0,000	18,510
21	06.071	SOLOK- ALAHAN PANJANG	47,800	0,000	0,000	0,000	47,800
22	06.072	LUBUK BASUNG - SUNGAI LIMAU	30,900	0,000	0,000	0,000	30,900
23	06.075	SIMP DUKU (KETAPING) - PARIAMAN	20,020	0,000	0,480	0,000	20,500
24	06.076	PANGKALAN KT.BARU- SIALANG - GELUGUR	53,344	0,000	20,606	0,000	73,950
25	06.078	SIMP.KOTO MAMBANG - BALINGKA	39,150	0,000	0,000	0,25	39,400
26	06.083	TELUK KABUNG - MANDEH - TARUSAN	31,112	0,000	12,988	0,000	44,100
27	06.084	JL. LINGKAR SELATAN (PAYAKUMBUH)	14,170	0,000	0,000	0,000	14,170
28	06.085	SIMPANG PADANG KARAMBIA - TJ. BUNGO (TPA REGIONAL)	0,000	0,000	0,000	2,050	2,050
29	06.092	SP. GANTING PAYO - BATAS TANAH DATAR - SUMANI	28,400	0,000	0,000	0,000	28,400
30	06.093	SINGKARAK - ARIPAN - TJ. BALIT - PADANG GANTING	28,300	0,000	0,000	1,700	30,000
31	06.094	PINTU ANGIN - LUBUAK SAIYO	4,035	0,000	1,465	0,000	5,500
32	06.095	RAO - ROKAN (BATAS RIAU)	33,000	0,000	0,000	0,000	33,000
33	06.096	LUBUK SIKAPING - TALU	16,800	0,000	11,200	0,000	28,000
34	06.097	BUNGO TANJUNG - TELUK TAPANG	1,363	2,000	39,837	0,000	43,200
35	06.100	BATU BATEMBAK - PELABUHAN PANASAHAN	1,200	0,000	0,000	0,000	1,200
36	06.103	SIMPANG SP II - KANTOR CAMAT	0,000	0,000	1,000	4,100	5,100
TOTAL			824,58	3,000	87,58	11,20	926,360

Kondisi Jalan Berdasarkan IRI

NAMA PROPINSI	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI							
	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
SUMATERA BARAT	190,345	20,548	610,869	65,943	87,340	9,428	37,806	4,081

Dengan detail data Kondisi Jalan Berdasarkan IRI sebagai berikut :

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI							
			BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
			(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
1	13.007	SIMANCUNG - TANJUNG AMPALU	2,100	10,695	7,481	78,502	1,499	10,803	0,000	0,000
2	13.008	TANJUNG AMPALU - SIJUNJUNG	4,220	21,100	13,552	67,760	2,028	10,140	0,200	1,000
3	13.010	SIMP.SIKABAU - SIMP.KOTO BARU	2,433	8,390	21,983	75,803	3,884	13,393	0,700	2,414
4	13.011	SIMP.KOTO BARU - TANJUNG SIMALIDU	0,600	5,042	8,846	74,336	1,550	13,025	0,904	7,597
5	013.018	INDRAPURA - MUARA SAKAI	2,600	2,740	3,154	70,342	0,883	18,699	0,663	8,219
6	06.028	SICINCIN - KURAITAJI	2,400	14,599	12,012	73,066	2,028	12,336	0,000	0,000
7	013.031	PANTI - SIMPANG EMPAT	3,559	4,795	57,115	76,943	12,201	16,437	1,355	1,825
8	06.033	SIMP. EMPAT - SASAK	1,670	8,350	14,252	71,260	3,889	19,445	0,189	0,945
9	06.034.2	AIR BALAM - AIR BANGIS	0,500	3,968	12,020	95,397	0,080	0,635	0,000	0,000
10	06.036	BASO - BTS BATUSANGKAR (BALAI SELASA)	5,036	17,492	20,998	72,935	2,756	9,573	0,000	0,000
11	06.037	BTS BATUSANGKAR (BUKIT GOMBAK) - GUGUK CINO	4,400	42,308	5,000	48,077	1,000	9,615	0,000	0,000
12	06.038.2	GUGUK CINO - SAWAHLUNTO (LAPANGAN SEGITIGA)	0,000	0,000	22,188	72,510	3,193	10,435	5,219	17,056
13	06.040	SITANGKAI - TANJUNG AMPALU	6,048	35,000	8,724	50,486	2,400	13,889	0,108	0,625
14	06.044	BTS KOTA PAYAKUMBUH - SITANGKAI	4,439	8,771	36,904	72,918	8,667	17,125	0,600	1,186
15	06.054	JUNCTION - ABAISIAT	2,710	21,508	9,690	76,905	0,200	1,587	0,000	0,000
16	06.055	SIJUNJUNG - TANAH BADANTUNG	0,000	0,000	3,720	84,545	0,680	15,455	0,000	0,000
17	06.056.1	SIMP.PADANG ARO - LUBUK MALAKO	8,700	43,500	8,242	41,210	2,173	10,865	0,885	4,425
18	06.068	PADANGSAWAH - KUMPULAN	8,170	22,384	26,431	72,414	0,900	2,466	0,999	2,737
19	06.069.2	BATAS PAYAKUMBUH - SULIKI - KOTO TINGGI	12,171	25,979	27,640	58,997	5,150	10,993	1,889	4,032
20	06.070	BATUSANGKAR - OMBILIN	2,693	14,549	13,824	74,684	1,993	10,767	0,000	0,000
21	06.071	SOLOK - ALAHAN PANJANG	8,521	17,826	31,024	64,904	7,054	14,757	1,201	2,513
22	06.072	LUBUK BASUNG - SUNGAI LIMAU	3,378	10,932	18,870	61,068	8,652	28,000	0,000	0,000
23	06.075	SIMP DUKU (KETAPING) - PARIAMAN	10,320	50,341	8,298	40,478	1,600	7,805	0,282	1,376
24	06.076	PANGKALAN KT.BARU- SIALANG - GELUGUR	11,431	15,458	58,406	78,980	2,576	3,483	1,537	2,078
25	06.078	SIMP.KOTO MAMBANG - BALINGKA	31,781	80,662	7,619	19,338	0,000	0,000	0,000	0,000
26	06.083	TELUK KABUNG - MANDEH - TARUSAN	16,609	37,662	24,503	55,562	0,000	0,000	2,988	6,776
27	06.084	JL. LINGKAR SELATAN (PAYAKUMBUH)	4,503	31,778	7,563	53,373	2,104	14,848	0,000	0,000
28	06.085	SIMPANG PADANG KARAMBIA - TJ. BUNGO (TPA REGIONAL)	0,000	0,000	2,050	36,585	0,000	43,902	0,000	19,512
29	06.092	SP. GANTING PAYO - BATAS TANAH DATAR - SUMANI	10,553	37,158	15,547	54,743	1,900	6,690	0,400	1,408
30	06.093	SINGKARAK - ARIPAN - TJ. BALIT - PADANG GANTING	2,000	6,667	21,950	73,167	3,000	10,000	3,050	10,167
31	06.094	PINTU ANGIN - LUBUAK SAIYO	5,100	92,727	0,400	7,273	0,000	0,000	0,000	0,000
32	06.095	RAO - ROKAN (BATAS RIAU)	8,700	26,364	20,800	63,030	2,900	8,788	0,600	1,818
33	06.096	LUBUK SIKAPING - TALU	2,500	8,929	23,900	85,357	0,400	1,429	1,200	4,286
34	06.097	BUNGO TANJUNG - TELUK TAPANG	0,500	1,157	30,863	71,442	0,000	0,000	11,837	27,400
35	06.100	BATU BATEMBAK - PELABUHAN PANASAHAN	0,000	0,000	1,200	32,917	0,000	33,750	0,000	33,333
36	06.103	SIMPANG SP II - KANTOR CAMAT	0,000	0,000	4,100	80,392	0,000	0,000	1,000	19,608
TOTAL			190,345	20,548	610,869	65,943	87,340	9,428	37,806	4,081

Kemantapan Jalan

NAMA PROPINSI	KEMANTAPAN JALAN			
	MANTAP		TIDAK MANTAP	
	(KM)	%	(KM)	%
SUMATERA BARAT	801,214	86,491	125,146	13,509

Dengan detail data Kondisi Jalan Berdasarkan kemantapan sebagai berikut :

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	KEMANTAPAN JALAN			
			MANTAP		TIDAK MANTAP	
			(KM)	%	(KM)	%
1	13.007	SIMANCUNG - TANJUNG AMPALU	9,581	86,471	1,499	13,529
2	13.008	TANJUNG AMPALU - SIJUNJUNG	17,772	88,860	2,228	11,140
3	13.010	SIMP.SIKABAU - SIMP.KOTO BARU	24,416	84,193	4,584	15,807
4	13.011	SIMP.KOTO BARU - TANJUNG SIMALIDU	9,446	79,378	2,454	20,622
5	013.018	INDRAPURA - MUARA SAKAI	5,754	78,822	1,546	21,178
6	06.028	SICINCIN - KURAITAJI	14,412	87,664	2,028	12,336
7	013.031	PANTI - SIMPANG EMPAT	60,674	81,738	13,556	18,262
8	06.033	SIMP. EMPAT - SASAK	15,922	79,610	4,078	20,390
9	06.034.2	AIR BALAM - AIR BANGIS	12,520	99,365	0,080	0,635
10	06.036	BASO - BTS BATUSANGKAR (BALAI SELASA)	26,034	90,427	2,756	9,573
11	06.037	BTS BATUSANGKAR (BUKIT GOMBAK) - GUGUK CINO	9,400	90,385	1,000	9,615
12	06.038.2	GUGUK CINO - SAWAHLUNTO (LAPANGAN SEGITIGA)	22,188	72,510	8,412	27,490
13	06.040	SITANGKAI - TANJUNG AMPALU	14,772	85,486	2,508	14,514
14	06.044	BTS KOTA PAYAKUMBUH - SITANGKAI	41,343	81,689	9,267	18,311
15	06.054	JUNCTION - ABAISIAT	12,400	98,413	0,200	1,587
16	06.055	SIJUNJUNG - TANAH BADANTUNG	3,720	84,545	0,680	15,455
17	06.056.1	SIMP.PADANG ARO -LUBUK MALAKO	16,942	84,710	3,058	15,290
18	06.068	PADANGSAWAH - KUMPULAN	34,601	94,797	1,899	5,203
19	06.069.2	BATAS PAYAKUMBUH - SULIKI - KOTO TINGGI	39,811	84,975	7,039	15,025
20	06.070	BATUSANGKAR - OMBILIN	16,517	89,233	1,993	10,767
21	06.071	SOLOK - ALAHAN PANJANG	39,545	82,730	8,255	17,270
22	06.072	LUBUK BASUNG - SUNGAI LIMAU	22,248	72,000	8,652	28,000
23	06.075	SIMP DUKU (KETAPING) - PARIAMAN	18,618	90,820	1,882	9,180
24	06.076	PANGKALAN KT.BARU- SIALANG - GELUGUR	69,837	94,438	4,113	5,562
25	06.078	SIMP.KOTO MAMBANG - BALINGKA	39,400	100,000	0,000	0,000
26	06.083	TELUK KABUNG - MANDEH - TARUSAN	41,112	93,224	2,988	6,776
27	06.084	JL. LINGKAR SELATAN (PAYAKUMBUH)	12,066	85,152	2,104	14,848
28	06.085	SIMPANG PADANG KARAMBIA - TJ. BUNGO (TPA REGIONAL)	2,050	100,000	0,000	0,000
29	06.092	SP. GANTING PAYO - BATAS TANAH DATAR - SUMANI	26,100	91,901	2,300	8,099
30	06.093	SINGKARAK - ARIPAN - TJ. BALIT - PADANG GANTING	23,950	79,833	6,050	20,167
31	06.094	PINTU ANGIN - LUBUAK SAIYO	5,500	100,000	0,000	0,000
32	06.095	RAO - ROKAN (BATAS RIAU)	29,500	89,394	3,500	10,606
33	06.096	LUBUK SIKAPING - TALU	26,400	94,286	1,600	5,714
34	06.097	BUNGO TANJUNG - TELUK TAPANG	31,363	72,600	11,837	27,400
35	06.100	BATU BATEMBAK - PELABUHAN PANASAHAN	1,200	100,000	0,000	0,000
36	06.103	SIMPANG SP II - KANTOR CAMAT	4,100	80,392	1,000	19,608
TOTAL			801,214	86,491	125,146	13,509

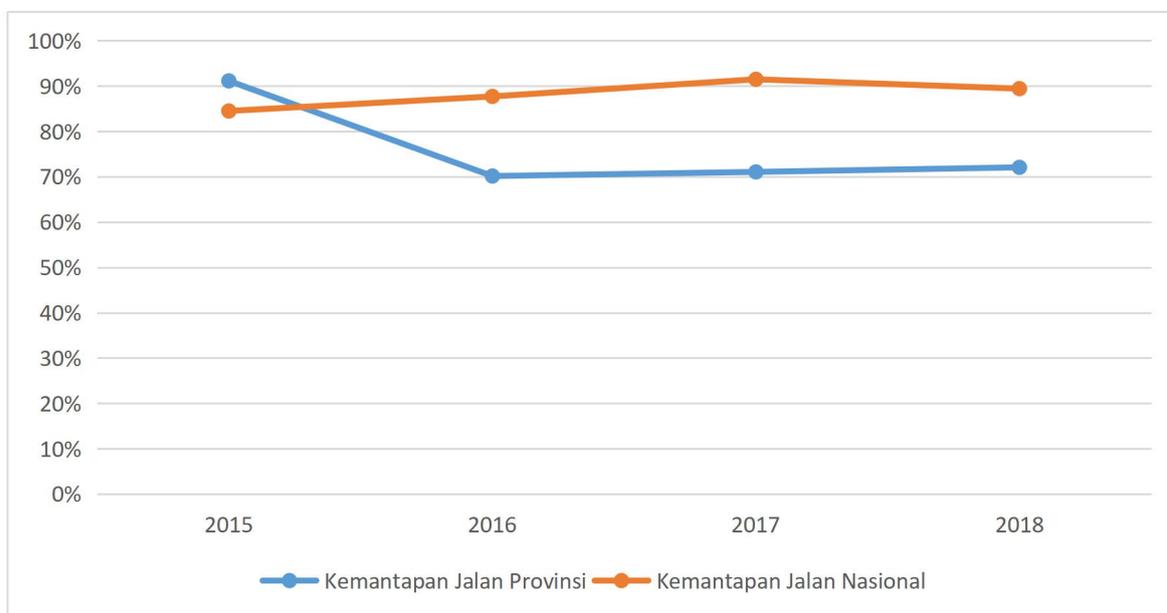
Dibandingkan dengan kondisi jalan nasional kondisi kemantapan jalan provinsi Pada Tahun 2018 berada dibawah kondisi kemantapan jalan nasional. Adapun kondisi kemantapan jalan nasional dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Kondisi Kemantapan Jalan Nasional

KONDISI	TAHUN							
	2015		2016		2017		2018	
	(KM) / M'	(%)	(KM) / M'	(%)	(KM) / M'	(KM) / M'	(KM) / M'	(KM) / M'
Mantap	1224.09	84.49	1270.60	87.70	1325.34	91.48	1295,48	89,42
Tidak Mantap	224.72	15.51	178.21	12.30	123.47	8.52	153,33	10,58
Panjang Total	1448.81	100	1448.81	100	1448.81	100	1448.81	100,00

Sumber data dari Balai Jalan Nasional III

Berikut diagram yang menunjukkan perbandingan antara kemantapan jalan nasional dengan kemantapan jalan provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2015 – 2018.



Gambar 3. 4
Perbandingan Kemantapan Jalan Nasional dengan Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2015 - 2018

Perbandingan antara Kemantapan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat sebesar 89,42 % dibandingkan dengan Kemantapan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu sebesar 91,67% terdapat selisih 2,25 %.

Kondisi Jalan Nasional berdasarkan IRI tahun 2018

Sumatera Barat			06								
NO	NO RUAS	NAMA JALAN	LENGTH (KM)	BAIK (0-4)		SEDANG (4-8)		RUSAK RINGAN (8-12)		RUSAK BERAT (>12)	
				(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)
			1449	774	0,53	522	0,36	121	0,08	32,4	0,02
1	001	RANJAU BATU (BTS. PROV.	037	024	066	013	034	000	000	000	000
2	002	PANTI - BTS. KOTA LUBUK	028	023	083	005	017	000	000	000	000
3	002.11.K	LUBUK SIKAPING BY PASS	007	006	080	001	020	000	000	000	000
4	003	BTS. KOTA LUBUK SIKAPING -	021	014	069	006	031	000	000	000	000
5	004	SP. KUMPULAN - BTS. KOTA	047	023	050	023	049	001	001	000	000
6	004.11.K	BUKIT TINGGI BYPASS I (SP.	003	003	096	000	004	000	000	000	000
7	005	BTS. KOTA BUKITTINGGI - SP.	002	002	083	000	017	000	000	000	000
8	005.11.K	BUKIT TINGGI BYPASS II (JLN.	004	003	068	001	032	000	000	000	000
9	005.12.K	JLN. SUDIRMAN (B. TINGGI)	001	001	092	000	008	000	000	000	000
10	005.13.K	SP. AUR KUNING - SP. TALUK	001	001	076	000	024	000	000	000	000
11	005.14.K	SP. TALUK - SP. JAMBU AIR	001	001	082	000	018	000	000	000	000
12	006	SP. PADANG LUAR - BTS.	013	010	078	003	021	000	001	000	000
13	006.11.K	JLN. PROF. HAMKA (PADANG	001	001	050	001	050	000	000	000	000
14	006.12.K	JLN. M. DAUD RASIDI	001	000	025	001	075	000	000	000	000
15	006.13.K	JLN. KOMARULLAH (PADANG	001	000	000	001	100	000	000	000	000
16	007	BTS. KOTA PADANG PANJANG	005	003	071	001	029	000	000	000	000
17	007.11.K	JLN. HAMKA - BUKIT	000	000	100	000	000	000	000	000	000
18	007.12.K	JLN. BUKIT SURUNGAN -	001	001	057	001	043	000	000	000	000
19	007.13.K	JLN. PASAR TERNAK	001	001	086	000	014	000	000	000	000
20	007.14.K	JLN. BKIA - SOLOK BATUNG	001	001	088	000	012	000	000	000	000
21	007.15.K	JLN. SOLOK BATUNG -	001	001	050	001	036	000	014	000	000
22	008	KUBU KERAMBIL - BTS. KAB.	021	010	047	011	051	000	002	000	000
23	009	BTS. KAB. TANAH DATAR -	020	008	042	011	056	001	003	000	000
24	009.11.K	JLN. IMAM BONJOL (SOLOK)	002	001	040	001	060	000	000	000	000
25	009.12.K	JLN. KH. DEWANTORO	001	000	022	001	066	000	011	000	000
26	009.13.K	JLN. A. YANI (SOLOK)	001	000	000	001	100	000	000	000	000
27	009.14.K	JLN. DIPONEGORO (SOLOK)	000	000	057	000	043	000	000	000	000
28	010	BTS. KOTA SOLOK -- BTS	017	007	044	006	035	003	015	001	005
29	011	BTS. KOTA SAWAHLUNTO -	007	002	027	003	044	001	015	001	015

NO	NO RUAS	NAMA JALAN	LENGTH (KM)	BAIK (0-4)		SEDANG (4-8)		RUSAK RINGAN (8-12)		RUSAK BERAT (>12)	
				(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)
			1449	774	0,53	522	0,36	121	0,08	32,4	0,02
30	012	MUARA KALABAN - TANAH	025	007	028	013	051	004	017	001	004
31	013	TANAH BADANTUNG -	052	020	038	024	046	007	014	002	003
32	014	KILIRANJAO - BTS. KAB.	008	002	020	004	050	002	023	001	006
33	015	BTS. KAB. DHAMAS RAYA -	014	003	020	009	066	002	012	000	002
34	016	SEI DAREH - JUNCTION	031	012	038	016	050	003	010	001	002
35	017	JUNCTION (KOTO BARU) -	013	006	047	006	043	001	010	000	001
36	018	BEDENG RAPAT (BTS. PROV.	014	006	040	008	055	001	005	000	000
37	019	SILAPING - SIMP. AIR BALAM	018	005	026	012	065	002	008	000	001
38	020	SIMP. AIR BALAM - SIMP.	063	047	075	012	019	003	005	001	002
39	021	SIMP. EMPAT - PADANG	041	041	099	001	001	000	000	000	000
40	022	PADANG SAWAH -	032	031	097	001	003	000	000	000	000
41	023	MANGGAPOH - BTS. KOTA	040	040	099	001	001	000	000	000	000
42	023.14.K	JLN. SITI MANGGPOH	004	004	097	000	003	000	000	000	000
43	024.14.K	JLN. ZAINI (PARIAMAN)	001	000	038	001	063	000	000	000	000
44	024.15.K	JLN. AHMAD DAHLAN	001	000	016	001	084	000	000	000	000
45	024.16.K	JLN. SOEKARNO - HATTA	002	001	053	001	047	000	000	000	000
46	025	KURAITAJI - LUBUK ALUNG	017	012	071	005	029	000	000	000	000
47	026	LUBUK ALUNG - SIMP. DUKU	013	011	085	002	015	000	000	000	000
48	026.11.K	JLN. ADINEGORO (PADANG)	009	006	067	003	032	000	001	000	000
49	026.12.K	JLN. PROF. DR. HAMKA	004	002	049	002	049	000	002	000	000
50	027.11.K	BANDARA INTERNATIONAL	003	002	086	000	014	000	000	000	000
51	028.11.K	PADANG BYPASS II (BARU)	022	018	081	004	018	000	001	000	000
52	029.11.K	PADANG BYPASS I	005	000	002	005	098	000	000	000	000
53	030.11.K	BUKIT PUTUS - TELUK BAYUR	001	000	000	000	034	001	066	000	000
54	031	BTS. KOTA PADANG - BTS.	049	029	060	019	040	000	000	000	000
55	031.11.K	JLN. BUKIT PUTUS - BTS.	022	008	036	012	055	002	008	000	000
56	031.12.K	JLN. ILYAS YAKUB (PAINAN)	001	000	000	001	090	000	010	000	000
57	031.13.K	JLN. SUTAN SYAHRIR	001	000	000	001	091	000	009	000	000
58	032	BTS. KOTA PAINAN -	053	038	072	013	024	002	003	000	000

NO	NO RUAS	NAMA JALAN	LENGTH (KM)	BAIK (0-4)		SEDANG (4-8)		RUSAK RINGAN (8-12)		RUSAK BERAT (>12)	
				(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)
			1449	774	0,53	522	0,36	121	0,08	32,4	0,02
59	033	KAMBANG - INDRAPURA	058	055	095	003	005	000	000	000	000
60	034	INDRAPURA - TAPAN	024	020	083	004	016	000	001	000	000
61	035	TAPAN - BTS. PROV.	040	013	032	025	062	002	006	000	001
62	036	BTS. PROV. RIAU - BTS. KOTA	073	036	049	035	047	002	003	000	000
63	036.11.K	JLN. SUDIRMAN	001	000	081	000	019	000	000	000	000
64	037	BTS. KOTA PAYAKUMBUH -	015	011	074	004	026	000	000	000	000
65	037.11.K	JLN. SOEKARNO HATTA	004	003	092	000	008	000	000	000	000
66	037.12.K	JLN. DIPONEGORO	006	002	037	004	060	000	002	000	002
67	037.13.K	JLN. K.H. AHMAD DAHLAN	005	002	038	003	055	000	006	000	000
68	038	BASO - BTS. KOTA BUKIT	008	006	084	001	016	000	000	000	000
69	038.11.K	JLN. SOEKARNO HATTA	002	002	077	001	023	000	000	000	000
70	040	BTS. KOTA PADANG PANJANG	019	012	060	008	040	000	000	000	000
71	040.11.K	JLN ST SYAHRIR (PADANG)	004	002	055	002	043	000	002	000	000
72	041	SICINCIN - LUBUK ALUNG	014	013	094	001	006	000	000	000	000
73	042	BTS. KOTA SOLOK - LUBUK	023	003	012	014	061	005	021	001	006
74	042.11.K	JLN. LUBUK SIKARAH	001	000	013	001	074	000	013	000	000
75	042.12.K	JLN. HAMKA (SOLOK)	001	000	027	001	073	000	000	000	000
76	043	LUBUK SELASIH - BTS. KOTA	009	001	015	005	051	002	026	001	009
77	043.11.K	BTS. KOTA PADANG - JLN.	023	005	020	017	071	002	008	000	001
78	044.12.K	JLN. SAWAHLUNTO - MUARA	005	001	014	004	075	001	009	000	002
79	045	KILIRANJAO - BTS. PROV.	023	013	057	008	035	002	007	000	002
80	047.11.K	SOLOK BYPASS (JL. NASIR	003	002	055	001	042	000	003	000	000
81	048	BY PASS PARIAMAN (KOTA	005	001	017	004	083	000	000	000	000
82	049	TAPAN - BTS. JAMBI	025	006	025	016	062	003	011	001	002
83	050	TOAPEJAT - ROKOT	036	010	028	015	041	009	025	002	006
84	051	ROKOT - SIOBAN	021	008	038	005	023	007	033	001	006
85	052	SIOBAN - KATIET	032	031	096	001	002	000	001	000	001
86	053	LUBUK SELASIH - SURIAN	063	003	005	028	045	023	037	009	014
87	054	SURIAN - SP. PADANG ARO	065	009	014	031	048	019	029	005	008
88	055	SP. PADANG ARO - BTS.	034	004	012	019	054	008	024	003	009

.....

Sumatera Barat											
NO	NO RUAS	NAMA JALAN	LENGTH (KM)	MANTAP (0-8)		TIDAK MANTAP (>8)		UNPAVED / RUSAK PARAH / NO DATA			
				(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)
			1449	1295,48	0,89	153,33	0,11	0	0		
1	001	RANJAU BATU (BTS. PROV.	037	037	100	000	000	000	000	000	000
2	002	PANTI - BTS. KOTA LUBUK	028	028	100	000	000	000	000	000	
3	002.11.K	LUBUK SIKAPING BY PASS	007	007	100	000	000	000	000	000	
4	003	BTS. KOTA LUBUK SIKAPING -	021	021	100	000	000	000	000	000	
5	004	SP. KUMPULAN - BTS. KOTA	047	046	099	001	001	000	000	000	
6	004.11.K	BUKIT TINGGI BYPASS I (SP.	003	003	100	000	000	000	000	000	
7	005	BTS. KOTA BUKITTINGGI - SP.	002	002	100	000	000	000	000	000	
8	005.11.K	BUKIT TINGGI BYPASS II (JLN.	004	004	100	000	000	000	000	000	
9	005.12.K	JLN. SUDIRMAN (B. TINGGI)	001	001	100	000	000	000	000	000	
10	005.13.K	SP. AUR KUNING - SP. TALUK	001	001	100	000	000	000	000	000	
11	005.14.K	SP. TALUK - SP. JAMBU AIR	001	001	100	000	000	000	000	000	
12	006	SP. PADANG LUAR - BTS.	013	013	099	001	001	000	000	000	
13	006.11.K	JLN. PROF. HAMKA (PADANG	001	001	100	000	000	000	000	000	
14	006.12.K	JLN. M. DAUD RASIDI	001	001	100	000	000	000	000	000	
15	006.13.K	JLN. KOMARULLAH (PADANG	001	001	100	000	000	000	000	000	
16	007	BTS. KOTA PADANG PANJANG	005	005	100	000	000	000	000	000	
17	007.11.K	JLN. HAMKA - BUKIT	000	000	100	000	000	000	000	000	
18	007.12.K	JLN. BUKIT SURUNGAN -	001	001	100	000	000	000	000	000	
19	007.13.K	JLN. PASAR TERNAK	001	001	100	000	000	000	000	000	
20	007.14.K	JLN. BKIA - SOLOK BATUNG	001	001	100	000	000	000	000	000	
21	007.15.K	JLN. SOLOK BATUNG -	001	001	086	000	014	000	000	000	
22	008	KUBU KERAMBIL - BTS. KAB.	021	020	098	000	002	000	000	000	
23	009	BTS. KAB. TANAH DATAR -	020	019	097	001	003	000	000	000	
24	009.11.K	JLN. IMAM BONJOL (SOLOK)	002	002	100	000	000	000	000	000	
25	009.12.K	JLN. KH. DEWANTORO	001	001	089	000	011	000	000	000	
26	009.13.K	JLN. A. YANI (SOLOK)	001	001	100	000	000	000	000	000	
27	009.14.K	JLN. DIPONEGORO (SOLOK)	000	000	100	000	000	000	000	000	
28	010	BTS KOTA SOLOK - BTS	017	013	079	004	021	000	000	000	
29	011	BTS. KOTA SAWAHLUNTO -	007	005	070	002	030	000	000	000	

NO	NO RUAS	NAMA JALAN	LENGTH (KM)	MANTAP (0-8)		TIDAK MANTAP (>8)		UNPAVED / RUSAK PARAH / NO DATA	
				(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)
			1449	1295,48	0,89	153,33	0,11	0	0
30	012	MUARA KALABAN - TANAH	025	020	080	005	020	000	000
31	013	TANAH BADANTUNG -	052	043	083	009	017	000	000
32	014	KILIRANJAO - BTS. KAB.	008	006	071	002	029	000	000
33	015	BTS. KAB. DHAMAS RAYA -	014	012	086	002	014	000	000
34	016	SEI DAREH - JUNCTION	031	027	087	004	013	000	000
35	017	JUNCTION (KOTO BARU) -	013	012	090	001	011	000	000
36	018	BEDENG RAPAT (BTS. PROV.	014	013	095	001	005	000	000
37	019	SILAPING - SIMP. AIR BALAM	018	016	090	002	010	000	000
38	020	SIMP. AIR BALAM - SIMP.	063	059	094	004	006	000	000
39	021	SIMP. EMPAT - PADANG	041	041	100	000	000	000	000
40	022	PADANG SAWAH -	032	032	100	000	000	000	000
41	023	MANGGAPOH - BTS. KOTA	040	040	100	000	000	000	000
42	023.14.K	JLN. SITI MANGGPOH	004	004	100	000	000	000	000
43	024.14.K	JLN. ZAINI (PARIAMAN)	001	001	100	000	000	000	000
44	024.15.K	JLN. AHMAD DAHLAN	001	001	100	000	000	000	000
45	024.16.K	JLN. SOEKARNO - HATTA	002	002	100	000	000	000	000
46	025	KURAITAJI - LUBUK ALUNG	017	017	100	000	000	000	000
47	026	LUBUK ALUNG - SIMP. DUKU	013	013	100	000	000	000	000
48	026.11.K	JLN. ADINEGORO (PADANG)	009	009	099	000	001	000	000
49	026.12.K	JLN. PROF. DR. HAMKA	004	004	098	000	002	000	000
50	027.11.K	BANDARA INTERNATIONAL	003	003	100	000	000	000	000
51	028.11.K	PADANG BYPASS II (BARU)	022	022	099	000	001	000	000
52	029.11.K	PADANG BYPASS I	005	005	100	000	000	000	000
53	030.11.K	BUKIT PUTUS - TELUK BAYUR	001	000	034	001	066	000	000
54	031	BTS. KOTA PADANG - BTS.	049	049	100	000	000	000	000
55	031.11.K	JLN. BUKIT PUTUS - BTS.	022	021	092	000	008	000	000
56	031.12.K	JLN. ILYAS YAKUB (PAINAN)	001	001	090	000	010	000	000
57	031.13.K	JLN. SUTAN SYAHRIR	001	001	091	000	009	000	000
58	032	BTS. KOTA PAINAN -	053	051	096	002	004	000	000

NO	NO RUAS	NAMA JALAN	LENGTH (KM)	MANTAP (0-8)		TIDAK MANTAP (>8)		UNPAVED / RUSAK PARAH / NO DATA	
				(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)
			1449	1295,48	0,89	153,33	0,11	0	0
59	033	KAMBANG - INDRAPURA	058	058	100	000	000	000	000
60	034	INDRAPURA - TAPAN	024	024	099	000	001	000	000
61	035	TAPAN - BTS. PROV.	040	037	094	003	006	000	000
62	036	BTS. PROV. RIAU - BTS. KOTA	073	071	097	002	003	000	000
63	036.11.K	JLN. SUDIRMAN	001	001	100	000	000	000	000
64	037	BTS. KOTA PAYAKUMBUH -	015	015	100	000	000	000	000
65	037.11.K	JLN. SOEKARNO HATTA	004	004	100	000	000	000	000
66	037.12.K	JLN. DIPONEGORO	006	006	097	000	003	000	000
67	037.13.K	JLN. K.H. AHMAD DAHLAN	005	005	094	000	006	000	000
68	038	BASO - BTS. KOTA BUKIT	008	008	100	000	000	000	000
69	038.11.K	JLN. SOEKARNO HATTA	002	002	100	000	000	000	000
70	040	BTS. KOTA PADANG PANJANG	019	019	100	000	000	000	000
71	040.11.K	JLN ST SYAHRIR ((PADANG	004	004	098	000	002	000	000
72	041	SICINCIN - LUBUK ALUNG	014	014	100	000	000	000	000
73	042	BTS. KOTA SOLOK - LUBUK	023	017	073	006	027	000	000
74	042.11.K	JLN. LUBUK SIKARAH	001	001	087	000	013	000	000
75	042.12.K	JLN. HAMKA (SOLOK)	001	001	100	000	000	000	000
76	043	LUBUK SELASIH - BTS. KOTA	009	006	065	003	035	000	000
77	043.11.K	BTS. KOTA PADANG - JLN.	023	021	091	002	009	000	000
78	044.12.K	JLN. SAWAHLUNTO - MUARA	005	005	089	001	011	000	000
79	045	KILIRANJAO - BTS. PROV.	023	021	091	002	009	000	000
80	047.11.K	SOLOK BYPASS (JL. NASIR	003	003	097	000	003	000	000
81	048	BY PASS PARIAMAN (KOTA	005	005	100	000	000	000	000
82	049	TAPAN - BTS. JAMBI	025	022	087	003	013	000	000
83	050	TOAPEJAT - ROKOT	036	025	069	011	031	000	000
84	051	ROKOT - SIOBAN	021	013	061	008	039	000	000
85	052	SIOBAN - KATIET	032	032	098	001	002	000	000
86	053	LUBUK SELASIH - SURIAN	063	031	050	032	051	000	000
87	054	SURIAN - SP. PADANG ARO	065	041	062	025	038	000	000
88	055	SP. PADANG ARO - BTS.	034	023	066	012	034	000	000

3.1.4. Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan

Sesuai dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2018 ditargetkan telah tersedianya sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan sebanyak 8 unit. Sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan yang dimaksud terbagi atas Bangunan Strategis, Gedung Negara, Rumah Negara dan Shelter.

Adapun indikator Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan didefinisikan sebagai **sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan yang telah selesai dibangun dan siap ditempati pada Tahun 2018** Sedangkan bangunan yang masih sedang dalam proses pembangunan tidak dihitung sebagai indikator pada sasaran ini.

Indikator Kinerja menurut Rencana Strategis (Renstra)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	8 unit	5 unit	62,50 %

Adapun 8 unit sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan yang ditargetkan selesai pada Akhir 2018 adalah :

Renstra 2018	Realisasi 2018
Rehabilitasi 2 (dua) unit Gedung KONI	Selesai
Pembangunan Gedung Pemberdayaan Perempuan dan KB	Selesai
Pembangunan Gedung Convention Hall	Selesai
Pembangunan Gedung Inflasi	Selesai
Pembangunan Garase Rumah Dinas Gubernur	Belum selesai di berlakukan denda 50 hari
Pembangunan Gedung Bundo Kandung	Dianggarkan 2019
Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami	Dianggarkan 2019

PERJANJIAN KINERJA 2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	3 unit	3 unit	100 %



Gambar 3. 5 Gedung Kebudayaan sebagai Salah Satu Gedung Strategis

Berdasarkan target kinerja pada tahun 2018 dalam pembangunan sarana dan prasarana penunjang tata pemerintah tersebut ada 3 (tiga) gedung dan dapat diselesaikan pada tahun 2018 yaitu Gedung Pemberdayaan Perempuan dan KB, Gedung Convention Hall, Gedung Inflasi. Dengan capaian 3 unit dari 3 unit target tersebut capaian indikator **Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan** sebesar 100 % atau dapat diklasifikasikan dengan sangat baik.

Program / Kegiatan yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja yang ditetapkan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	FISIK	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.341.202.743,00	92,58	143.245.064.585	91,04	14.096.138.158
1.	PEMBANGUNAN STADIUM UTAMA SUMATERA BARAT (LANJUTAN)	96.469.877.143,00	99,11	89.528.482.055	92,80	6.941.395.088
2.	PEMBANGUNAN GEDUNG KEBUDAYAAN SUMATERA BARAT (LANJUTAN)	34.764.471.000,00	100,00	31.089.253.100	89,43	3.675.217.900
3.	PEMBANGUNAN GEDUNG UTAMA KANTOR GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT	378.610.000,00	100,00	358.823.110	94,77	19.786.890
4.	PEMBANGUNAN GEDUNG CONVENTION HALL SUMATERA BARAT (LANJUTAN)	10.234.000.000,00	95,01	8.782.841.670	85,82	1.451.158.330
5.	PEMBANGUNAN GEDUNG BUNDO KANDUANG PROVINSI SUMATERA BARAT	993.140.500,00	100,00	978.188.650	98,49	14.951.850
6.	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN TEKNIS (TPT) BANGUNAN NEGARA DI SUMATERA BARAT	97.726.000,00	100,00	81.182.186	83,07	16.543.814
7.	PENYELENGGARAAN HARI PERS NASIONAL	290.182.700,00	100,00	272.190.730	93,80	17.991.970
8.	REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA	2.053.616.600,00	100,00	1.869.771.250	91,05	183.845.350
9.	PEMBANGUNAN GEDUNG PENGENDALIAN INFLASI PROVINSI SUMATERA BARAT	3.498.769.300,00	100,00	3.480.645.920	99,48	18.123.380
10.	PENAMBAHAN GARASE RUMAH DINAS GUBERNUR	748.110.500,00	100,00	646.880.415	86,47	101.230.085
11.	PEMBANGUNAN TAMAN WISATA KELOK SEMBILAN	1.161.820.000,00	-	172.092.000	14,81	989.728.000
12.	PENDAMPINGAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI SUMATERA BARAT	135.526.800,00	100,00	133.700.550	98,65	1.826.250
13.	PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSULTASI TEKNIS DAN ADVOKASI SERTA TERSEDINYA DATA INFORMASI TEKNIS	214.950.000,00	100,00	165.256.700	76,88	49.693.300

BIDANG KECIPTAKARYAAN						
14.	PEMBINAAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)	571.970.000,00	100,00	528.383.408	92,38	43.586.592
15.	ASSESMEN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKASI LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	242.730.000,00	100,00	220.532.622	90,86	22.197.378
16.	REKONSTRUKSI BANGUNAN PASCA BENCANA I	4.232.751.200,00	100,00	4.230.508.000	99,95	2.243.200
17.	PEMBANGUNAN SHELTER DI MUSHOLLA JABAL RAHMAH DI PAINAN (LANJUTAN)	252.951.000,00	100,00	227.649.047	90,00	25.301.953
19.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT	600.000.000,00	50,00	99.000.000	16,50	501.000.000
20.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENNIS GUBERNURAN (LANJUTAN)	250.000.000,00	100,00	238.424.920	95,37	11.575.080
21.	REKONSTRUKSI BANGUNAN PASCA BENCANA II	20.000.000,00	100,00	17.741.332	88,71	2.258.668
22.	PENYUSUNAN MASTERPLAN PASAR KOTO BARU	130.000.000,00	100,00	123.516.920	95,01	6.483.080

Berikut daftar sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan yang sedang dalam proses pembangunan maupun yang telah selesai dibangun pada Tahun Anggaran 2018.

Tabel 3. 6 sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan

No	Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan		Realisasi Fisik Tahun 2018	Realisasi Fisik terhadap Keseluruhan Bangunan		Ket
				Target Kumulatif Hingga 2018	Realisasi Kumulatif Hingga 2018	
1	Bangunan Strategis Provinsi	Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat	100%	12,90%	12,90%	
		Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat	100%	34,15%	34,15%	
		Pembangunan Gedung Convention Hall Sumatera Barat	100%	100%	100%	

No	Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan		Realisasi Fisik Tahun 2018	Realisasi Fisik terhadap Keseluruhan Bangunan		Ket
				Target Kumulatif Hingga 2018	Realisasi Kumulatif Hingga 2018	
		Pembangunan Gedung Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat	100%	65%	65%	
		Pembangunan Prasasti APDN Lama	100%	100%	100%	
		Rehabilitasi Gedung Koni 2 (dua) unit	100%	100%	100%	
2	Bangunan Gedung Pemerintah	Pembangunan Gedung ESDM Provinsi Sumatera Barat	100%	100%	100%	
		Pembangunan Gedung Pemberdayaan Wanita dan KB Provinsi Sumatera Barat	100%	100%	100%	
		Pembangunan Gedung DPKD	100%	100%	100%	
		Pembangunan Gedung Badan Ketahanan Pangan	100%	100%	100%	
		Pembangunan Gedung UPTD Balai Koperasi Provinsi Sumatera Barat	100%	100%	100%	
		Pembangunan Gedung Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	100%	100%	
		Pembangunan Gedung Pengendali Inflasi Sumatera Barat	100%	100%	100%	
3	Bangunan Rumah Negara	Pembangunan Rumah Dinas Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat	100%	100%	100%	
		Pembangunan Kembali Rumah Dinas TNI AD (Kodim 0304/Agam)	100%	100%	100%	

No	Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan		Realisasi Fisik Tahun 2018	Realisasi Fisik terhadap Keseluruhan Bangunan		Ket
				Target Kumulatif Hingga 2018	Realisasi Kumulatif Hingga 2018	
4	Tempat Evakuasi Sementara/ Shelter	Pembangunan Shelter Di Mushalla Jabal Rahmah di Painan	100%	80%	80%	
		Penyempurnaan Shelter Evakuasi Tsunami SMA 1 Sutra Kab. Pesisir Selatan	100%			

3.1.5. Persentase cakupan air minum

Cakupan air minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *Universal Access* Nasional, namun pada Tahun 2018 ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menargetkan capaian sebesar 75% untuk cakupan air minum Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3. 8

Target dan Capaian Indikator Persentase Air Minum di Sumatera Barat Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
5	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Persentase cakupan air minum	75%	76,04%	101,38%

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat capaian persentase cakupan air minum pada Tahun 2018 adalah sebesar 76,04 % atau sebesar 101,38 % atas taret yang telah ditetapkan. Adapun **klasifikasi capaian ini adalah sangat baik**. Capaian cakupan air minum ini dicapai melalui Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan

Air Limbah dengan dua kegiatan dan Total Anggaran Rp 2.771.215.000,-. Berikut kegiatan dan realisasi kegiatan terkait dengan capaian indikator ini.

PSPAM (Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum) APBN

Capaian air minum pada akhir tahun 2017 sebesar 74,58%, hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata kenaikannya berkisar antara 1,5% s/d 2% setiap tahunnya. Pada akhir tahun 2018 ini capaian air minum Sumatera Barat 76,04%. hal ini tentu tidak lepas dari perannya Pemerintah pusat pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.

Beberapa Program yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai Universal Access antara lain melalui program bantuan hibah MBR dimana pemerintah Kabupaten/Kota melalui dana talangan nantinya akan diganti oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Sambungan Rumah (SR). Kemudian melalui program Pamsimas, dimana tahun 2018 program dilaksanakan pada 12 Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini dalam tahap penyiapan MOU dan PKS untuk SPAM Regional di beberapa Kabupaten/Kota. (Agam – Bukittinggi Dan 50 Kota – Payakumbuh).

Tabel 3. 8

Program / Kegiatan Pendukung Persentase Cakupan Air Minum Sumatera Barat Tahun 2018

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	FISIK	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
I.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS DAERAH KAB/KOTA	2.771.215.000,00	80,00	1.402.645.594	50,61	1.368.569.406
1	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN KECIPTAKARYAAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT	558.915.000,00	100,00	434.462.114	77,73	124.452.886
2	PEMBINAAN KEGIATAN PAMSIMAS DI PROVINSI SUMATERA BARAT	164.300.000,00	100,00	155.550.414	94,67	8.749.586
3	PENYUSUNAN RENCANA SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL DI PROV. SUMATERA BARAT	610.000.000,00	100,00	597.048.716	97,88	12.951.284

4	PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) DI PROV. SUMATERA BARAT WILAYAH I	268.000.000,00	100,00	215.584.350	80,44	52.415.650
5	PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) KAWASAN PALANGAI - NYIUR MELAMBAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	1.170.000.000,00	-	-	0,00	1.170.000.000

Adapun data lengkap cakupan air minum per kabupaten/kota dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 3. 9
Data Cakupan Air Minum Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan 2018

No	Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Air Minum 2017	Persentase Capaian Air Minum 2018
1	Bukittinggi	51.85	64,02
2	Padang	60.92	69,76
3	Payakumbuh	100.00	96,64
4	Sawahlunto	76.52	80,60
5	Kab. Dharmasraya	65.58	68,01
6	Pariaman	87.42	88,51
7	Kab. Agam	78.35	80,69
8	Padang Panjang	87.66	90,78
9	Solok	87.36	91,39
10	Kab. Tanah Datar	77.09	78,37
11	Kab. Pesisir Selatan	81.68	80,80
12	Kab. Sijunjung	91.30	79,18
13	Kab. Pasaman Barat	80.47	82,39
14	Kab. Padang Pariaman	84.70	76,62
15	Kab. 50 Kota	73.89	69,09
16	Kab. Solok	84.81	75,07
17	Kab. Pasaman	76.35	79,61
18	Kab. Solok Selatan	86.33	79,61
19	Kep. Mentawai	24.59	26,70
TOTAL		75.83	76,04

Sumber data : PSPAM (Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum) APBN

Tabel 3. 10
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Persentase Cakupan Air Minum	Provinsi Sumatera Barat	Nasional	%
2016	72.32%	71.50%	101,14%

2017	75.83%	72.04%	105,26%
2018	76,04%	78%	97,48%
Target 2019	80%	78%	102,56%
Target 2020	83%	85%	97,64%
Target 2021	86%	85%	101,17%

Sumber : RPJMN 2015-2019 (diolah) dan Randal (APBN)

3.1.6. Persentase cakupan sanitasi

Sebagaimana air minum, sanitasi merupakan salah satu indikator yang termuat dalam Universal Access dengan capaian Nasional Pada 2019 sebesar 100%. Pada Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat menargetkan capaian Sanitasi sebesar 75 % dengan realisasi capaian sebesar 75,19 %.

Tabel 3. 11 Indikator Cakupan Sanitasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Persentase cakupan sanitasi	75 %	75,19 %	100,25 %

Dengan realisasi tersebut, maka persentase capaian Indikator Persentase Cakupan Sanitasi pada Tahun 2018 sebesar 100,25 % dan dapat diklasifikasikan dengan **sangat baik**.

Target akses sanitasi sebesar 75% pada tahun 2018 telah dapat dicapai dengan angka akses sanitasi pada tahun ini selesai 75,19%. ini menandakan bahwa perhatian Pemerintah Provinsi dan daerah Kab/Kota terhadap Sanitasi sudah semakin meningkat. Upaya- upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam bentuk peningkatan kapasitas ASN Kab/Kota dalam bidang Sanitasi membuahkan hasil .

OPD didaerah yang menangani Sanitasi telah membuka diri dalam penyediaan anggaran di sektor Sanitasi, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Disamping itu dengan bertambahnya program atau kegiatan Sanitasi didaerah seperti DAK Sanitasi, DAU Sanitasi

dan program – program dari pusat seperti Sanimas IDB serta penggunaan dana desa untuk sanitasi, berdampak terhadap peningkatan akses sanitasi di Provinsi Sumatera Barat.

Program dan Kegiatan Pendukung Persentase Cakupan Sanitasi Sumatera Barat Tahun 2018

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	FISIK	REALISAS I	%	SISA ANGGARA N
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	836.941.000,00	100,00	711.142.859	84,97	125.798.141
1.	PENDAMPINGAN PROGRAM SANIMAS IDB DAN PPSP	350.554.500,00	100,00	271.940.209	77,57	78.614.291
2.	PEMBINAAN PENYUSUNAN MASTERPLAN SANITASI KAB/KOTA	306.386.500,00	100,00	271.181.650	88,51	35.204.850
3.	PENYUSUNAN PROFIL PENGELOLAAN SANITASI PROVINSI SUMATERA BARAT	180.000.000,00	100,00	168.021.000	93,35	11.979.000

Tabel 3. 12
Data Cakupan Sanitasi Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No	Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Air Minum 2018
1	Bukittinggi	96,26
2	Padang	92,43
3	Payakumbuh	100
4	Sawahlunto	89,93
5	Kab. Dharmasraya	86,51
6	Pariaman	87,58
7	Kab. Agam	83,30
8	Padang Panjang	63,45
9	Solok	100
10	Kab. Tanah Datar	71,73
11	Kab. Pesisir Selatan	79,12
12	Kab. Sijunjung	72,52
13	Kab. Pasaman Barat	68,27
14	Kab. Padang Pariaman	61,03
15	Kab. 50 Kota	59,58
16	Kab. Solok	59,96
17	Kab. Pasaman	47,47
18	Kab. Solok Selatan	51,14
19	Kep. Mentawai	46,86

No	Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Air Minum 2018
TOTAL		75,19

Sumber data : Stantasi Total berbasis Masyarakat (STBM)

Tabel 3. 13
Perbandingan antara Realisasi Kinerja
serta Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Persentase Sanitasi	Provinsi Sumatera Barat	Nasional	%
2016	-	-	
2017	75.88 %	71.44 %	106,21 %
2018	75,19 %	74,74 %	100,60 %
Target 2019	78 %	75%	104 %
Target 2020	79 %	85%	92,94 %
Target 2021	80%	85%	94,11 %

Sumber : RPJMN 2015-2019 (diolah)

3.1.7. Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi

Untuk mendukung sasaran *Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung* melalui indikator *Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan Program RTRW* didukung oleh 2 (dua) program, yaitu:

Anggaran dan Realisasi Keuangan Program di Bidang Penataan Ruang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	FISIK	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	4.929.252.510,00	100,00	4.140.183.131	83,99	789.069.379
1	PENYUSUNAN RTR KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	923.797.750,00	100,00	888.039.910	96,13	35.757.840
2	PROSES LEGALISASI RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)	522.914.950,00	100,00	485.269.586	92,80	37.645.364
3	PELATIHAN PEMETAAN TATA RUANG	377.813.950,00	100,00	316.217.662	83,70	61.596.288

4	PENYUSUNAN DATABASE KE PU AN DAN TATA RUANG PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	944.666.750,00	100,00	869.794.623	92,07	74.872.127
5	LEGALISASI PERDA REVISI RTRW PROVINSI SUMATERA BARAT	912.063.150,00	100,00	679.409.120	74,49	232.654.030
6	KOORDINASI PERENCANAAN TATA RUANG, PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT	286.593.950,00	100,00	136.645.396	47,68	149.948.554
7	PENINGKATAN PEMAHAMAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PENATAAN RUANG	572.282.150,00	100,00	416.885.734	72,85	155.396.416
8	PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN BAHAN KOMUNIKASI PENATAAN RUANG	389.119.860,00	100,00	347.921.100	89,41	41.198.760
II	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	479.701.250,00	100,00	325.983.700	67,96	153.717.550
104	PENGAWASAN TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENATAAN RUANG DI KABUPATEN/KOTA	167.546.950,00	100,00	117.479.800	70,12	50.067.150
105	PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT	144.591.350,00	100,00	111.775.200	77,30	32.816.150
106	MONITORING PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	167.562.950,00	100,00	96.728.700	57,73	70.834.250

Dengan target indikator sebesar 82% capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

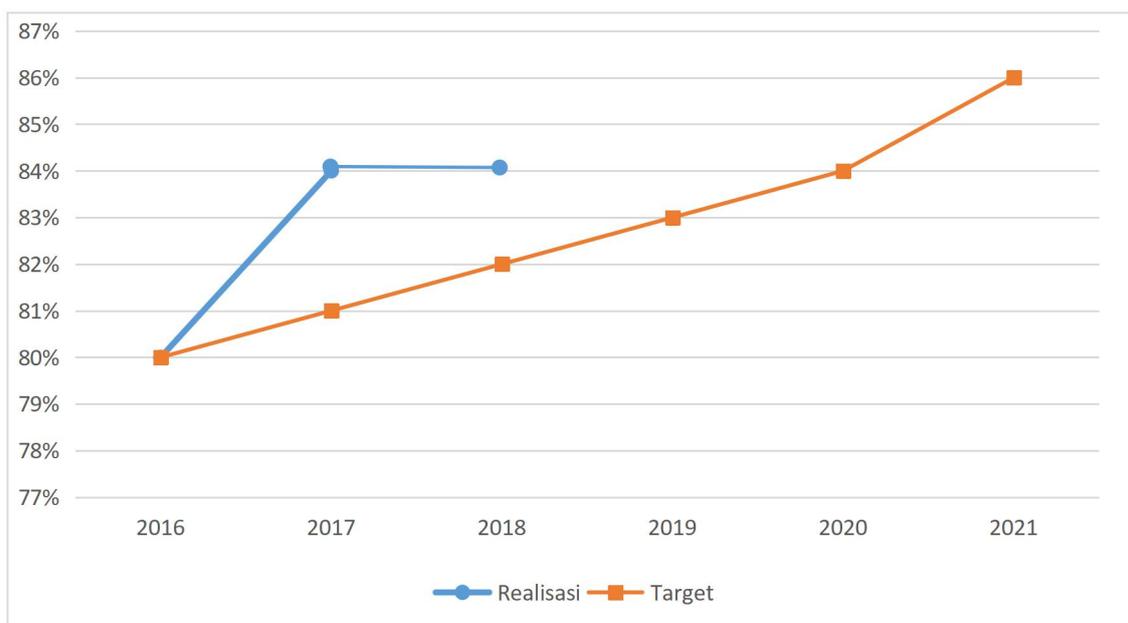
Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
7	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	82%	84%	102,44 %

Untuk mendapatkan angka ini dilakukan penghitungan dengan perbandingan Jumlah kesesuaian program rencana pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan program RTRW Provinsi Sumatera Barat dikalikan 100%. Dengan target 82%, pada Tahun 2018 tercapai 84% atau angka capaian sebesar 102,44 %. Klasifikasi capaian ini dapat dikategorikan dengan **sangat baik**.

Tahun	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang
2016	80%
2017	84%
2018	82%
Target 2019	83%
Target 2020	84%
Target 2021	86%

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara target dan capaian persentase kesesuaian rencana pembangunan (RPJM) dengan rencana tata ruang (RTRW) pada Tahun 2018. Secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 6
Digaram Target dan Capaian Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan
dengan Rencana Tata Ruang Tahun 2016 - 2021

Adapun data pendukung kesesuaian program pada rencana pembangunan (RPJMD) dengan program pada Rencana Tata Ruang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

3.1.8. Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi

Untuk mendukung sasaran *Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung* melalui indikator *Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan Program RTRW* didukung oleh 2 (dua) program, yaitu:

Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan Program di Bidang Penataan Ruang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	FISIK	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
I	PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	4.929.252.510,00	100,00	4.140.183.131	83,99	789.069.379
II	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	479.701.250,00	100,00	325.983.700	67,96	153.717.550

Dengan target indikator sebesar 82% capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja

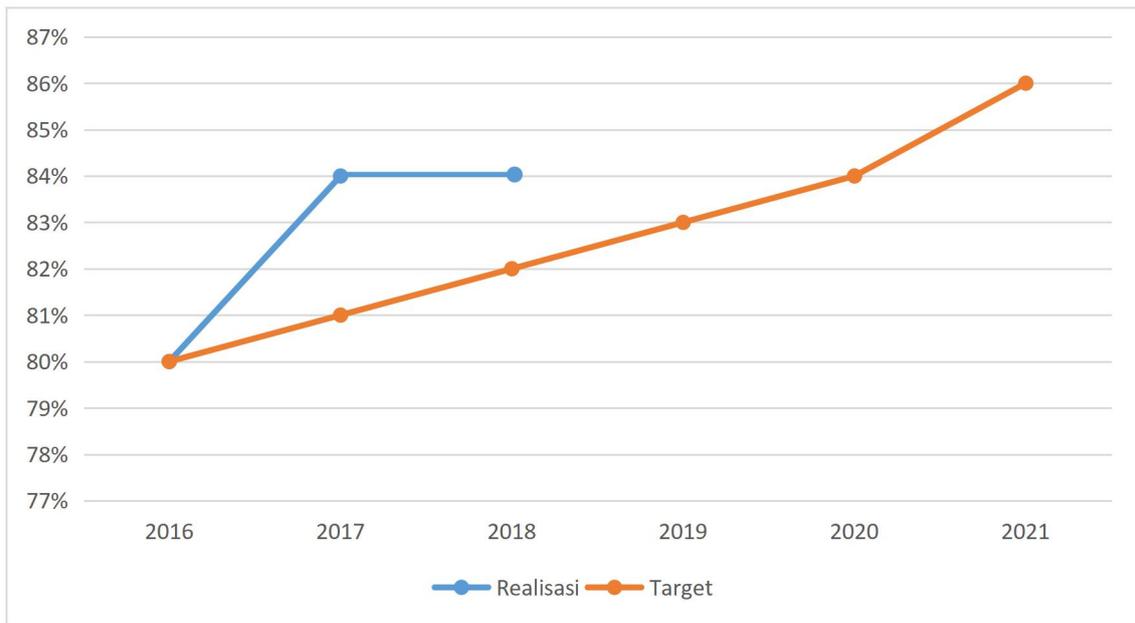
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	82%	84%	102.44%

Untuk mendapatkan angka ini dilakukan penghitungan dengan perbandingan Jumlah kesesuaian program rencana pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan program RTRW Provinsi Sumatera Barat dikalikan 100%. Dengan target 82%, pada Tahun 2018 tercapai 84% atau angka capaian sebesar 102.44%. Klasifikasi capaian ini dapat dikategorikan dengan **sangat baik**.

Kesesuaian Program RTRW Provinsi dengan Rencana Pembangunan

Tahun	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang
2016	80%
2017	84%
Target 2018	82%
Target 2019	83%
Target 2020	84%
Target 2021	86%

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara target dan capaian persentase kesesuaian rencana pembangunan (RPJM) dengan rencana tata ruang (RTRW) pada Tahun 2018. Secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 7
Digaram Target dan Capaian Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan
dengan Rencana Tata Ruang Tahun 2016 - 2021

Adapun data pendukung kesesuaian program pada rencana pembangunan (RPJMD) dengan program pada Rencana Tata Ruang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

NO	INDIKATOR KINERJA				TARGET		REALISASI
	PROGRAM RTRW PROVINSI 2012-2032	PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN (RPJM) 2018	KESESUAIAN PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RTRW	JUMLAH PROGRAM RPJM YANG SESUAI DENGAN RTRW	
<i>I</i>	<i>Program Perwujudan Pengembangan Struktur Ruang</i>				25	21	84%
<i>A</i>	<i>Program Perwujudan Pusat Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat</i>						
1	Pemantapan Fungsi Kota PKN	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut		Dinas Perhubungan			
2	Pemantapan Fungsi Kota PKW	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3	Pengembangan dan Penataan PKN	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
4	Pengembangan PKW dan PKWp	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD		Dinas Kesehatan			
5	Pengembangan PKL	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
6	Penyusunan Renstra						
<i>B</i>	<i>Program Perwujudan Sistem Prasarana</i>						
1	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi	Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			

NO	INDIKATOR KINERJA				TARGET		REALISASI
	PROGRAM RTRW PROVINSI 2012-2032	PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN (RPJM) 2018	KESESUAIAN PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RTRW	JUMLAH PROGRAM RPJM YANG SESUAI DENGAN RTRW	
2	Perwujudan Sistem Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air			
3	Prasarana Perumahan dan Permukiman	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
II	<i>Program Perwujudan Pola Ruang</i>						
A	<i>Program Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung</i>						
1	Pengembangan Kawasan Hutan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan		Dinas Kehutanan			
2	Pemantapan Kawasan Lindung	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam		Dinas Kehutanan			
3	Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Kawasan Lindung						
4	Kawasan Rawan Bencana Alam	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan		BPBD			
B	<i>Program Perwujudan Pemantapan Kawasan Budaya</i>						

NO	INDIKATOR KINERJA				TARGET		REALISASI
	PROGRAM RTRW PROVINSI 2012-2032	PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN (RPJM) 2018	KESESUAIAN PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RTRW	JUMLAH PROGRAM RPJM YANG SESUAI DENGAN RTRW	
1	Pengembangan kawasan permukiman						
	- pengembangan kawasan permukiman perdesaan						
	- pengembangan kawasan permukiman perkotaan	Pengembangan perumahan		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
2	Pengembangan Kawasan Pertanian	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Pertanian		Dinas Pertanian			
3	Pengembangan Perkebunan	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Perkebunan		Dinas Perkebunan			
4	Pengembangan Kawasan Peternakan	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Peternakan		Dinas Peternakan			
5	Program Pengembangan Perikanan dan Kelautan	Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan		Dinas Kelautan dan Perikanan			
6	Program Pengembangan Kawasan Pertambangan	Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		Dinas ESDM			

NO	INDIKATOR KINERJA				TARGET		REALISASI
	PROGRAM RTRW PROVINSI 2012-2032	PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN (RPJM) 2018	KESESUAIAN PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RTRW	JUMLAH PROGRAM RPJM YANG SESUAI DENGAN RTRW	
7	Program Pengembangan Industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
8	Program Pengembangan Pariwisata	Program pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata		Dinas Pariwisata			
9	Program Pengembangan Kawasan Budaya Peruntukan Lainnya						
10	Penyusunan SPM						
C	<i>Program Perwujudan Kawasan Strategis</i>						
1	Penyusunan RTR Kawasan Strategis	Perencanaan penataan ruang		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
2	Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Strategis	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			

3.2.1 Capaian Kinerja Bidang Penataan Ruang

Dalam Cascading yang telah disusun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018, Bidang Penataan Ruang bertanggungjawab atas Meningkatnya Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Hal ini sekaligus menunjang capaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat dalam Tujuan 2 Misi 5. Sedangkan dalam Pergub Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Perencanaan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang Pengawasan Penataan Ruang.

Tabel 3. 11 Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya RTR yang berkekuatan hukum	Jumlah RTR yang diperdakan	-		
2	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR	Jumlah program yang sesuai dengan rencana tata ruang	25	25	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Bidang Penataan Ruang Tahun 2018 adalah 100% dan dalam klasifikasi **sangat baik**. Adapun rincian realisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR adalah sebagai berikut.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi :

- Program Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi (Pembangunan dan Peningkatan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer):
 1. Pembangunan jalan dan jembatan provinsi (RPJM).
 2. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi (RPJM).

- Program Perwujudan Sistem Prasarana Perumahan dan Permukiman (penyediaan prasarana dan sarana air bersih) :
 3. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/ kota
- Program perwujudan kawasan strategis :
 4. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/kota
- Program Perwujudan Sistem Prasarana Perumahan dan Permukiman (pembangunan TPA Regional, pembangunan TPA pada kabupaten/kota)
 5. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
- Program Perwujudan Sistem Prasarana Perumahan dan Permukiman (pembangunan IPAL, penataan bangunan dan system drainase) :
 6. Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi
 7. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
- Program Perwujudan Sistem Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi (peningkatan pengairan irigasi teknis, pengembangan dan konservasi area rawa, pengembangan penyediaan air baku, penanganan abrasi pantai) :
 8. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 9. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya
 10. Penyediaan dan pengolahan air baku
 11. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai
- Program Perwujudan Pemantapan Kawasan Budidaya : Pengembangan kawasan permukiman perkotaan (percepatan penyediaan perumahan, penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh) :
 12. Pengembangan perumahan
 13. Pemberdayaan komunitas perumahan
- Program Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung : Program Kawasan Rawan Bencana Alam (inventarisir kaw. Rawan bencana, perda zonasi pembangunan di kaw. Rawan bencana, pembangunan system peringatan dini tsunami dll) :
 14. Peningkatan Mitigasi Bencana
 15. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

- 16. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan
- 17. Penanganan Tanggap Darurat Bencana
- 18. Pemulihan Daerah Pasca Bencana
- Program Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung (rehabilitasi dan konservasi kaw.lindung) :
 - 19. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
 - 20. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 21. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- Program Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi (pembangunan terminal, jalur KA, pengembangan transportasi laut) :
 - 22. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut
 - 23. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
- Program Perwujudan Pemantapan Kawasan Budidaya : program pengembangan perikanan dan kelautan (pengembangan industry maritim, pengembangan sentra budidaya perikanan, dll) :
 - 24. Pengembangan Ekonomi Maritim
 - 25. Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan

AKUNTABILITAS KINERJA BIDANG PENATAAN RUANG

a. Capaian Kinerja Organisasi

Kesesuaian program rencana pembangunan dengan program rencana tata ruang (RTRW Provinsi Sumatera Barat), dapat dilihat dari implementasi program kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan penjabaran dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang menjadi dasar/ acuan dalam program pembangunan.

Dari target yang ditetapkan sebesar 82 %, ternyata realisasi yang telah dicapai sebesar 84 %, artinya jumlah program pembangunan yang disusun pada RPJM sebagian besar telah sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang dan indikasi program pada RTRW.

Adapun tingkat kesesuaian program dimaksud, dapat kami jabarkan sebagai berikut :

1. Program pemantapan fungsi kota PKN yang dimaksud dalam RTRW adalah dalam rangka perwujudan pengembangan pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat yakni untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya. Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki PKN adalah salah satunya pelabuhan laut internasional. Hal ini telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui program

Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut pada Dinas Perhubungan selaku OPD penanggung jawab.

2. Program pemantapan fungsi kota PKW, sama halnya dengan PKN, maka untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Sumatera Barat, sarana prasarana minimum yang harus dimiliki salah satunya yaitu peningkatan kapasitas pelayanan air minum. Hal ini telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
3. Program pengembangan dan penataan PKN, Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki PKN adalah salah satunya terminal regional tipe A. Hal ini telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
4. Program Pengembangan PKW dan PKWp, untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) di Provinsi Sumatera Barat, sarana prasarana minimum yang harus dimiliki salah satunya peningkatan pelayanan rumah sakit dan telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD pada Dinas Kesehatan selaku OPD penanggung jawab.
5. Program Pengembangan PKL, untuk Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) sarana prasarana minimum yang harus dimiliki tidak jauh berbeda dengan PKW yakni salah satunya peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan telah diakomodir dalam program pembangunan (RPJM) melalui program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
6. Program Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi pada RTRW untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur transportasi guna mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
7. Program Perwujudan Sistem Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi dalam RTRW untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air dalam rangka ketahanan pangan serta meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air selaku OPD penanggung jawab.

8. Program Prasarana Perumahan dan Permukiman pada RTRW adalah rehabilitasi dan peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Limbah dan telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
9. Program Pengembangan Kawasan Hutan dalam RTRW berupa pengembangan hutan tanaman, pengembangan ekowisata. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Perencanaan dan Pengembangan Hutan pada Dinas Kehutanan selaku OPD penanggung jawab.
10. Program Pemanjapan Kawasan Lindung dalam RTRW salah satunya berupa rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/ meningkatkan fungsi lindung. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam pada Dinas Kehutanan.
11. Program Kawasan Rawan Bencana Alam dalam RTRW salah satunya berupa upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan pada BPBD.
12. Program pengembangan kawasan permukiman perkotaan dalam RTRW berupa percepatan penyediaan perumahan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
13. Program Pengembangan Kawasan Pertanian pada RTRW berupa perluasan lahan dan peningkatan produktifitas lahan padi sawah. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Pertanian pada Dinas Pertanian.
14. Program Pengembangan Perkebunan pada RTRW berupa pengembangan kawasan tanaman tahunan/perkebunan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Perkebunan pada Dinas Perkebunan.
15. Program Pengembangan Kawasan Peternakan pada RTRW berupa pengembangan kawasan agribisnis peternakan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Peternakan pada Dinas Peternakan.

16. Program Pengembangan Perikanan dan Kelautan pada RTRW salah satunya berupa rehabilitasi dan konservasi sumberdaya pesisir dan laut. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
17. Program Pengembangan Kawasan Pertambangan dalam RTRW salah satunya berupa inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas ESDM.
18. Program Pengembangan Industri dalam RTRW salah satunya berupa program pengembangan industri untuk kabupaten dan kota. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
19. Program Pengembangan Pariwisata dalam RTRW yaitu pengembangan kepariwisataan pada kawasan unggulan wisata maupun kawasan potensial wisata. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata pada Dinas Pariwisata.
20. Program Penyusunan RTR Kawasan Strategis merupakan program perwujudan kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Perencanaan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
21. Program Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Strategis, merupakan program perwujudan kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Factor penunjang tercapainya target kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang :

Dengan tercapainya target kesesuaian program antara rencana pembangunan, dalam hal ini kami mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRW), dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan telah disusun dengan baik sesuai dengan arahan dari Bappenas yakni penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan dokumen rencana tata ruang, sehingga terdapat sinkronisasi program diantara kedua dokumen perencanaan.

Adapun fungsi rencana tata ruang adalah sebagai kerangka pembangunan, dimana program pembangunan harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

Disamping itu, dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen rencana tata ruang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari pihak perangkat daerah (OPD) selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif.

3.2. Capaian Kinerja Bidang / UPT

Untuk mendukung capaian kinerja organisasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh 1 Sekretariat, 3 Bidang dan 3 UPT yang masing-masing memiliki target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Adapun capaian target dalam perjanjian kinerja masing-masing Bidang dan Kasi dijelaskan berikut.

3.2.2 Capaian Kinerja Bidang Bina Marga

Berdasarkan Pergub Sumatera Barat No 53 Tahun 2017, Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan, Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Hal ini sejalan dengan *outcome* dalam Pohon Kinerja dimana Bidang Bina Marga merupakan bidang yang bertanggungjawab terhadap peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah di Sumatera Barat.

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2018, setidaknya Bidang Bina Marga memiliki 3 sasaran untuk mewujudkan Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah tersebut, yaitu sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 17

Capaian Indikator Kinerja Bidang Bina Marga

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Berkurangnya jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir	Persentase jalan yang belum terhubung	95,34%	92,07%	103,55%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2	Meningkatnya prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan	Jumlah kendaraan yang melintas (LHR)	152 smp/jam	152 smp/jam	100%
3	Meningkatnya kualitas dan kapasitas jalan	Panjang jalan terbangun sesuai spesifikasi	3,47 km	6,89 km	198,56%
		Panjang jalan terbangun sesuai standar jalan provinsi	6,61 km	10,77 km	162,95%
		Jumlah kendaraan yang melintas (LHR)	180 smp/jam	180 smp/jam	100%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa keseluruhan capaian target dapat diklasifikasikan dengan **sangat baik**. Adapun indikator Persentase jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir disebabkan terbatasnya anggaran serta prioritas penanganan jalan pada ruas yang lebih mendesak.

3.2.3 Capaian Kinerja Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas, Penyehatan Lingkungan serta Air Minum dan Limbah.

Tabel 3. 18 Capaian Indikator Kinerja Bidang Cipta Karya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya penyediaan bangunan gedung pemerintah, rumah negara dan bangunan strategis lainnya yang aman dan nyaman	Jumlah gedung pemerintah, rumah negara dan bangunan strategis terbangun sesuai standar bangunan gedung negara	8 unit	5 unit	62,50%
2	Meningkatnya penyediaan layanan air minum dan sanitasi	Jumlah Debit air terpasang	200 liter/detik	200 liter/detik	100%
		Persentase rumah yang bersanitasi	75%	76,19%	100,25%

Adapun rincian data debit air dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sasaran	Indikator Kinerja	Lokasi	Debit Air
Meningkatnya penyediaan layanan air minum dan sanitasi	Jumlah debit air terpasang	Peningkatan SPAM Kawasan Sungai Rumbai	20 liter/detik
		Peningkatan SPAM Kawasan Kotobaru	20 liter/detik
		Peningkatan SPAM Kawasan Tanah Datar	20 liter/detik
		Peningkatan SPAM di Malampah	20 liter/detik
		Peningkatan SPAM di Payakumbuh	100 liter/detik
		Peningkatan SPAM di Ujung Gading	20 liter/detik

3.2.4 Capaian Kinerja Bidang Penataan Ruang

Dalam Cascading yang telah disusun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017, Bidang Penataan Ruang bertanggungjawab atas Meningkatnya Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Hal ini sekaligus menunjang capaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat dalam Tujuan 2 Misi 5. Sedangkan dalam Pergub Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Perencanaan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang Pengawasan Penataan Ruang.

Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya RTR yang berkekuatan hukum	Jumlah RTR yang diperdakan	-		
2	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR	Jumlah program yang sesuai dengan rencana tata ruang	25	25	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Bidang Penataan Ruang Tahun 2017 adalah 100% dan dalam klasifikasi **sangat baik**. Adapun rincian realisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR adalah sebagai berikut.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi :

- Program Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi (Pembangunan dan Peningkatan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer):
 1. Pembangunan jalan dan jembatan provinsi (RPJM).
 2. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi (RPJM).
- Program Perwujudan Sistem Prasarana Perumahan dan Permukiman (penyediaan prasarana dan sarana air bersih) :
 1. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/ kota
- Program perwujudan kawasan strategis :
 1. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/kota
- Program Perwujudan Sistem Prasarana Perumahan dan Permukiman (pembangunan TPA Regional, pembangunan TPA pada kabupaten/kota)
 1. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
- Program Perwujudan Sistem Prasarana Perumahan dan Permukiman (pembangunan IPAL, penataan bangunan dan system drainase) :
 1. Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi

2. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
- Program Perwujudan Sistem Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi (peningkatan pengairan irigasi teknis, pengembangan dan konservasi area rawa, pengembangan penyediaan air baku, penanganan abrasi pantai) :
 1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 2. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya
 3. Penyediaan dan pengolahan air baku
 4. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai
 - Program Perwujudan Pemantapan Kawasan Budidaya : Pengembangan kawasan permukiman perkotaan (percepatan penyediaan perumahan, penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh) :
 1. Pengembangan perumahan
 2. Pemberdayaan komunitas perumahan
 - Program Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung : Program Kawasan Rawan Bencana Alam (inventarisir kaw. Rawan bencana, perda zonasi pembangunan di kaw. Rawan bencana, pembangunan system peringatan dini tsunami dll) :
 1. Peningkatan Mitigasi Bencana
 2. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan
 4. Penanganan Tanggap Darurat Bencana
 5. Pemulihan Daerah Pasca Bencana
 - Program Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung (rehabilitasi dan konservasi kaw.lindung) :
 1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
 2. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
 3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
 - Program Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi (pembangunan terminal, jalur KA, pengembangan transportasi laut) :
 1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut
 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
 - Program Perwujudan Pemantapan Kawasan Budidaya : program pengembangan perikanan dan kelautan (pengembangan industry maritim, pengembangan sentra budidaya perikanan, dll) :
 1. Pengembangan Ekonomi Maritim

2. Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan

3.2.5 Capaian Kinerja UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan

Untuk mencapai peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan berperan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan. UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan memiliki sasaran yaitu *tersedianya peralatan labor, pengujian mutu konstruksi dan lingkungan* dengan 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

Tabel 3. 20
Capaian Indikator Kinerja UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Tersedianya peralatan labor, pengujian mutu konstruksi dan lingkungan	Jumlah peralatan labor dan pengujian	201 unit	169 unit	84,07%
		Jumlah laporan hasil pengujian mutu konstruksi	350 dokumen	677 dokumen	193,42%
		Jumlah laporan hasil pengujian mutu lingkungan	350 dokumen	607 dokumen	173,42%

3.2.6 Capaian Kinerja UPTD PIP2B

Dalam perjanjian kinerja UPTD PIP2B dengan Kepala Dinas, UPTD PIP2B memiliki sasaran sebagai berikut :

Tabel 3. 21
Capaian Indikator Kinerja UPTD UPTD PIP2B

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Pemeriksaan laik fungsi oleh tim ahli bangunan gedung (TABG)	Jumlah gedung yang laik fungsi	30 unit	30 unit	100%

3.2.7 Capaian Kinerja UPTD Workshop dan Peralatan

Dalam perjanjian kinerja UPTD Workshop dan Peralatan dengan Kepala Dinas, UPTD Workshop dan Peralatan memiliki sasaran sebagai berikut :

Tabel 3. 22
Capaian Indikator Kinerja UPTD UPTD Workshop dan Peralatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Tercapainya target redistribusi pendapatan peminjaman peralatan yang siap pakai untuk pemakaian sewa dan non sewa	Jumlah peralatan yang siap pakai untuk pemakaian sewa dan non sewa	68 unit	68 unit	100%
		Jumlah laporan peminjaman peralatan pemakaian sewa	100 dokumen	127 dokumen	127%
		Jumlah laporan peminjaman peralatan pemakaian non sewa	150 dokumen	175 dokumen	116,66%

3.3. Perbandingan Kinerja Organisasi

3.3.1. Perbandingan Kinerja Tahun Lalu

Tabel 3. 23
Perbandingan Kinerja Organisasi Tahun Lalu

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2018	Tahun 2017	Peningkatan
1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	100,08%	100,07%	100,009 %
	Meningkatkan sarana dan prasarana umum	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	100 %	87,50 %	114,28 %

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2018	Tahun 2017	Peningkatan
	dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Persentase cakupan air minum	76,04%	75,83%	100,27 %
		Persentase cakupan sanitasi	75.19%	75,88%	99,09 %
2	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	84%	84%	100%

3.3.2. Perbandingan Kinerja Terhadap Renstra

Tabel 3. 24
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Capaian Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2018	Target 2021	Persentase Capaian	
1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	72,058%	75%	96,07%	
		Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	5 unit (29 unit kumulatif)	54 unit	53,70%
			Persentase cakupan air minum	76,04%	86%	88,41%
			Persentase cakupan sanitasi	75.19%	80%	93,98%
2	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	84%	86%	98%	

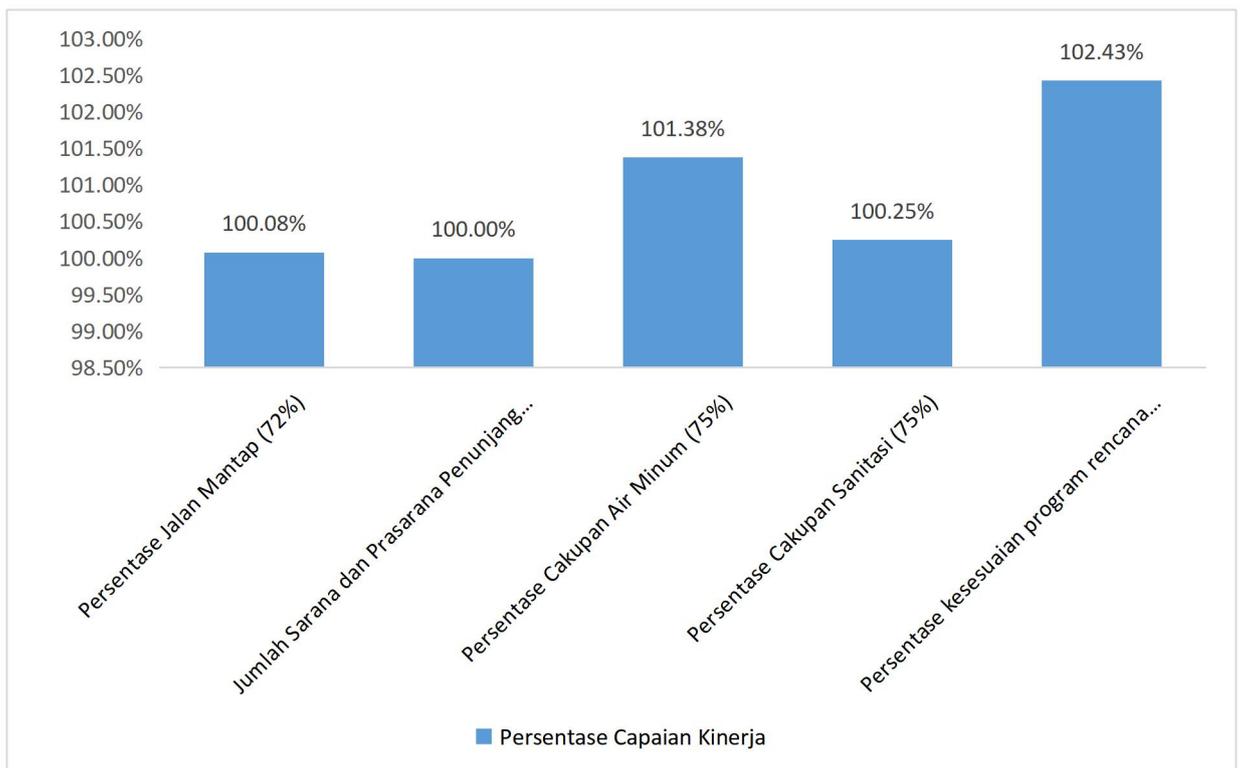
3.3.3. Perbandingan Kinerja Terhadap Target Nasional

Tabel 3. 25
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Provinsi Sumbar	Capaian Nasional	Deviasi
2	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	72,058%	89,42%	-17,36%
	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	5 unit	-	
		Persentase cakupan air minum	76,04%	76,10%	99,92%
		Persentase cakupan sanitasi	75.19%	74,74%	100,60%
3	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	84%	-	

3.4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dari ketujuh target kinerja yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, keseluruhan target memiliki capaian dengan klasifikasi capaian sangat baik. Hanya ada satu indikator yang memiliki capaian dibawah 100% dan selebihnya memiliki capaian diatas 100%.



Gambar 3. 7
Capaian Kinerja Indikator

a. Persentase Jalan Mantap

Berdasarkan hasil survey IRMS yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Persentase kemantapan jalan provinsi pada Tahun 2018 sebesar 72,058%. Hal ini menunjukkan bahwa telah tercapainya target persentase jalan mantap provinsi ini. Dalam keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai target dalam Indikator Kinerja Utama ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Pengalokasian sejumlah anggaran untuk program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Pada Tahun 2018, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan memiliki pagu dana sebesar Rp 204.488.943.817,- atau sebesar 44,99% dari total APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sedangkan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mendapat porsi sebesar Rp. 65.298.230.300,- atau sebesar 14,36%. Dengan keterbatasan dana yang tersedia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pembangunan dan peningkatan ruas jalan sesuai dengan kebutuhan atau standar jalan provinsi. Sehingga target 72% dapat tercapai.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki komitmen dalam mewujudkan infrastruktur jalan dan jembatan dengan kualitas terbaik. Hal ini didukung dengan keberadaan UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan yang telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi sejak tanggal 15 Maret 2012.
3. Unit Layanan Gangguan yang siap 24 jam untuk mengatasi bencana alam serupa banjir/longsor yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota.
4. Adanya kegiatan Rehab/Pemeliharaan Rutin yang setiap tahunnya menjaga kemandapan jalan dengan panjang jalan yang dipelihara sepanjang 1248.97 km
5. Adanya pengawasan dan kontrol langsung dari pimpinan.

Peningkatan kondisi kemandapan jalan ini memberikan pengaruh pada :

- Meningkatnya kecepatan kendaraan sehingga mempengaruhi waktu tempuh rata-rata (waktu perjalanan) menjadi lebih singkat
- Menurunnya nilai biaya transportasi untuk pengguna jalan, yaitu nilai Biaya Operasi Kendaraan (BOK)
- Meningkatnya pelayanan jalan seperti kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.

b. Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan

Indikator ini merupakan salah satu indikator dengan klasifikasi sangat baik namun memiliki penurunan capaian indikator. Capaian Indikator Kinerja adalah sebesar 100%. sedang Capaian Indikator sesuai Renstra adalah sebesar 62,50%, sedang Capaian Indikator sesuai Perjanjian Kinerja adalah sebesar 100%. Dalam keberhasilan pencapaian indikator ini ada beberapa hal yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat antara lain sebagai berikut :

- Pada Tahun 2018 dana yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp 157.341.202.743,- atau sebesar 34,61% dari total pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan anggaran yang ada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus juga mengalokasikan sejumlah dana untuk pembangunan bangunan strategis lainnya yang sedang dalam progres

pembangunan seperti Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat dan Pembangunan Gedung Kebudayaan yang membutuhkan alokasi dana besar. Sehingga perlu dipilah prioritas bangunan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu sepanjang Tahun 2018.

- Pengawasan dan kontrol langsung dari pimpinan terkait penyelesaian pekerjaan

Adapun penyebab penurunan kinerja pada indikator ini disebabkan adanya hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu Penambahan Garase Rumah Dinas Gubernur fisik 86,47 % kendala terdapat tiang listrik di lokasi pekerjaan yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Proses pemindahan membutuhkan waktu, dan diberlakukan denda 50 hari. Pembangunan Gedung Bundo Kandung fisik 65% dianggarkan kembali 2019 dan Shelter Evakuasi Tsunami di Mushalla Jabal Rahmah di Painan (lanjutan) fisik 80% dianggarkan kembali 2019.

c. **Persentase cakupan air minum**

Dalam pencapaian kinerja seksi air minum pada tahun 2018, target yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam pelayanan air minum, terjadi peningkatan dalam pelayanan kinerja SPAM Regional dan tersedianya Database Air Minum untuk kab/kota se Sumatera Barat. Hal – hal yang mendukung dalam pencapaian target 2018 ini adalah:

- Adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan, terutama oleh PPTK. Setiap keterlambatan pekerjaan oleh pelaksanaan segera ditindak lanjuti dan dicari sosialisasi.
- Koordinasi dengan stakeholder seperti bupati/walikota dan jajarannya harus intens dilakukan, khususnya dalam penyusunan para perencanaan SPAM Regional Kab.Agam-kota Bikittinggi. Permasalahan terjadi karena sulitnya mencari sumber air dengan debit besar dan tidak menimbulkan konflik sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, survey awal kelokasi sumber perlu dilakukan dan koordinasi sampai ke level Nagari.

Dalam pencapaian kinerja efisiensi terhadap sumber daya telah dilakukan dengan memanfaatkan komunikasi via email/hp sebagai alat koordinasi. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah dengan adanya kegiatan pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang keciptaan karya, sehingga dengan kegiatan ini pengawasan terhadap kegiatan dan koordinasi internal dapat dilaksanakan dengan optimal.

d. Persentase cakupan sanitasi

Peningkatan layanan terhadap akses sanitasi sudah menjadi prioritas nasional bahkan merupakan universal akses (SDG'S) dengan target akses sanitasi 75% pada tahun 2019. Target nasional tahun 2019 telah terdistribusi menjadi target provinsi dimana provinsi Sumatera Barat memperoleh target sanitasi sebesar 78%, dimana target inipun telah terdistribusi menjadi target sanitasi Kabupaten/Kota.

Secara target, Provinsi Sumatera Barat telah mencapai target yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, namun upaya peningkatan pencapaian akses sanitasi belum dapat kita laksanakan pada tahun 2018 ini dengan baik dan maksimal dikarenakan tidak adanya anggaran sektor sanitasi pada APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018. Baru pada perubahan APBD Provinsi 2018, kita anggarkan untuk DED drainase primer/lintas kabupaten kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Walaupun demikian, melalui pembentukan Pokja Sanitasi Provinsi, Kita dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan ke Pokjaan terutama yang melibatkan Pokja Sanitasi Kabupaten Kota sehingga pembinaan dan pendampingan terhadap pencapaian akses sanitasi Kabupaten Kota dapat terus ditingkatkan.

Disamping itu juga dibina hubungan antar instansi terutama yang terlibat langsung dalam pencapaian akses sanitasi terutama Dinas Kesehatan yang melakukan upaya peningkatan akses sanitasi melalui perubahan perilaku masyarakat yang biasa dikenal melalui program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

e. Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan rencana pembangunan

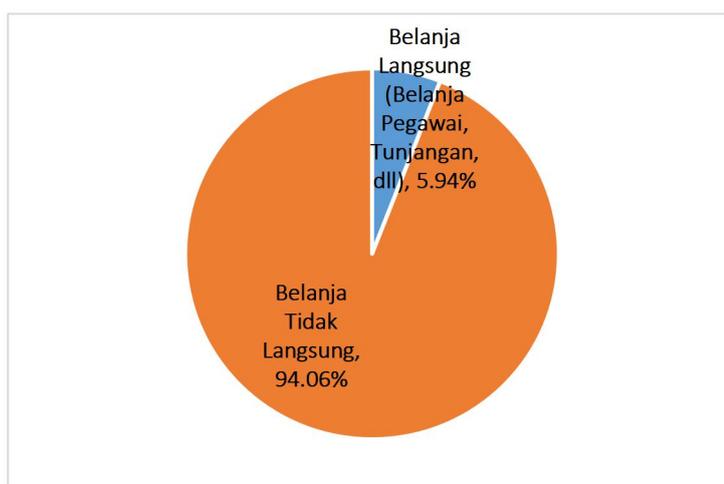
Dengan tercapainya target kesesuaian program antara rencana pembangunan, dalam hal ini kami mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRW), dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan telah disusun dengan baik sesuai dengan arahan dari Bappenas yakni penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan dokumen rencana tata ruang, sehingga terdapat sinkronisasi program diantara kedua dokumen perencanaan.

Adapun fungsi rencana tata ruang adalah sebagai kerangka pembangunan, dimana program pembangunan harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

Disamping itu, dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen rencana tata ruang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari pihak perangkat daerah (OPD) selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif.

3.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;

Pagu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 adalah sebesar Rp 483.181.721.020,10 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar 28.672.808.958,10 (5,94 %) dan belanja langsung sebesar 454.508.912.062 (94,06 %) Hal tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat di Sumatera Barat.



Dari Pagu awal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan efisiensi pada Perubahan DPA sebesar Rp 43.863.863.701,24.

Beberapa upaya percepatan dan efisiensi yang dilakukan sepanjang Tahun 2018 atas instruksi Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- Mempercepat proses pengadaan lahan untuk proyek-proyek strategis dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dapat diterima masyarakat
- Menyusun dan menyiapkan administrasi (teknik dan keuangan) untuk percepatan penyerapan anggaran
- Adanya pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan fisik kegiatan di lapangan

Rincian Efisiensi sesuai dengan Indikator Sasaran :

1. Persentase Kemantapan Jalan efisiensi terdiri dari :
 - a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 23.411.911.692,-
 - b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 2.537.422.944,-
2. a. Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan efisiensi terdiri dari :
 - Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 13.549.519.377,-
- b. Persentase Cakupan Air Minum efisiensi terdiri dari :
 - Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah bertambah sebesar Rp. 1.368.569.406,-
- c. Persentase Cakupan Sanitasi efisiensi terdiri dari :
 - Program/Kegiatan berada pada Kabupaten / Kota.
3. Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi efisiensi terdiri dari :
 - a. Program Perencanaan Tata Ruang bertambah sebesar Rp. 789.069.379,-
 - b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertambah sebesar Rp. 153.717.550,-

Program yang tidak termasuk dalam Indikator Sasaran adalah program penunjang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

3.6. Realisasi Anggaran

3.6.1. Capaian Realisasi Fisik

Berikut capaian realisasi fisik Tahun 2018.

Tabel 3. 26

**REALISASI PER PROGRAM KEGIATAN APBD
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI		REALISASI		SISA ANGGARAN	
			FISIK (%)	KINERJA	KEUANGAN			KINERJA A
					(Rp)	(%)		
	BELANJA LANGSUNG	454.508.912.062,00	97,64	Sangat baik	410.883.552.328,86	90,40	Sangat baik	43.625.359.733,14
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.125.016.140,00	100,00	Sangat baik	4.667.332.355	91,07	Sangat baik	457.683.785
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6.986.908.167,00	100,00	Sangat baik	6.717.495.820	96,14	Sangat baik	269.412.347
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	309.819.200,00	100,00	Sangat baik	299.822.000	96,77	Sangat baik	9.997.200
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	185.148.000,00	100,00	Sangat baik	161.967.795	87,48	Sangat baik	23.180.205
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.369.035.000,00	100,00	Sangat baik	1.258.727.796	91,94	Sangat baik	110.307.204
VI	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI	204.488.943.817,00	91,69	Sangat baik	181.077.032.125	88,55	Sangat baik	23.411.911.692
VII	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	65.298.230.300,00	97,92	Sangat baik	62.760.807.356	96,11	Sangat baik	2.537.422.944

VIII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	1.982.623.465,00	100,00	Sangat baik	1.967.517.728	99,24	Sangat baik	15.105.737
IX	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	836.941.000,00	100,00	Sangat baik	711.142.859	84,97	Sangat baik	125.798.141
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.341.202.743,00	92,58	Sangat baik	143.245.064.585	91,04	Sangat baik	14.096.138.158
XI	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	1.463.838.965,00	100,00	Sangat baik	1.232.310.365	84,18	Sangat baik	231.528.600
XII	PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	4.929.252.510,00	100,00	Sangat baik	4.140.183.131	83,99	Baik	789.069.379
XIII	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	479.701.250,00	100,00	Sangat baik	325.983.700	67,96	Cukup	153.717.550
XI V	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	302.700.755,00	100,00	Sangat baik	285.188.972	94,21	Sangat baik	17.511.783
XV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE KEWENANGAN PROVINSI	638.335.750,00	100,00	Sangat baik	630.330.148	98,75	Sangat baik	8.005.602
XV I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS DAERAH KAB/KOTA	2.771.215.000,00	80,00	Baik	1.402.645.594	50,61	Kurang	1.368.569.406

Tabel 3. 27
**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
 PELAKSANAAN KEGIATAN APBD
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASSI		REALISASI		SISA ANGGARAN	
			FISIK (%)	KINERJA	KEUANGAN			KINERJA
					(Rp)	(%)		
	BELANJA LANGSUNG	454.508.912.062,00	97,64	Sangat baik	410.883.552.328,86	90,40	Sangat baik	43.625.359.733,14
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.125.016.140,00	100,00	Sangat baik	4.667.332.355	91,07	Sangat baik	457.683.785
1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.820.000,00	100,00	Sangat baik	6.752.859	99,02	Sangat baik	67.141
2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.669.800.000,00	100,00	Sangat baik	1.398.219.945	83,74	Baik	271.580.055
3	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN, PENGAMANAN DAN SOPIR KANTOR	1.791.555.390,00	100,00	Sangat baik	1.756.903.555	98,07	Sangat baik	34.651.835
4	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	178.711.000,00	100,00	Sangat baik	178.493.590	99,88	Sangat baik	217.410
5	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	142.365.750,00	100,00	Sangat baik	125.931.180	88,46	Sangat baik	16.434.570
6	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN	30.000.000,00	100,00	Sangat baik	26.327.600	87,76	Sangat baik	3.672.400

	KANTOR							
7	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	30.000.000,00	100,00	Sangat baik	29.996.000	99,99	Sangat baik	4.000
8	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH DAN KELUAR DAERAH	950.764.000,00	100,00	Sangat baik	833.237.263	87,64	Sangat baik	117.526.737
9	PENYEDIAAN JASA INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI	325.000.000,00	100,00	Sangat baik	311.470.363	95,84	Sangat baik	13.529.637
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6.986.908.167,00	100,00	Sangat baik	6.717.495.820	96,14	Sangat baik	269.412.347
10	PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI	384.991.700,00	100,00	Sangat baik	354.336.700	92,04	Sangat baik	30.655.000
11	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	1.266.521.316,00	100,00	Sangat baik	1.212.734.700	95,75	Sangat baik	53.786.616
12	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	409.400.000,00	100,00	Sangat baik	405.030.053	98,93	Sangat baik	4.369.947
13	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	105.850.000,00	100,00	Sangat baik	81.626.557	77,12	Baik	24.223.443
14	PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASET OPD	315.028.000,00	100,00	Sangat baik	243.290.559	77,23	Baik	71.737.441
15	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.894.201.251,00	100,00	Sangat baik	1.894.201.251	100,00	Sangat baik	0
16	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.322.961.400,00	100,00	Sangat baik	1.250.857.000	94,55	Sangat baik	72.104.400
17	PEMBANGUNAN FASILITAS PENUNJANG KANTOR DINAS PU DAN PENATAAN RUANG SUMATERA BARAT	360.000.000,00	100,00	Sangat baik	357.788.000	99,39	Sangat baik	2.212.000
18	RENOVASI RUMAH DINAS PU DAN PENATAAN RUANG SUMATERA BARAT	927.954.500,00	100,00	Sangat baik	917.631.000	98,89	Sangat baik	10.323.500
III	PROGRAM PENINGKATAN			Sangat baik		96,77	Sangat	

	DISIPLIN APARATUR	309.819.200,00	100,00		299.822.000		baik	9.997.200
19	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	309.819.200,00	100,00	Sangat baik	299.822.000	96,77	Sangat baik	9.997.200
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	185.148.000,00	100,00	Sangat baik	161.967.795	87,48	Sangat baik	23.180.205
20	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	185.148.000,00	100,00	Sangat baik	161.967.795	87,48	Sangat baik	23.180.205
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.369.035.000,00	100,00	Sangat baik	1.258.727.796	91,94	Sangat baik	110.307.204
21	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	247.335.000,00	100,00	Sangat baik	215.886.042	87,28	Sangat baik	31.448.958
22	PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD	791.700.000,00	100,00	Sangat baik	785.450.000	99,21	Sangat baik	6.250.000
23	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	80.000.000,00	100,00	Sangat baik	65.047.991	81,31	Baik	14.952.009
24	MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD	250.000.000,00	100,00	Sangat baik	192.343.763	76,94	Baik	57.656.237
VI	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI	204.488.943.817,00	91,69	Sangat baik	181.077.032.125	88,55	Sangat baik	23.411.911.692
25	PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	919.816.700,00	100,00	Sangat baik	911.343.209	99,08	Sangat baik	8.473.491
26	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KOTA PADANG DAN KAB. PESISIR SELATAN	7.760.310.900,00	100,00	Sangat baik	7.748.750.850	99,85	Sangat baik	11.560.050
27	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK DAN KOTA SOLOK	27.361.349.400,00	100,00	Sangat baik	27.352.454.600	99,97	Sangat baik	8.894.800
28	PEMBANGUNAN JALAN			Sangat baik		99,72	Sangat	

	PROVINSI DI WILAYAH KAB. 50 KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH	10.297.251.700,0 0	100,00		10.268.177.700		baik	29.074.000
29	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT	11.463.198.200,0 0	100,00	Sangat baik	11.459.817.350	99,97	Sangat baik	3.380.850
30	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA	13.219.999.000,0 0	100,00	Sangat baik	13.218.918.950	99,99	Sangat baik	1.080.050
31	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PASAMAN DAN KAB. TANAH DATAR DAN KOTA SAWAHLUNTO	11.742.896.700,0 0	92,87	Sangat baik	10.557.404.479	89,90	Sangat baik	1.185.492.221
32	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. AGAM DAN KOTA BUKITTINGGI	25.279.632.000,0 0	100,00	Sangat baik	25.275.414.984	99,98	Sangat baik	4.217.016
33	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. SOLOK DAN KAB. SOLOK SELATAN	10.825.704.800,0 0	100,00	Sangat baik	10.821.169.800	99,96	Sangat baik	4.535.000
34	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	4.984.423.800,00	100,00	Sangat baik	4.979.475.000	99,90	Sangat baik	4.948.800
35	PEMBANGUNAN JEMBATAN DI PROVINSI WILAYAH-I	9.529.042.800,00	100,00	Sangat baik	9.511.768.500	99,82	Sangat baik	17.274.300
36	PEMBANGUNAN JEMBATAN DI PROVINSI WILAYAH-II	14.127.563.500,0 0	86,00	Sangat baik	11.191.081.300	79,21	Baik	2.936.482.200
37	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN PROVINSI	821.948.650,00	100,00	Sangat baik	777.555.185	94,60	Sangat baik	44.393.465
38	PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN / JEMBATAN PROVINSI	11.200.000.000,0 0	35,39	Kurang	3.963.882.728	35,39	Kurang	7.236.117.272
39	PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN	7.886.767.500,00	3,02	Kurang	238.369.312	3,02	Kurang	7.648.398.188

	JALAN/JEMBATAN DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS							
40	MONITORING DAN PENGAWASAN PERIZINAN UTILITAS UMUM	54.618.800,00	100,00	Sangat baik	54.179.458	99,20	Sangat baik	439.342
41	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI	599.994.800,00	100,00	Sangat baik	593.555.518	98,93	Sangat baik	6.439.282
42	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN PROVINSI	483.169.000,00	100,00	Sangat baik	480.741.662	99,50	Sangat baik	2.427.338
43	PENYUSUNAN DATABASE DAN SURVEY JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI	1.172.052.667,00	100,00	Sangat baik	925.721.196	78,98	Baik	246.331.471
44	PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI	6.674.484.000,00	100,00	Sangat baik	6.464.473.163	96,85	Sangat baik	210.010.837
45	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN PROVINSI DAK	22.662.000.000,00	100,00	Sangat baik	18.878.765.861	83,31	Baik	3.783.234.139
46	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PADANG PARIAMAN DAN KOTA PARIAMAN	5.422.718.900,00	100,00	Sangat baik	5.404.011.320	99,66	Sangat baik	18.707.580
VII	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	65.298.230.300,00	97,92	Sangat baik	62.760.807.356	96,11	Sangat baik	2.537.422.944
47	REHAB / PEMEL RUTIN JEMBATAN PROVINSI DAN BANGUNAN PELENGKAP JALAN	3.261.727.800,00	100,00	Sangat baik	2.971.851.094	91,11	Sangat baik	289.876.706
48	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KOTA BUKITTINGGI DAN AGAM TIMUR	3.102.564.000,00	100,00	Sangat baik	3.101.701.200	99,97	Sangat baik	862.800
49	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. 50 KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH	4.949.178.500,00	100,00	Sangat baik	4.944.719.190	99,91	Sangat baik	4.459.310
50	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. TANAH DATAR DAN KOTA PADANG PANJANG	3.464.000.000,00	100,00	Sangat baik	3.458.576.410	99,84	Sangat baik	5.423.590

51	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PADANG PARIAMAN DAN KOTA PADANG	2.373.808.000,00	100,00	Sangat baik	2.346.548.100	98,85	Sangat baik	27.259.900
52	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. SOLOK DAN KOTA SOLOK	2.986.084.000,00	100,00	Sangat baik	2.984.141.450	99,93	Sangat baik	1.942.550
53	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB SOLOK SELATAN	2.755.435.000,00	100,00	Sangat baik	2.755.356.160	100,00	Sangat baik	78.840
54	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA	3.074.829.000,00	100,00	Sangat baik	3.074.066.612	99,98	Sangat baik	762.388
55	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PESISIR SELATAN DAN KEP. MENTAWAI	3.026.260.000,00	100,00	Sangat baik	2.966.017.350	98,01	Sangat baik	60.242.650
56	PEMELIHARAAN PERALATAN JALAN DAN JEMBATAN	1.200.000.000,00	100,00	Sangat baik	1.160.823.471	96,74	Sangat baik	39.176.529
57	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. AGAM	2.249.905.000,00	100,00	Sangat baik	2.249.685.540	99,99	Sangat baik	219.460
58	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PASAMAN	3.177.291.000,00	100,00	Sangat baik	3.165.501.089	99,63	Sangat baik	11.789.911
59	REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PASAMAN BARAT	2.813.732.000,00	100,00	Sangat baik	2.809.913.940	99,86	Sangat baik	3.818.060
60	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WILAYAH I	9.793.084.300,00	100,00	Sangat baik	9.787.318.600	99,94	Sangat baik	5.765.700
61	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WILAYAH II	10.857.289.700,00	100,00	Sangat baik	10.851.023.450	99,94	Sangat baik	6.266.250
62	PENGADAAN PERALATAN DAN BAHAN JALAN DAN JEMBATAN	6.213.042.000,00	66,67	Sangat baik	4.133.563.700	66,53	Cukup	2.079.478.300
VIII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	1.982.623.465,00	100,00	Sangat baik	1.967.517.728	99,24	Sangat baik	15.105.737
63	PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN LABORATORIUM KE BINA MARGAAN	340.022.300,00	100,00	Sangat baik	337.965.692	99,40	Sangat baik	2.056.608

64	PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR DAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN	1.371.757.275,00	100,00	Sangat baik	1.371.569.881	99,99	Sangat baik	187.394
65	MONITORING PENGENDALIAN MUTU UPTD	270.843.890,00	100,00	Sangat baik	257.982.155	95,25	Sangat baik	12.861.735
IX	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	836.941.000,00	100,00	Sangat baik	711.142.859	84,97	Sangat baik	125.798.141
66	PENDAMPINGAN PROGRAM SANIMAS IDB DAN PPSP	350.554.500,00	100,00	Sangat baik	271.940.209	77,57	Baik	78.614.291
67	PEMBINAAN PENYUSUNAN MASTERPLAN SANITASI KAB/KOTA	306.386.500,00	100,00	Sangat baik	271.181.650	88,51	Sangat baik	35.204.850
68	PENYUSUNAN PROFIL PENGELOLAAN SANITASI PROVINSI SUMATERA BARAT	180.000.000,00	100,00	Sangat baik	168.021.000	93,35	Sangat baik	11.979.000
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.341.202.743,00	92,58	Sangat baik	143.245.064.585	91,04	Sangat baik	14.096.138.158
69	PEMBANGUNAN STADIUM UTAMA SUMATERA BARAT (LANJUTAN)	96.469.877.143,00	99,11	Sangat baik	89.528.482.055	92,80	Sangat baik	6.941.395.088
70	PEMBANGUNAN GEDUNG KEBUDAYAAN SUMATERA BARAT (LANJUTAN)	34.764.471.000,00	100,00	Sangat baik	31.089.253.100	89,43	Sangat baik	3.675.217.900
71	PEMBANGUNAN GEDUNG UTAMA KANTOR GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT	378.610.000,00	100,00	Sangat baik	358.823.110	94,77	Sangat baik	19.786.890
72	PEMBANGUNAN GEDUNG CONVENTION HALL SUMATERA BARAT (LANJUTAN)	10.234.000.000,00	95,01	Sangat baik	8.782.841.670	85,82	Sangat baik	1.451.158.330
73	PEMBANGUNAN GEDUNG BUNDO KANDUANG PROVINSI SUMATERA BARAT	993.140.500,00	100,00	Sangat baik	978.188.650	98,49	Sangat baik	14.951.850

74	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN TEKNIS (TPT) BANGUNAN NEGARA DI SUMATERA BARAT	97.726.000,00	100,00	Sangat baik	81.182.186	83,07	Sangat baik	16.543.814
75	PENYELENGGARAAN HARI PERS NASIONAL	290.182.700,00	100,00	Sangat baik	272.190.730	93,80	Sangat baik	17.991.970
76	REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA	2.053.616.600,00	100,00	Sangat baik	1.869.771.250	91,05	Sangat baik	183.845.350
77	PEMBANGUNAN GEDUNG PENGENDALIAN INFLASI PROVINSI SUMATERA BARAT	3.498.769.300,00	100,00	Sangat baik	3.480.645.920	99,48	Sangat baik	18.123.380
78	PENAMBAHAN GARASE RUMAH DINAS GUBERNUR	748.110.500,00	100,00	Sangat baik	646.880.415	86,47	Sangat baik	101.230.085
79	PEMBANGUNAN TAMAN WISATA KELOK SEMBILAN	1.161.820.000,00	-	Kurang	172.092.000	14,81	Kurang	989.728.000
80	PENDAMPINGAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI SUMATERA BARAT	135.526.800,00	100,00	Sangat baik	133.700.550	98,65	Sangat baik	1.826.250
81	PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSULTASI TEKNIS DAN ADVOKASI SERTA TERSEDINYA DATA INFORMASI TEKNIS BIDANG KECIPTAKARYAAN	214.950.000,00	100,00	Sangat baik	165.256.700	76,88	Baik	49.693.300
82	PEMBINAAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)	571.970.000,00	100,00	Sangat baik	528.383.408	92,38	Sangat baik	43.586.592
83	ASSESMEN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKASI LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	242.730.000,00	100,00	Sangat baik	220.532.622	90,86	Sangat baik	22.197.378
84	REKONSTRUKSI BANGUNAN PASCA BENCANA I	4.232.751.200,00	100,00	Sangat baik	4.230.508.000	99,95	Sangat baik	2.243.200
85	PEMBANGUNAN SHELTER DI MUSHOLLA JABAL RAHMAH DI PAINAN (LANJUTAN)	252.951.000,00	100,00	Sangat baik	227.649.047	90,00	Sangat baik	25.301.953
86	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT	600.000.000,00	50,00	Kurang	99.000.000	16,50	Kurang	501.000.000

87	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENNIS GUBERNURAN (LANJUTAN)	250.000.000,00	100,00	Sangat baik	238.424.920	95,37	Sangat baik	11.575.080
88	REKONSTRUKSI BANGUNAN PASCA BENCANA II	20.000.000,00	100,00	Sangat baik	17.741.332	88,71	Sangat baik	2.258.668
89	PENYUSUNAN MASTERPLAN PASAR KOTO BARU	130.000.000,00	100,00	Sangat baik	123.516.920	95,01	Sangat baik	6.483.080
XI	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	1.463.838.965,00	100,00	Sangat baik	1.232.310.365	84,18	Sangat baik	231.528.600
90	PENYUSUNAN RANPERDA SMM	1.639.500,00	100,00	Sangat baik	1.639.500	100,00	Sangat baik	-
91	BIMBINGAN TEKNIS / WORKSHOP JASA KONSTRUKSI	586.501.110,00	100,00	Sangat baik	516.822.250	88,12	Sangat baik	69.678.860
92	LOKAKARYA, SOSIALISASI DAN FORUM KOMUNIKASI JASA KONSTRUKSI	387.337.865,00	100,00	Sangat baik	317.701.350	82,02	Baik	69.636.515
93	KEGIATAN UPDATE PROFIL JASA KONSTRUKSI	139.029.140,00	100,00	Sangat baik	108.868.000	78,31	Baik	30.161.140
94	PENYUSUNAN RANPERDA SMK3	171.642.780,00	100,00	Sangat baik	138.313.040	80,58	Baik	33.329.740
95	SERTIFIKASI AHLI MUDA	177.688.570,00	100,00	Sangat baik	148.966.225	83,84	Baik	28.722.345
XII	PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	4.929.252.510,00	100,00	Sangat baik	4.140.183.131	83,99	Baik	789.069.379
96	PENYUSUNAN RTR KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	923.797.750,00	100,00	Sangat baik	888.039.910	96,13	Sangat baik	35.757.840
97	PROSES LEGALISASI RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)	522.914.950,00	100,00	Sangat baik	485.269.586	92,80	Sangat baik	37.645.364
98	PELATIHAN PEMETAAN TATA RUANG	377.813.950,00	100,00	Sangat baik	316.217.662	83,70	Baik	61.596.288
99	PENYUSUNAN DATABASE KE PUAN DAN TATA RUANG PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	944.666.750,00	100,00	Sangat baik	869.794.623	92,07	Sangat baik	74.872.127
100	LEGALISASI PERDA REVISI RTRW PROVINSI SUMATERA BARAT	912.063.150,00	100,00	Sangat baik	679.409.120	74,49	Baik	232.654.030

10 1	KOORDINASI PERENCANAAN TATA RUANG, PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT	286.593.950,00	100,00	Sangat baik	136.645.396	47,68	Kurang	149.948.554
10 2	PENINGKATAN PEMAHAMAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PENATAAN RUANG	572.282.150,00	100,00	Sangat baik	416.885.734	72,85	Cukup	155.396.416
10 3	PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN BAHAN KOMUNIKASI PENATAAN RUANG	389.119.860,00	100,00	Sangat baik	347.921.100	89,41	Sangat baik	41.198.760
XIII	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	479.701.250,00	100,00	Sangat baik	325.983.700	67,96	Cukup	153.717.550
10 4	PENGAWASAN TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENATAAN RUANG DI KABUPATEN/KOTA	167.546.950,00	100,00	Sangat baik	117.479.800	70,12	Cukup	50.067.150
10 5	PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT	144.591.350,00	100,00	Sangat baik	111.775.200	77,30	Cukup	32.816.150
10 6	MONITORING PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	167.562.950,00	100,00	Sangat baik	96.728.700	57,73	Cukup	70.834.250
XI V	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	302.700.755,00	100,00	Sangat baik	285.188.972	94,21	Sangat baik	17.511.783
10 7	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI RETRIBUSI	302.700.755,00	100,00	Sangat baik	285.188.972	94,21	Sangat baik	17.511.783
XV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE KEWENANGAN PROVINSI	638.335.750,00	100,00	Sangat baik	630.330.148	98,75	Sangat baik	8.005.602
10 8	PEMBANGUNAN DRAINASE LINTAS KABUPATEN/KOTA	5.318.000,00	100,00	Sangat baik	5.318.000	100,00	Sangat baik	-
10 9	SURVEY DRAINASE LINTAS KABUPATEN/KOTA	177.017.750,00	100,00	Sangat baik	172.980.148	97,72	Sangat baik	4.037.602

110	PEMBANGUNAN DRAINASE KABUPATEN TANAH DATAR DAN KOTA PADANG PANJANG	228.000.000,00	100,00	Sangat baik	226.235.000	99,23	Sangat baik	1.765.000
111	PEMBANGUNAN DRAINASE KABUPATEN SOLOK DAN KOTA SOLOK	228.000.000,00	100,00	Sangat baik	225.797.000	99,03	Sangat baik	2.203.000
XV I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS DAERAH KAB/KOTA	2.771.215.000,00	80,00	Baik	1.402.645.594	50,61	Kurang	1.368.569.406
112	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN KECIPTAKARYAAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT	558.915.000,00	100,00	Sangat baik	434.462.114	77,73	Baik	124.452.886
113	PEMBINAAN KEGIATAN PAMSIMAS DI PROVINSI SUMATERA BARAT	164.300.000,00	100,00	Sangat baik	155.550.414	94,67	Sangat baik	8.749.586
114	PENYUSUNAN RENCANA SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL DI PROV. SUMATERA BARAT	610.000.000,00	100,00	Sangat baik	597.048.716	97,88	Sangat baik	12.951.284
115	PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) DI PROV. SUMATERA BARAT WILAYAH I	268.000.000,00	100,00	Sangat baik	215.584.350	80,44	Baik	52.415.650
116	PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) KAWASAN PALANGAI - NYIUR MELAMBAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	1.170.000.000,00	-	Kurang	-	0,00	Kurang	1.170.000.000

Hasil evaluasi **capaian kinerja fisik** terhadap 16 (enam belas) program diatas, diketahui bahwa terdapat 15 (lima belas) program yang berkinerja sangat baik dan 1 (satu) program baik dan **capaian kinerja keuangan** terhadap 16 (enam belas) program diatas, diketahui bahwa

terdapat 13 (tiga belas) program berkinerja sangat baik, 1 (satu) program berkinerja baik, 1 (satu) program berkinerja cukup, 1 (satu) program berkinerja kurang.

3.6.2. Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.28

REALISASI FISIK / KEUANGAN / KENDALA TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN CAPIAN INDIKATOR KINERJA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI			KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 %	SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
BELANJA LANGSUNG				454.508.912.062,00	97,64	410.883.552.328,86	90,40		43.625.359.733,14
Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan anggaran kas	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan anggaran kas	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.125.016.140,00	100,00	4.667.332.355	91,07		457.683.785
			PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.820.000,00	100,00	6.752.859	99,02		67.141
			PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.669.800.000,00	100,00	1.398.219.945	83,74	Sisa anggaran senilai 16,26 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran	271.580.055
			PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN, PENGAMANAN DAN SOPIR KANTOR	1.791.555.390,00	100,00	1.756.903.555	98,07		34.651.835
			PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	178.711.000,00	100,00	178.493.590	99,88		217.410
			PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	142.365.750,00	100,00	125.931.180	88,46	Sisa anggaran senilai 11,54 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran	16.434.570
			PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.000.000,00	100,00	26.327.600	87,76	Sisa anggaran senilai 12,24 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran	3.672.400

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN CAPIAN INDIKATOR KINERJA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI			KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 %	SISA ANGGARAN	
					FISIK (%)	KEUANGAN				
						(Rp)	(%)			
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	30.000.000,00	100,00	29.996.000	99,99		4.000	
			RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH DAN KELUAR DAERAH	950.764.000,00	100,00	833.237.263	87,64	Sisa anggaran senilai 12,36 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran	117.526.737	
			PENYEDIAAN JASA INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI	325.000.000,00	100,00	311.470.363	95,84		13.529.637	
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6.986.908.167,00	100,00	6.717.495.820	96,14		269.412.347
				PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI	384.991.700,00	100,00	354.336.700	92,04		30.655.000
				PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	1.266.521.316,00	100,00	1.212.734.700	95,75		53.786.616
				PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	409.400.000,00	100,00	405.030.053	98,93		4.369.947
				PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	105.850.000,00	100,00	81.626.557	77,12	Sisa anggaran senilai 22,88 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran	24.223.443

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN CAPIAN INDIKATOR KINERJA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI			KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 %	SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
			PENGLOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASET OPD	315.028.000,00	100,00	243.290.559	77,23	Sisa anggaran senilai 22,77 merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran	71.737.441
			PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.894.201.251,00	100,00	1.894.201.251	100,00		0
			PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.322.961.400,00	100,00	1.250.857.000	94,55		72.104.400
			PEMBANGUNAN FASILITAS PENUNJANG KANTOR DINAS PU DAN PENATAAN RUANG SUMATERA BARAT	360.000.000,00	100,00	357.788.000	99,39		2.212.000
			RENOVASI RUMAH DINAS PU DAN PENATAAN RUANG SUMATERA BARAT	927.954.500,00	100,00	917.631.000	98,89		10.323.500
			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	309.819.200,00	100,00	299.822.000	96,77		9.997.200
			PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	309.819.200,00	100,00	299.822.000	96,77		9.997.200
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	185.148.000,00	100,00	161.967.795	87,48		23.180.205

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI			KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 %	SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
			BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	185.148.000,00	100,00	161.967.795	87,48	Sisa anggaran senilai 12,52 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran	23.180.205
			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.369.035.000,00	100,00	1.258.727.796	91,94		110.307.204
			PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	247.335.000,00	100,00	215.686.042	87,28	Sisa anggaran senilai 12,72 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran	31.448.958
			PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD	791.700.000,00	100,00	785.450.000	99,21		6.250.000
			PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	80.000.000,00	100,00	65.047.991	81,31	Sisa anggaran senilai 18,69 merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran	14.952.009
			MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD	250.000.000,00	100,00	192.343.763	76,94	Sisa anggaran senilai 23,06 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran	57.656.237
Meningkatnya Konektivitas dan Akseibilitas Wilayah	Persentase Jalan Mantap	Perbandingan Jumlah Mantap Jalan Provinsi dibandingkan dengan Total Panjang Jalan Provinsi (Km) dikalikan 100 %	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI	204.488.943.817,00	91,69	181.077.032.125	88,55		23.411.911.692
			PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	919.816.700,00	100,00	911.343.209	99,08		8.473.491
			PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KOTA PADANG DAN KAB. PESISIR SELATAN	7.760.310.900,00	100,00	7.748.750.850	99,85		11.560.050
			PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK DAN KOTA	27.361.349.400,00	100,00	27.352.454.600	99,97		8.894.800

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI			KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 %	SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
		Perbandingan Jumlah Mantap Jalan Provinsi dibandingkan dengan Total Panjang Jalan Provinsi (Km) dikalikan	PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK DAN KOTA SOLOK	27.361.349.400,00	100,00	27.352.454.800	99,97		8.894.800
			PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. SO KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH	10.297.251.700,00	100,00	10.268.177.700	99,72		29.074.000
			PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT	11.403.198.200,00	100,00	11.459.817.350	99,97		3.380.850
			PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA	13.219.999.000,00	100,00	13.218.918.950	99,99		1.080.050
			PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PASAMAN DAN KAB. TANAH DATAR DAN KOTA SAMALUNTO	11.742.895.700,00	92,87	10.557.404.479	89,99	<ul style="list-style-type: none"> • Kelalalan kontraktor dalam penyelesaian pekerjaan pasangan batu di lahan masyarakat. Penyelesaian pekerjaan pasangan batu mempengaruhi pekerjaan rigid beton di badan jalan yang merupakan major item di dalam paket ini- •Lambatnya memulainya pekerjaan di segmen 1 (dari gerbang PLTU sampai ke Jembatan Siasam) karena menunggu proses pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh pihak Pemko Sawahlunto •Lalu lintas truk tronton pengangkut batu bara untuk kebutuhan PLTU Ombilin dengan tonase berat melebihi 40 ton. Tidak tercapai kesepakatan untuk mengganti dengan truk yang lebih kecil sehingga mempengaruhi metoda dan waktu pelaksanaan pekerjaan rigid 	1.185.492.221

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI			KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 %	SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
			PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. AGAM DAN KOTA BUKITTINGGI	25.279.632.000,00	100,00	25.275.414.984	99,96		4.217.016
			PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. SOLOK DAN KAB. SOLOK SELATAN	10.825.704.800,00	100,00	10.821.169.800	99,96		4.535.000
			PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	4.984.423.800,00	100,00	4.979.475.000	99,90		4.948.800
			PEMBANGUNAN JEMBATAN DI PROVINSI WILAYAH-I	9.529.042.800,00	100,00	9.511.768.500	99,82		17.274.300
			PEMBANGUNAN JEMBATAN DI PROVINSI WILAYAH-II	14.127.563.500,00	86,00	11.191.081.300	79,21	•Jeleknya pengelolaan keuangan proyek yang berdampak terlambatnya pembayaran upah dan leveransir material sehingga menggangu jalannya pekerjaan •Tingginya curah hujan pada periode kontrak (bulan Oktober s/d bulan November) 2018 sehingga kurang optimalnya pencapaian progress di lapangan	2.936.482.200
			PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN PROVINSI	821.948.650,00	100,00	777.555.185	94,60		44.393.465

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN CAPIAN INDIKATOR KINERJA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI			KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 %	SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
			PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN / JEMBATAN PROVINSI	11.200.000.000,00	35,39	3.963.882.728	35,39	1. Lokasi Bungus Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan <ul style="list-style-type: none"> •DPA awal belum tercantum 4 tahap •Dilakukan perubahan menjadi 4 tahap •Proses terakhir penetapan lokasi dan menunggu pembentukan panitia Satgas A dan B oleh Kanwil Pertanahan 	7.236.117.272
			PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS	7.886.767.800,00	3,02	238.369.312	3,02	2. Lokasi Batusangkar <ul style="list-style-type: none"> •Lokasi Baso - Piladang lambatnya pembuatan alas hak dari masyarakat sehingga terakhir sampai di BPN akhir November 2018 •Hasil perbaikan alas hak sampai saat ini belum selesai 	7.648.398.188
								3. Lokasi Agam <ul style="list-style-type: none"> •Pemindahan lokasi di DPA perubahan sicincin - malalak (selesai) •Manggopoh - padang luar (simpang gudang) peta bidang belum siap dari BPN 	
								Proses yang cukup panjang. Saat ini dalam proses tim appraisal	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN CAPIAN INDIKATOR KINERJA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI			KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 %	SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
			MONITORING DAN PENGAWASAN PERIZINAN UTILITAS UMUM	54.618.800,00	100,00	54.179.458	99,20		439.342
			PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI	599.994.800,00	100,00	593.555.518	98,93		6.439.282
			PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN PROVINSI	483.169.000,00	100,00	480.741.662	99,50		2.427.338
			PENYUSUNAN DATABASE DAN SURVEY JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI	1.172.052.667,00	100,00	925.721.196	78,98	Kegiatan BMS yang tidak dilaksanakan karena gagal pengadaan konsultan individu	246.331.471
			PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI	6.674.484.000,00	100,00	6.464.473.163	96,85		210.010.837
			PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN PROVINSI DAK	22.662.000.000,00	100,00	18.878.765.861	83,31	Pada prinsipnya paket pekerjaan fisik telah terlaksana terhadap sisa anggaran senilai 16,69 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran	3.783.234.139
			PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PADANG PARIAMAN DAN KOTA PARIAMAN	5.422.718.900,00	100,00	5.404.011.320	99,66		18.707.580
			PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	65.298.230.300,00	97,92	62.760.807.356	96,11		2.537.422.944

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN CAPIAN INDIKATOR KINERJA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI			KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 %	SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
			REHAB / PEMEL RUTIN JEMBATAN PROVINSI DAN BANGUNAN PELENGKAP JALAN	3.261.727.800,00	100,00	2.971.851.094	91,11		289.876.706
			REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KOTA BUKITTINGGI DAN AGAM TIMUR	3.102.564.000,00	100,00	3.101.701.200	99,97		862.800
			REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. SO KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH	4.949.178.500,00	100,00	4.944.719.190	99,91		4.459.310
			REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. TANAH DATAR DAN KOTA PADANG PANJANG	3.464.000.000,00	100,00	3.458.576.410	99,84		5.423.590
			REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PADANG PARIAMAN DAN KOTA PADANG	2.373.808.000,00	100,00	2.346.548.100	98,85		27.259.900
			REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. SOLOK DAN KOTA SOLOK	2.986.084.000,00	100,00	2.984.141.450	99,93		1.942.550
			REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB SOLOK SELATAN	2.755.435.000,00	100,00	2.755.356.160	100,00		78.840
			REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASTRAYA	3.074.829.000,00	100,00	3.074.066.612	99,98		762.388

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN CAPIAN INDIKATOR KINERJA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI			KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 %	SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
			REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PESISIR SELATAN DAN KEP. MENTAWAI	3.026.260.000,00	100,00	2.966.017.350	98,01		60.242.650
			PEMELIHARAAN PERALATAN JALAN DAN JEMBATAN	1.200.000.000,00	100,00	1.160.823.471	96,74		39.176.529
			REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. AGAM	2.249.905.000,00	100,00	2.249.685.540	99,99		219.460
			REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PASAMAN	3.177.291.000,00	100,00	3.165.501.089	99,63		11.789.911
			REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PASAMAN BARAT	2.813.732.000,00	100,00	2.809.913.940	99,86		3.818.060
			PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WILAYAH I	9.793.084.300,00	100,00	9.787.318.600	99,94		5.765.700
			PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WILAYAH II	10.857.289.700,00	100,00	10.851.023.450	99,94		6.266.250

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN CAPIAN INDIKATOR KINERJA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI			KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 %	SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
			PENGADAAN PERALATAN DAN BAHAN JALAN DAN JEMBATAN	6.213.042.000,00	66,67	4.133.563.700	66,53	Proses pengadaan yang sebelumnya direncanakan dengan pengadaan E-catalog dan perencanaan harga pun berdasarkan harga yang tertera pada website LKPP E- catalog harganya adalah sekitar Rp.480.000.000,- namun dikarenakan E-Katalog turun tayang pada bulan juli dan sampai akhir desember tetap belum tayang dan dilakukan pengadaan secara lelang cepat juga tidak diminati dikarenakan harga yang direncanakan bukan harga lelang. Maka pengadaan Roller 3 ton ini tidak bisa dilakukan	2.079.478.300
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	1.982.623.465,00	100,00	1.967.517.728	99,24		15.105.737

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI			KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 %	SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
			PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN LABORATORIUM KE BINA MARGAAN	340.022.300,00	100,00	337.965.692	99,40		2.056.608
			PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR DAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN	1.371.757.275,00	100,00	1.371.569.881	99,99		187.394
			MONITORING PENGENDALIAN MUTU UPTD	270.843.890,00	100,00	257.982.155	95,25		12.861.735
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Umum dan Aparatur serta Pelayanan Dasar Masyarakat	Persentase cakupan air minum	Rata-rata perbandingan jumlah penduduk terlayani air minum di kabupaten/kota dibandingkan jumlah penduduk kabupaten/kota kali 100%.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	836.941.000,00	100,00	711.142.859	84,97		125.798.141
			PENDAMPINGAN PROGRAM SANIMAS IDB DAN PPSP	350.554.500,00	100,00	271.940.209	77,57	Perjalanan dinas tidak terserap karena minimnya kendaraan dinas dan BBM tidak terserap karena memakai kendaraan pribadi	78.614.291
			PEMBINAAN PENYUSUNAN MASTERPLAN SANITASI KAB/KOTA	306.386.500,00	100,00	271.181.650	88,51	Perjalanan dinas tidak terserap karena minimnya kendaraan dinas dan BBM tidak terserap karena memakai kendaraan pribadi	35.204.850

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN CAPIAN INDIKATOR KINERJA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI			KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 %	SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Umum dan Aparatur serta Pelayanan Dasar Masyarakat			PENYUSUNAN PROFIL PENGELOLAAN SANITASI PROVINSI SUMATERA BARAT	180.000.000,00	100,00	168.021.000	93,35		11.979.000
Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan terbangun (siap ditempati), yang terdiri atas bangunan strategis, gedung negara dan rumah negara.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.341.202.743,00	92,58	143.245.064.585	91,04		14.096.138.158
			PEMBANGUNAN STADIUM UTAMA SUMATERA BARAT (LANJUTAN)	96.469.877.143,00	99,11	89.528.482.055	92,80		6.941.395.088
			PEMBANGUNAN GEDUNG KEBUDAYAAN SUMATERA BARAT (LANJUTAN)	34.764.471.000,00	100,00	31.089.253.100	89,43	Selisih pagu dana dari harga terkontrak dan adanya addendum kontrak yang harganya turun	3.675.217.900
			PEMBANGUNAN GEDUNG UTAMA KANTOR GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT	378.610.000,00	100,00	358.823.110	94,77		19.786.890
			PEMBANGUNAN GEDUNG CONVENTION HALL SUMATERA BARAT (LANJUTAN)	10.234.000.000,00	95,01	8.782.841.670	85,82	Karena penambahan item / volume pekerjaan, realisasi keuangan mengikuti progress fisik	1.451.158.330
			PEMBANGUNAN GEDUNG BUNDO KANDUANG PROVINSI SUMATERA BARAT	993.140.500,00	100,00	978.188.650	98,49		14.951.850

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN CAPIAN INDIKATOR KINERJA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI			KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 %	SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
		Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan terbangun (siap ditempati), yang terdiri atas bangunan strategis, gedung negara dan	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN TEKNIS (TPT) BANGUNAN NEGARA DI SUMATERA BARAT	97.726.000,00	100,00	81.182.186	83,07	Perjalanan dinas tidak terserap karena minimnya kendaraan dinas dan BBM tidak terserap karena memakai kendaraan pribadi	16.543.814
			PENYELENGGARAAN HARI PERS NASIONAL	290.182.700,00	100,00	272.190.730	93,80		17.991.970
			REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA	2.053.616.600,00	100,00	1.869.771.250	91,05		183.845.350
			PEMBANGUNAN GEDUNG PENGENDALIAN INFLASI PROVINSI SUMATERA BARAT	3.498.769.300,00	100,00	3.480.645.920	99,48		18.123.380
			PENAMBAHAN GARASE RUMAH DINAS GUBERNUR	748.110.500,00	100,00	646.880.415	86,47	Terdapat tiang listrik di lokasi pekerjaan yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Proses pemindahan membutuhkan waktu	101.230.085
			PEMBANGUNAN TAMAN WISATA KELOK SEMBILAN	1.161.820.000,00	-	172.092.000	14,81	Tidak terlaksananya 2 (dua) pekerjaan karena mengusulkan Balai KSOA anggaran biaya untuk penyusunan rencana pengelolaan dan disain tapak melalui dana di Dians PUPR untuk dilaksanakan oleh Balai KSOA	989.728.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN CAPIAN INDIKATOR KINERJA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI			KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 %	SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
			PENDAMPINGAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI SUMATERA BARAT	135.526.800,00	100,00	133.700.550	98,65		1.826.250
			PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSULTASI TEKNIS DAN ADVOKASI SERTA TERSEDIA NYA DATA INFORMASI TEKNIS BIDANG KECIPTAKARYAAN	214.950.000,00	100,00	165.256.700	76,88	Kegiatan sosialisasi diselenggarakan dari tanggal 26 s/d 28 November 2018 di Bukittinggi. Target sasaran sosialisasi adalah para mandor mekanikal elektrikal dan mandor bangunan gedung dari gapensi, Gapensi Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Minimnya kehadiran peserta sebagai akibat dari penyelenggaraan sosialisasi yang bertepatan dengan finalisasi penyelesaian pekerjaan dilapangan	49.693.300
			PEMBINAAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)	571.970.000,00	100,00	528.383.408	92,38		43.586.592
			ASSESMEN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKASI LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	242.730.000,00	100,00	220.532.622	90,86		22.197.378
			REKONSTRUKSI BANGUNAN PASCA BENCANA I	4.232.751.200,00	100,00	4.230.508.000	99,95		2.243.200
			PEMBANGUNAN SHELTER DI MUSHOLLA JABAL RAHMAH DI PAINAN (LANJUTAN)	252.951.000,00	100,00	227.649.047	90,00		25.301.953

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI			KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 %	SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
			PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PEMUDA DAN OLARAGA PROVINSI SUMATERA BARAT	600.000.000,00	50,00	99.000.000	16,50	Tidak terlaksananya 1 (satu) pekerjaan karea tidak mencukupi waktu pelaksanaan pekerjaan	501.000.000
			PEMBANGUNAN LAPANGAN TENNIS GUBERNURAN (LANJUTAN)	250.000.000,00	100,00	238.424.920	95,37		11.575.080
			REKONSTRUKSI BANGUNAN PASCA BENCANA II	20.000.000,00	100,00	17.741.332	88,71	Sisa anggaran senilai 11,29 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran	2.258.668
			PENYUSUNAN MASTERPLAN PASAR KOTO BARU	130.000.000,00	100,00	123.516.920	95,01		6.483.080
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	1.463.838.965,00	100,00	1.232.310.365	84,18		231.528.600
			PENYUSUNAN RANPERDA SMM	1.639.500,00	100,00	1.639.500	100,00		-
			BIMBINGAN TEKNIS / WORKSHOP JASA KONSTRUKSI	586.501.110,00	100,00	516.822.250	88,12	Terjadinya pergeseran narasumber dari luar daerah ke dalam daerah sehingga tidak diperlukan transportasi dan homonya sesuai dengan Pergub	69.678.860
			LOKAKARYA, SOSIALISASI DAN FORUM KOMUNIKASI JASA KONSTRUKSI	387.337.865,00	100,00	317.701.350	82,02	Terjadinya pergeseran narasumber dari luar daerah ke dalam daerah sehingga tidak diperlukan transportasi dan homonya sesuai dengan Pergub	69.636.515

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN CAPIAN INDIKATOR KINERJA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI			KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 %	SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
			KEGIATAN UPDATE PROFIL JASA KONSTRUKSI	139.029.140,00	100,00	108.868.000	78,31	Perjalanan dinas luar daerah bias dilaksanakan bila disertai undangan, sementara perjalanan dinas dalam daerah terlalu banyak maka terjadi kelebihan begitu juga	30.161.140
			PENYUSUNAN RANPERDA SMK3	171.642.780,00	100,00	138.313.040	80,58	Masih belum dibutuhkan penggandaan yang lebih banyak karena baru bersifat draft ranperda	33.329.740
Meningkatnya belaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi		SERTIFIKAT AHLI MUDA	177.688.570,00	100,00	148.966.225	83,84	<ul style="list-style-type: none"> •Tidak tercapainya target jumlah peserta sertifikasi dari target 60 peserta yang terealisasi 45 peserta •Tidak diperlukan perjalanan dinas luar daerah untuk mencari narasumber karena sudah diakomodir oleh asosiasi yang menjadi mitra pendamping 	28.722.345
			PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	4.929.252.510,00	100,00	4.140.183.131	83,99		789.069.379
			PENYUSUNAN RTR KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	923.797.750,00	100,00	888.039.910	96,13		35.757.840
			PROSES LEGALISASI RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)	522.914.950,00	100,00	485.269.586	92,80		37.645.364

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI			KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 %	SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	Jumlah kesesuaian program rencana pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat	PELATIHAN PEMETAAN TATA RUANG	377.813.950,00	100,00	316.217.662	83,70	Jumlah peserta yang hadir pada pelatihan tidak sesuai dengan daftar undangan yang dikirimkan ke instansi yang bersangkutan	61.596.288
			PENYUSUNAN DATABASE KEPUAN DAN	944.666.750,00	100,00	869.794.623	92,07		74.872.127
			LEGALISASI PERDA REVISI RTRW PROVINSI SUMATERA BARAT	912.063.150,00	100,00	679.409.120	74,49	Efisiensi belanja cetak dokumen Perda karena menunggu persetujuan DPRD dan Gubernur, serta efisiensi pada belanja cetak peta karena menunggu rekomendasi BIG	232.654.030
			KOORDINASI PERENCANAAN TATA RUANG, PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT	286.593.950,00	100,00	136.645.396	47,68	Pelaksanaan kegiatan TKPRD telah dilaksanakan pembahasan Revisi RTRW untuk 5 kabupaten/kota dari 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. Pembahasan RDTR dilaksanakan hanya 1 RDTR yaitu RDTR kawasan kayu tanam Kab.Padang Pariaman. Dalam kegiatan ini kami hanya menunggu kabupaten/kota yang akan melakukan pembahasan dokumen derive RTRW atau penyusunan dokumen revisi RTRW atau penyusunan dokumen RDTR yang nantinya diberikan rekomendasi gubernur terkait kebenaran isi dokumen. Rekomendasi gubernur menjadi salah satu syarat dalam menerbitkan persetujuan substansi oleh Kementerian ATR. Sehingga penyerapan danan sangat tergantung dari kesiapan kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen tata ruangnya dan rapat-rapat khusus yang membahas permasalahan penataan ruang lainnya	149.948.554

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN CAPIAN INDIKATOR KINERJA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI			KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 %	SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
			PENINGKATAN PEMAHAMAN PELENGKAP KEPENTINGAN TERHADAP PENATAAN RUANG	572.282.150,00	100,00	416.885.734	72,85	Efisiensi belanja cetak buku pedoman perundang-undangan bidang penataan ruang dan cetak peta	155.396.416
			PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN BAHAN KOMUNIKASI PENATAAN RUANG	389.119.860,00	100,00	347.921.100	89,41	Adanya sisa anggaran yang berasal dari sisa tender belanja jasa even organizer acara hari tata ruang sebesar Rp.30.496.000	41.198.760
			PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	479.701.250,00	100,00	325.983.700	67,96		153.717.550
			PENGAWASAN TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENATAAN RUANG DI KABUPATENKOTA	167.546.950,00	100,00	117.479.800	70,12	Sisa anggaran merupakan sisa belanja akomodasi	50.067.150
			PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT	144.591.350,00	100,00	111.775.200	77,30	Sisa anggaran merupakan efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas dan sisa belanja akomodasi	32.816.150
			MONITORING PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	167.562.950,00	100,00	96.728.700	57,73	Adanya perubahan target pelaksanaan kegiatan dari 3 kali menjadi 2 kali	70.834.250
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	302.700.755,00	100,00	265.188.972	94,21		17.511.783

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI			KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 %	SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Umum dan Aparatur serta Pelayanan Dasar Masyarakat	Persentase cakupan sanitasi	Rata-rata perbandingan jumlah rumah tangga terlayani sanitasi di kabupaten/kota dibandingkan jumlah rumah tangga kabupaten/kota kali 100%.	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI RETRIBUSI	302.700.755,00	100,00	285.188.972	94,21		17.511.783
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE KEWENANGAN PROVINSI	638.335.750,00	100,00	630.330.148	98,75		8.005.602
			PEMBANGUNAN DRAINASE LINTAS KABUPATEN/KOTA	5.318.000,00	100,00	5.318.000	100,00		-
			SURVEY DRAINASE LINTAS KABUPATEN/KOTA	177.017.750,00	100,00	172.980.148	97,72		4.037.602
			PEMBANGUNAN DRAINASE KABUPATEN TANAH DATAR DAN KOTA PADANG PANJANG	228.000.000,00	100,00	226.235.000	99,23		1.765.000
			PEMBANGUNAN DRAINASE KABUPATEN SOLOK DAN KOTA SOLOK	228.000.000,00	100,00	225.797.000	99,03		2.203.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS DAERAH KAB/KOTA	2.771.215.000,00	80,00	1.402.645.594	50,61		1.368.569.406

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN CAPIAN INDIKATOR KINERJA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI			KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 %	SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		
		Rata-rata perbandingan jumlah rumah tangga terlayani sanitasi di kabupaten/kota	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN KECIPTAKARYAAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT	558.915.000,00	100,00	434.462.114	77,73	Tidak terserapnya dana untuk honor para tenaga ahli/instruktur/narasumber karena kegiatan tidak rutin dilakukan	124.452.886
			PEMBINAAN KEGIATAN PAMSIMAS DI PROVINSI SUMATERA BARAT	164.300.000,00	100,00	155.550.414	94,67		8.749.586
			PENYUSUNAN RENCANA SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL DI PROV. SUMATERA BARAT	610.000.000,00	100,00	597.048.716	97,88		12.951.284
			PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) DI PROV. SUMATERA BARAT WILAYAH I	268.000.000,00	100,00	215.584.350	80,44	Perjalanan dinas tidak terserap karena minimnya kendaraan dinas dan BBM tidak terserap karena memakai kendaraan pribadi	52.415.650
			PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) KAWASAN PALANGAI - NYIUR MELAMBAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	1.170.000.000,00	-	-	0,00	Tidak jadi dilaksanakan karena bukan kewenangan provinsi	1.170.000.000

BAB IV

PENUTUP

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan cerminan capaian target kinerja dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis pada tahun selanjutnya. LAKIP disusun berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan terhadap Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan sebelumnya. LAKIP ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan 16 (enam belas) program, meliputi: 11 (sebelas) program utama dan 5 (lima) program pendukung. Pada masing-masing program terdiri dari beberapa kegiatan.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan berdasarkan realisasi fisik maupun keuangannya. Pada laporan ini, dilakukan pengukuran capaian kinerja secara kuantitatif dan dilanjutkan dengan analisis penilaian kinerja secara kuantitatif dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria skala kualitatif sehingga dapat diketahui kinerja program/kegiatan secara kualitatif.

Pada tahun anggaran 2018 terdapat (dua) sasaran strategis Dinas yang seluruhnya dapat diukur berdasarkan target indikator kinerjanya masing-masing. Pada umumnya target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja sebelumnya dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada pada masing-masing program.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada LAKIP ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Total penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2018 ini adalah sebesar 90,92% (Rp. 439.317.857.318,86,-) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 483.181.721.020,10,-.

2. Dari 16 (enam belas) program yang ada pada tahun 2018, **capaian kinerja fisik** pekerjaan terlaksana dengan kinerja sangat baik sebanyak 15 (lima belas) program dan 1 (satu) program berkinerja baik.

Kualitas pencapaian kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat terhadap program-program tahun 2018 yaitu: **capaian kinerja keuangan** terhadap 16 (enam belas) program diatas, diketahui bahwa terdapat 13 (tiga belas) program berkinerja sangat baik, 1 (satu) program berkinerja baik, 1 (satu) program berkinerja cukup, 1 (satu) program berkinerja kurang.

3. Penilaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 ini menjadi salah satu bahan untuk pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi sesuai Penetapan Kinerja yang ada.
4. Kendala-kendala yang dihadapi pada tahun 2018 dapat dijadikan cermin untukantisipasi pada tahun-tahun berikutnya.

Padang, Januari 2019
Kepala Dinas

Ir. Fathol Bari, M.Sc.Eng
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640515 199003 1 010

LAMPIRAN

Pembangunan Gedung Kebudayaan



PAKET PENINGKATAN JALAN MATUR- PALEMBAYAN (P.080)

